

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Bengkulu

Februari 2026

FESTIVAL TABUT

A vibrant, stylized illustration of a Tabut Festival parade. In the foreground, several large, ornate drums with yellow and blue patterns are visible. Behind them, a group of performers in traditional red and gold costumes are dancing and playing the drums. The background features a colorful, multi-tiered structure resembling a traditional house or a festival float, decorated with various ornaments and flowers. The overall scene is festive and celebratory.



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BENGKULU

FEBRUARI 2026

Tim Penyusun

TIM PENULIS

Muhammad Irfan Octama (Pengarah)

Fajar Setiawan

Muhammad Rizqi Naufal Saragih

Addin Nisshaq Fathiani Diva

Meutia Puspa Putri Blante

Dyah Retnaningrum

Agita Nurfazria

Dyah Utami Puji Lestari

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kota Bengkulu – Indonesia

Telp.: 0736 – 21735/ Fax: 0736 – 21736

Publikasi LPP Bengkulu secara online dapat diperoleh di
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Februari 2026 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada *stakeholders* Bank Indonesia. Publikasi ini diterbitkan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai Perkembangan Ekonomi Makro Daerah; Keuangan Pemerintah; Perkembangan Inflasi Daerah; Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM; Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan; dan Prospek Perekonomian Daerah.

Sebagai fokus utama pembahasan laporan, dapat kami sampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada triwulan IV 2025 mengalami akselerasi dibandingkan periode sebelumnya. Akselerasi pada komponen Konsumsi Rumah Tangga ditopang oleh komponen pengeluaran rumah tangga yang meningkat dipicu adanya konsumsi dan mobilitas pada momen HBKN Natal dan Tahun baru. Ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,79% (yoy) pada periode laporan, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 4,56% (yoy). Pertumbuhan. Selain itu, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tercatat tumbuh sebesar 4,30% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,49% (yoy), didorong oleh bertambahnya luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seiring berlanjutnya *replanting* kelapa sawit serta kelanjutan program cetak sawah. Selain itu, terdapat optimalisasi penyerapan belanja modal pemerintah termasuk realisasi proyek strategis pemerintah dan swasta. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2025 tumbuh sebesar 4,80% (yoy), meningkat dari 4,62% (yoy) pada 2024. Perkembangan harga di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 (Desember) mencatatkan inflasi sebesar 2,77% (yoy), atau sedikit meningkat dibandingkan inflasi triwulan III 2025 (September) sebesar 2,57% (yoy). Dorongan inflasi terutama pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu tetap terjaga dengan tingkat risiko kredit dalam batas aman. Intermediasi perbankan tercatat meningkat baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan. Pada sisi sistem pembayaran, ekosistem pembayaran digital di Provinsi Bengkulu semakin baik ditandai dengan semakin banyaknya jumlah *merchant* dan pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada triwulan laporan.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran membangun dari pengguna/ pembaca demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Bengkulu, Februari 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU

ttd.

Wahyu Yuwana Hidayat



Daftar Isi

Tim Penyusun	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Tabel Indikator	XIII
Daftar Istilah	89



Bab I	
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1 SISI PENGELUARAN	3
1.2 SISI LAPANGAN USAHA	10
BOKS 1	17
Prospek Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu	

Bab II	
1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI 2025	15
KEUANGAN PEMERINTAH	23
2.1 APBD GABUNGAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025	25
2.2 REALISASI BELANJA APBN PROVINSI BENGKULU	29
BOKS 2	33
Penurunan Tkdd Provinsi Bengkulu 2026: Penyesuaian Fiskal Dan Implikasi Kebijakan	

Bab III	
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	35
3.1 INFLASI TRIWULANAN	37
3.2 INFLASI TAHUNAN (YOY)	38
3.3 INFLASI BULANAN (MTM)	42
3.4 AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI (TPID)	45
BOKS 3	49
Prakiraan Inflasi 2026, Strategi Pengendalian Inflasi Daerah, Dan Optimalisasi Peran KDKMP Mendukung Ketahanan Pangan	

Bab IV	
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	51
4.1 GAMBARAN UMUM	53
4.2 KORPORASI DAN RUMAH TANGGA	54
4.3 PERKEMBANGAN BANK UMUM	56
4.4 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH	58
4.5 SEKTOR UMKM	59





Bab V

SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH

67

- 5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 69
- 5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI 70

BOKS 4

Dorong Digitalisasi Daerah Di Provinsi Bengkulu Melalui Capacity Building Dan Studi Banding TP2DD 63

Bab VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

75

- 6.1 KETENAGAKERJAAN 77
- 6.2 KEMISKINAN 79

Bab VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

81

- 7.1 PROSPEK MAKROEKONOMI 83
- 7.2 PERTUMBUHAN EKONOMI 2026 85
- 7.3 PROSPEK INFLASI 88



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)	3
Tabel 1.2	Andil Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)	3
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	10
Tabel 2.1	Realisasi APBD Pemerintah se-Provinsi Bengkulu (Rp Miliar)	25
Tabel 2.2	Realisasi Belanja APBD Pemerintah se-Provinsi Bengkulu (Rp Miliar)	27
Tabel 2.3	Realisasi Belanja APBN Provinsi Bengkulu sampai dengan Desember 2025 (Rp Miliar)	31
Tabel 3.1	Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok	37
Tabel 3.2	Komoditas Penyumbang Inflasi Triwulan IV 2025	38
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Bulanan	42
Tabel 5.1	Perkembangan Pembayaran Tunai	69
Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu	77
Tabel 6.2	Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama	77
Tabel 6.3	Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	77
Tabel 6.4	Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan	78
Tabel 6.5	Ketenagakerjaan Berdasarkan Jam Kerja	78
Tabel 6.6	Nilai Tukar Petani	79
Tabel 6.7	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2022-2025	79



Daftar Gambar

Gambar B1.1	Tanam Perdana Cetak Sawah Rakyat	21
Gambar B4.1	<i>Capacity Building</i> dan Studi Banding TP2DD Tahun 2025	63
Gambar B4.2	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan APU PPT dan PPPSPM bersama APGAKUM Tahun 2025	64
Gambar B4.3	Sinergi Bank Indonesia pada Jambore Daerah VII Kwarda Bengkulu 2025	65



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu (% yoy)	4	Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025	28
Grafik 1.2	Proporsi Penggunaan Penghasilan	4	Grafik 2.5	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025	29
Grafik 1.3	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	4	Grafik 2.6	Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2025	29
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Nasional, Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu (% yoy)	37
Grafik 1.5	Indeks Pembelian Barang Tahan Lama	5	Grafik 3.2	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (% yoy)	38
Grafik 1.6	Pola Historis Belanja Daerah	5	Grafik 3.3	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (% yoy)	39
Grafik 1.7	Kinerja Pendapatan Daerah	6	Grafik 3.4	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT (% yoy)	39
Grafik 1.8	Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6	Grafik 3.5	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT (%yoy)	39
Grafik 1.9	Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja	6	Grafik 3.6	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Kesehatan	40
Grafik 1.10	Realisasi Pengadaan Semen	7	Grafik 3.7	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	40
Grafik 1.11	Realisasi PMA	7	Grafik 3.8	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (% yoy)	40
Grafik 1.12	Realisasi PMDN	7	Grafik 3.9	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya (% yoy)	41
Grafik 1.13	Kondisi Investasi SKDU	8	Grafik 3.10	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	41
Grafik 1.14	Perkembangan Volume Ekspor Bengkulu	8	Grafik 3.11	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran (% yoy)	41
Grafik 1.16	Purchasing Managers Index Negara Mitra Dagang	9	Grafik 3.12	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	42
Grafik 1.17	Volume Ekspor Karet Bengkulu	9	Grafik 4.1	Perkembangan Kredit Korporasi	54
Grafik 1.18	Harga Karet Global	9	Grafik 4.2	Perkembangan NPL Korporasi	54
Grafik 1.19	Harga Kopi Global	10	Grafik 4.3	Kontribusi Pertumbuhan Konsumsi RT	55
Grafik 1.20	Nilai Tukar Petani	11	Grafik 4.4	Perkembangan DPK Rumah Tangga	55
Grafik 1.21	Perkembangan Kredit Pertanian	11	Grafik 4.5	Pangsa Jenis DPK Rumah Tangga	55
Grafik 1.22	Perkembangan Kredit Perdagangan	12	Grafik 4.6	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	55
Grafik 1.23	Perkembangan Kredit Transportasi	12	Grafik 4.7	Perkembangan NPL Rumah Tangga	56
Grafik 1.24	Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelabuhan	13	Grafik 4.8	Aset Bank Umum di Provinsi Bengkulu	56
Grafik 1.25	SBT Perkembangan Kegiatan Usaha SKDU	13	Grafik 4.9	Aset Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan	56
Grafik 1.26	Perkembangan Kredit Konstruksi	13	Grafik 4.10	Aset Bank Berdasarkan Sistem	56
Grafik 1.27	Kredit LU Industri Pengolahan	14			
Grafik 1.28	Harga CPO Global	14			
Grafik 1.29	Tren Harga Komoditas Batu Bara	15			
Grafik 1.30	Tren Harga Acuan Komoditas Batu Bara	15			
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025	26			
Grafik 2.2	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Spasial di Provinsi Bengkulu	27			
Grafik 2.3	Rasio Kemandirian Fiskal di Provinsi Bengkulu	28			



Daftar Grafik

Grafik 4.11	Perkembangan Total DPK Bank Umum	57	Grafik 5.10	Perkembangan Jumlah Lembar RTGS Bengkulu	71
Grafik 4.12	Pertumbuhan DPK Bank Umum	57	Grafik 5.11	Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu Kredit Bengkulu	72
Grafik 4.13	Penyaluran Kredit Bank Umum	57	Grafik 5.12	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit (Rp miliar) Bengkulu	72
Grafik 4.14	Pangsa Kredit Bank Umum Jenis Penggunaan	57	Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debet Bengkulu	72
Grafik 4.15	Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan	58	Grafik 5.14	Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu ATM/Debet	72
Grafik 4.16	NPL Bengkulu (Lokasi Proyek)	58	Grafik 5.15	Perkembangan Nominal Transaksi (Juta Rp) Kartu ATM/Debet	73
Grafik 4.17	LDR Bengkulu (Lokasi Proyek)	58	Grafik 5.16	Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Provinsi Bengkulu	73
Grafik 4.18	Distribusi Aset Bank Syariah	59	Grafik 5.17	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi	73
Grafik 4.19	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	59	Grafik 5.18	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi	73
Grafik 4.20	Komponen DPK Bank Syariah	59	Grafik 5.19	Pertumbuhan Pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2025	74
Grafik 4.21	NPF dan FDR Perbankan Syariah	59	Grafik 5.20	Pertumbuhan Merchant QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2025	74
Grafik 4.22	Pangsa Kredit UMKM	60	Grafik 5.21	Perkembangan Transaksi Valas Bengkulu (Miliar Rp)	74
Grafik 4.23	Nominal Kredit UMKM Jenis Penggunaan	60	Grafik 5.22	Jenis Mata Uang Pembelian Valas Triwulan IV 2025	74
Grafik 4.24	Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Lapangan Usaha	60	Grafik 5.23	Jenis Mata Uang Penjualan Valas Triwulan IV 2025	74
Grafik 4.25	NPL Kredit UMKM Skala Usaha	60	Grafik 6.1	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian	78
Grafik 4.26	NPL Kredit UMKM Jenis Penggunaan	61	Grafik 6.2	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu	80
Grafik 5.1	Perkembangan Transaksi Tunai di Bengkulu Periode Triwulan IV 2025	69	Grafik 6.3	Perkembangan Gini Ratio Bengkulu & Nasional	80
Grafik 5.2	Perkembangan Outflow dan Konsumsi RT	69			
Grafik 5.3	3 Aktivitas Penarikan Triwulan IV 2025	69			
Grafik 5.4	Aktivitas Penyetoran Triwulan IV 2025	70			
Grafik 5.5	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di Bengkulu	70			
Grafik 5.6	Perkembangan Jumlah Lembar Temuan Uang Palsu	70			
Grafik 5.7	Perkembangan Jumlah Nominal SKNBI Bengkulu	70			
Grafik 5.8	Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Bengkulu	71			
Grafik 5.9	Perkembangan Jumlah Nominal RTGS Bengkulu	71			



Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tumbuh solid sebesar 4,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,56% (yoy). Secara umum, pertumbuhan tersebut ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Kinerja tersebut sejalan dengan tetap terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun seiring optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta PMTB/investasi. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan barang konsumsi pada periode HBKN Natal dan Tahun baru, yang turut mendorong aktivitas perdagangan dan jasa. Kinerja investasi menunjukkan perbaikan yang ditopang oleh bertambahnya luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) pada komoditas perkebunan utama, khususnya kelapa sawit, berlanjutnya program replanting kelapa sawit, serta progres cetak sawah. Selain itu, investasi juga didukung oleh optimalisasi penyerapan belanja modal pemerintah pada akhir tahun dan berlanjutnya realisasi proyek strategis, baik pemerintah maupun swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh membaik bersumber dari percepatan realisasi belanja pemerintah di akhir tahun, termasuk pembukaan pemblokiran anggaran serta semakin optimalnya alokasi dana, terutama pada sektor pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari LU Pertanian, LU Perdagangan dan transportasi. Kinerja LU Pertanian didukung oleh program perluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yang mendorong peningkatan produksi komoditas perkebunan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini turut diperkuat oleh berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada komoditas kelapa sawit. Produksi jagung juga menunjukkan peningkatan seiring implementasi program SaDeSaHe (Satu Desa Satu Hektare) yang mendorong pemanfaatan lahan secara efisien melalui penanaman jagung secara serentak di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sementara, kinerja LU Industri Perdagangan didukung oleh meningkatnya permintaan barang konsumsi selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Pada LU Transportasi, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru, serta mulai pulihnya konektivitas logistik seiring penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.

KEUANGAN PEMERINTAH

Kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang cenderung terbatas dibanding periode tahun sebelumnya, baik dari segi pendapatan daerah, serapan belanja, maupun dari sisi belanja pemerintah pusat. Walau realisasi pada triwulan IV mulai membaik, serapan secara keseluruhan tahun 2025 cenderung menurun.

Realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2025 tercatat Rp10.487,93 miliar atau tercapai 77,17% dari pagu tahun 2025. Kinerja pendapatan daerah mengalami tumbuh kontraksi sebesar 12,17% (yoy) dipengaruhi oleh dengan terbatasnya transfer pusat dan menurunnya PAD, termasuk dari sisi pajak dan retribusi. Hal ini mengingat Provinsi Bengkulu masih ketergantungan terhadap TKDD masih cukup dominan sehingga peningkatan PAD masih perlu didorong sebagai fokus utama.

Realisasi belanja daerah pada tahun 2025 mencapai Rp9.450,53 miliar atau sekitar 85,52% dari pagu tahun 2025. Kinerja ini mengalami kontraksi sebesar 21,49% (yoy), dipengaruhi oleh terbatasnya realisasi seluruh komponen belanja mulai dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer yang mengalami penurunan. Senada hal tersebut, kinerja belanja APBN di Provinsi Bengkulu juga terkontraksi sebesar 8,69% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp15.107,1 miliar, atau 96,83% dari pagu.

Kinerja belanja APBN di Provinsi Bengkulu juga terkontraksi sebesar 8,69% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp15.107,1 miliar, atau 96,83% dari pagu. Hal ini mencerminkan terbatasnya intensitas program pemerintah pusat.

Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Indeks Harga Konsumen Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy). Besaran ini meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,57% (yoy).

Inflasi lebih tinggi pada triwulan IV 2025 didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan *base year effect*, dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya harga cabai merah sangat rendah.

Pada triwulan IV 2025, Indeks Harga Konsumen Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,57% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan *base year effect*, komoditas cabai merah dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya harga cabai merah sangat rendah.

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga terutama sisi rumah tangga dan perbankan. Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif dan kualitas kredit yang masih sehat. Peningkatan kredit ditopang pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi yang menguat, sementara kredit konsumsi tumbuh sedikit melambat. Adapun rasio kredit bermasalah/ *Non-Performing Loan/Funding* sedikit meningkat dalam batas aman, sementara tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami penurunan.

Kinerja perbankan syariah cenderung menurun disertai dengan penurunan pangsa perbankan syariah. Hal tersebut menggambarkan penggunaan produk keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang mengalami perbaikan.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 cenderung mengalami net outflow. Transaksi nontunai SKNBI mengalami penurunan secara tahunan, sedangkan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perluasan ekosistem digital di Provinsi Bengkulu juga terakselarasi yang ditunjukkan oleh peningkatan pengguna dan volume QRIS maupun perluasan akusisi *merchant*.

Transaksi pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan IV 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, baik dari sisi pembelian maupun penjualan valas. Lebih lanjut, valas yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-urut adalah Dolar Amerika Serikat (USD), Malaysian Ringgit (MYR), dan Singapore Dollar (SGD) dari total mata uang yang diperjualbelikan.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu secara umum terjaga. Hal tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tetap berada pada level rendah, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menguat, serta penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.



Ringkasan Eksekutif

TPT Provinsi Bengkulu relatif membaik dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, TPT pada November 2025 sebesar 3,37%. Capaian tersebut melandai dibandingkan periode Agustus 2025 sebesar 3,41%. Namun demikian capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 3,11%. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya pekerja penuh di tengah melambatnya jumlah persentase pekerja penuh waktu. Namun demikian, menurunnya porsi pekerja penuh waktu yang disertai pergeseran komposisi ke tenaga kerja berpendidikan lebih rendah, perlu menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Nilai Tukar Petani (NTP) juga melanjutkan tren peningkatan dari periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 208,32, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 201,59. Selanjutnya, pada Desember 2025 NTP Provinsi Bengkulu meningkat ke level 205,92. Capaian ini mengindikasikan daya beli petani yang relatif terjaga.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode September 2025 berada pada angka 11,88% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 12,25%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diperkirakan mampu tumbuh positif pada level yang menyamai tahun 2025, yaitu rentang 4,46 - 5,26% (yoy). Pada triwulan I 2026, ekonomi Provinsi Bengkulu diperkirakan melandai dibandingkan sebelumnya dipicu oleh kebijakan realokasi anggaran seiring pemotongan Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat dan potensi berkurangnya MICE.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan terakselerasi didorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), THR, dan kenaikan tunjangan pada ASN, dan berlanjutnya bantuan sosial. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan terdeselerasi, dipengaruhi oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pengurangan anggaran fiskal menekan belanja operasi dan barang/ jasa pemerintah.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), akselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada 2026 diperkirakan ditopang kinerja LU pertanian dan LU perdagangan yang lebih baik. Kinerja LU pertanian didorong oleh hasil panen yang meningkat dan LU perdagangan seiring terjaganya daya beli. Di samping itu, kinerja LU transportasi dan pergudangan turut diperkirakan meningkat sejalan selesainya alur Pelabuhan Pulau Baai tahap II dan akan terus berlanjut tahap III dengan target kedalaman 12 meter.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan melandai dibandingkan tahun 2025, tetap dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Penurunan pada inflasi pangan diperkirakan sejalan dengan program ekstensifikasi lahan pangan terutama jagung pada program Sadesahe 2026 yang berlanjut, Keberlanjutan SPHP Beras sepanjang tahun 2026, ekstensifikasi lahan melalui cetak sawah, dan intensifikasi produksi hortikultura. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sesuai kerangka 4K pengendalian inflasi diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.



Tabel Indikator

I. PDRB ADHK											
INDIKATOR	2023	2024					2025				
	FY	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB SEKTORAL	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,06	(0,40)	6,57	1,64	2,42	2,57	5,24	3,82	4,01	3,43	4,11
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7,85	16,57	(14,05)	4,49	1,98	2,22	-0,85	-1,68	-1,44	-11,26	-4,16
INDUSTRI PENGOLAHAN	1,83	4,76	1,83	-2,38	2,17	1,49	6,61	9,84	9,94	11,06	9,41
PENGADAAN LISTRIK, GAS	3,96	7,94	4,13	1,23	3,13	4,04	3,97	1,71	3,93	4,45	3,51
PENGADAAN AIR	4,57	1,71	6,36	8,02	8,24	6,09	-0,22	-0,15	-1,53	2,01	0,03
KONSTRUKSI	5,04	3,74	5,33	7,97	5,37	5,63	-1,43	5,10	3,90	4,74	3,15
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3,05	1,89	3,59	3,09	4,54	3,32	3,82	3,89	2,46	2,88	3,25
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7,22	1,26	3,66	7,52	3,70	3,97	3,79	3,67	3,89	6,43	4,47
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,88	9,06	9,21	9,66	9,63	9,39	9,00	12,52	10,59	14,05	11,6
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,61	9,02	8,86	9,48	9,55	9,23	8,92	9,43	8,33	8,07	8,69
JASA KEUANGAN	(5,09)	5,20	4,74	9,57	2,23	5,46	4,00	3,28	6,89	24,44	9,45
REAL ESTATE	5,26	2,73	3,59	5,35	5,35	4,27	6,47	6,57	4,18	4,41	5,38
JASA PERUSAHAAN	7,84	6,18	7,65	9,33	9,6	8,21	4,41	8,84	7,62	9,89	7,74
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6,16	18,14	5,85	6,21	4,66	8,41	2,91	1,98	2,18	-0,33	1,69
JASA PENDIDIKAN	4,88	8,86	3,22	5,81	8,09	6,42	8,76	8,05	7,29	5,14	7,24
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,61	9,03	8,95	9,40	8,90	9,07	9,53	7,20	3,65	9,23	7,36
JASA LAINNYA	9,93	9,07	9,01	9,61	9,74	9,37	9,13	12,97	8,76	11,07	10,52
PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB PENGGUNAAN	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	5,15	5,52	5,16	5,06	4,79	5,13	5,59	5,65	5,19	5,26	5,42
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT	10,22	18,43	12,03	10,64	7,75	12,05	3,26	11,35	5,61	7,35	6,86
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	6,23	18,78	4,41	6,13	5,47	8,05	-0,68	-0,14	0,26	1,35	0,28
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	3,17	0,89	1,86	4,61	3,93	2,87	1,39	4,19	3,94	4,30	3,49
PERUBAHAN INVENTORI	(232,7)	(228,53)	(230,06)	(750,09)	-103,7	-117,06	-96,27	1,49	-93,89	416,32	708,70
EKSPOR BARANG DAN JASA	2,94	3,96	(8,65)	1,39	-0,16	-1,04	-0,25	-1,65	-1,72	-2,43	-1,53
IMPOR BARANG DAN JASA	2,91	1,07	3,39	3,16	4,78	3,16	1,86	0,29	0,93	0,26	0,80
EKSPOR IMPOR NON MIGAS											
NILAI EKSPOR NONMIGAS (USD JUTA)	246,33	58,76	34,85	40,63	60,18	194,42	41,30	11,35	23,64	27,18	25,86
VOLUME EKSPOR NONMIGAS (JUTA KG)	3.024,37	834,97	479,19	607,41	926,83	2.848,41	652,95	158,95	405,	481,62	424,64
NILAI IMPOR NONMIGAS (USD JUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLUME IMPOR NONMIGAS (JUTA KG)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00



Tabel Indikator

II. INFLASI TAHUNAN						
KELOMPOK	INFLASI TAHUNAN TW IV 2025 (%)			ANDIL INFLASI TAHUNAN TW IV 2025 (%)		
	OKT	NOV	DES	OKT	NOV	DES
UMUM	2,85	2,68	2,77	2,85	2,68	2,77
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	7,64	6,94	7,05	2,42	2,22	2,27
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1,23	1,03	0,70	0,07	0,06	0,04
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,55	0,64	0,64	0,08	0,10	0,10
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	-0,29	~0	-0,07	-0,01	~0	~0
KESEHATAN	1,22	1,36	1,04	0,03	0,03	0,02
TRANSPORTASI	1,18	1,42	1,74	0,16	0,19	0,23
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0,06	0,07	0,07	~0	~0	~0
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	-0,69	-1,52	-1,60	-0,01	0,03	-0,03
PENDIDIKAN	-9,55	-9,55	-9,55	-0,50	-0,50	-0,50
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	1,47	1,26	1,26	0,14	0,12	0,12
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	8,52	8,95	9,56	0,47	0,49	0,52

III. PERBANKAN											
LOKASI PROYEK (RP MILIAR)	2023			2024				2025			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
DPK GOLONGAN	17.761	18.781	18.205	17.086	17.761	18.781	18.205	18.737	19.132	19.730	19.137
PERSEORANGAN	13.624	14.395	14.903	12.849	13.624	14.395	14.903	14.673	14.803	14.731	15.223
PEMERINTAH	1.901	1.858	666	1.932	1.901	1.858	666	1.403	1.686	2.105	823
KORPORASI	2.233	2.526	2.635	2.304	2.233	2.526	2.635	2.661	2.643	2.892	3.092
DPK JENIS	17.761	18.781	18.205	17.086	17.761	18.781	18.205	18.737	19.132	19.730	19.137
GIRO	3.130	3.174	2.326	3.241	3.130	3.174	2.326	2.816	2.842	3.249	2.285
TABUNGAN	11.235	12.035	12.592	10.455	11.235	12.035	12.592	12.500	12.668	12.806	13.249
DEPOSITO	3.395	3.571	3.287	3.390	3.395	3.571	3.287	3.421	3.622	3.674	3.602
DPK PERSEORANGAN	13.626	14.396	14.903	12.848	13.626	14.396	14.903	14.673	14.803	14.731	15.223
GIRO	310	305	249	308	310	305	249	202	198	163	157
TABUNGAN	10.701	11.465	12.060	9.961	10.701	11.465	12.060	11.797	11.948	11.949	12.453
DEPOSITO	2.614	2.626	2.594	2.579	2.614	2.626	2.594	2.674	2.657	2.621	2.612
DPK PEMERINTAH	1.901	1.858	666	1.486	1.901	1.858	666	1.403	1.686	2.105	822
GIRO	1.557	1.450	529	1.365	1.557	1.450	529	1.204	1.383	1.718	645
TABUNGAN	88	55	18	64	88	55	18	58	83	61	22
DEPOSITO	256	352	119	57	256	352	119	142	220	327	155
DPK KORPORASI	2.333	2.526	2.635	2.304	2.333	2.526	2.635	2.661	2.643	2.893	3.092
GIRO	1.262	1.419	1.548	1.317	1.262	1.419	1.548	1.411	1.261	1.369	1.483
TABUNGAN	446	515	513	428	446	515	513	645	637	797	774
DEPOSITO	525	592	574	559	525	592	574	605	745	727	835



Tabel Indikator

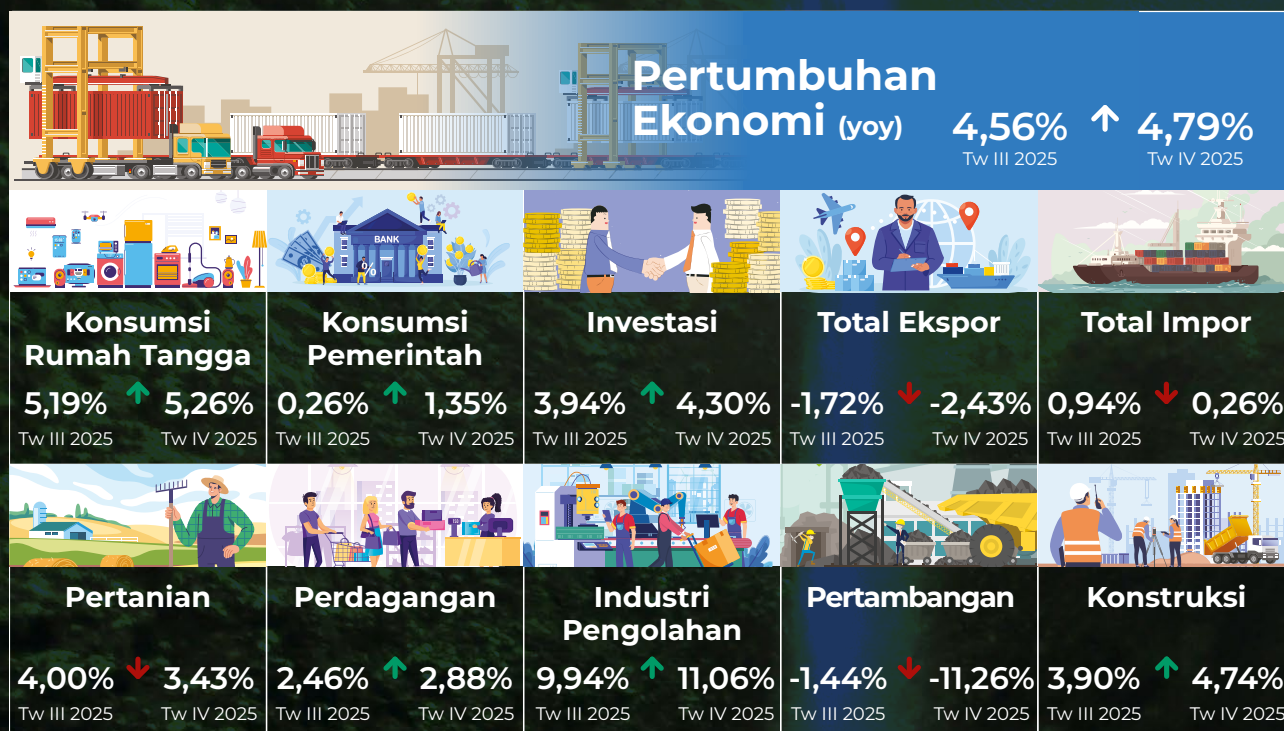
III. PERBANKAN											
LOKASI PROYEK (RP MILIAR)	2023			2024				2025			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KREDIT KORPORASI	6.422	7.122	6.954	6.600	6.422	7.122	6.954	7.135	7.169	7.480	7.563
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	1.536	1.618	1.511	1.534	1.536	1.618	1.511	1.668	1.753	1.822	1.756
PERIKANAN	29	31	28,64	21	21	21	19	19	20	17	17
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	127	136	398	596	413	532	616	584	364	548	513
INDUSTRI PENGOLAHAN	426	380	689	578	563	600	735	835	939	958	1.197
LISTRIK, GAS DAN AIR	1.724	1.698	1.689	1.509	1.524	1.394	1.452	1.408	1.533	1.399	1.381
KONSTRUKSI	336	351	322	128	180	235	325	207	247	274	232
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	838	830	898	886	895	905	949	1.067	1.082	1.098	1.120
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	275	339	301	303	291	334	115	106	105	102	132
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	64	130	104	95	136	363	220	223	198	203	185
PERANTARA KEUANGAN	10	233	35	61	45	41	45	40	38	35	33
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	100	112	126	133	113	133	145	142	155	144	168
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JASA PENDIDIKAN	48	47	45	52	49	57	57	72	76	81	66
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	36	35	31	48	66	70	97	76	63	77	80
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	54	37	51	53	44	47	61	63	60	64	37
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA	405	423	437	601	538	766	606	624	535	642	647
KREDIT RUMAH TANGGA	14.533	14.642	14.872	15.144	15.400	16.012	16.383	16.712	16.921	17.328	17.654
KPR/KPA	2.769	2.831	2.874	2.957	2.987	2.965	2.945	3.032	3.052	3.114	3.135
KKB	687	687	703	717	708	729	750	772	791	773	721
MULTIGUNA	6.117	6.185	6.346	6.448	6.567	6.775	7.033	7.122	7.268	7.375	7.609
LAINNYA	4.960	4.938	4.947	5.022	5.137	5.543	5.655	5.787	5.810	6.066	6.189
KREDIT UMKM	14.197	14.329	14.748	14.852	14.748	14.949	14.745	14.877	15.109	15.038	14.888
MIKRO	9.111	9.010	9.273	9.606	9.570	9.480	9.345	9.260	9.109	8.991	9.006
KECIL	4.025	4.155	4.276	4.050	4.076	4.305	4.298	4.701	4.934	5.091	5.054
MENENGAH	1.061	1.164	1.199	1.196	1.100	1.163	1.102	916	1.066	956	828
NPL (%)											
RUMAH TANGGA	1,35	1,42	1,37	1,30	2,92	1,14	1,11	1,18	1,33	1,43	1,35
KORPORASI	1,77	1,60	2,04	1,26	1,58	3,96	0,98	0,91	0,97	0,74	0,63
UMKM	2,73	2,67	2,88	2,67	2,73	3,82	2,10	2,17	2,13	2,10	1,98



BAB 1



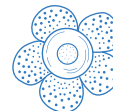
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tumbuh solid sebesar 4,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,56% (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,81% (yoy), maupun nasional 5,39% (yoy). Pertumbuhan didorong oleh tetap kuatnya konsumsi Rumah Tangga dan investasi yang tetap solid. Sementara pada sisi kinerja Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan perekonomian Provinsi Bengkulu ditopang oleh kinerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan.

- Dari sisi pengeluaran, pada triwulan IV 2025 mayoritas komponen pengeluaran utamanya konsumsi rumah tangga, dan PMTB yang tumbuh positif kecuali komponen ekspor luar negeri yang menunjukkan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditopang oleh meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga (RT) seiring terjaganya daya beli masyarakat sejalan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp2.507.079 pada tahun 2024 menjadi Rp2.670.039 pada tahun 2025. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja terutama didorong oleh LU Pertanian, LU Perdagangan dan LU Transportasi.
- Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan IV 2025 akselerasi pada Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian, Industri Pengolahan serta Transportasi menopang pertumbuhan positif di tengah kinerja LU Pertambangan yang cenderung melambat pada periode pelaporan.
- Secara keseluruhan, ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2025 tercatat sebesar 4,80% (yoy) dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,62% (yoy). Pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga seiring perbaikan kinerja LU pertanian terutama meningkatnya produksi dan harga kelapa sawit serta terjaganya harga kopi yang menopang daya beli. Selain itu, kinerja investasi meningkat didorong oleh peningkatan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) pada komoditas kelapa sawit, karet, dan kopi. Selain itu, tumbuhnya kegiatan konstruksi jalan, jembatan dan sekolah mendorong investasi.




Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2023	2024					2025				
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5,15	5,52	5,16	5,06	4,79	5,13	5,59	5,65	5,19	5,26	5,42
KONSUMSI LNPRT	10,22	18,43	12,03	10,64	7,75	12,05	3,26	11,35	5,61	7,35	6,86
KONSUMSI PEMERINTAH	6,23	18,78	4,41	6,13	5,47	8,05	-0,68	-0,14	0,26	1,35	0,28
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	3,17	0,89	1,86	4,61	3,93	2,87	1,39	4,19	3,94	4,30	3,49
TOTAL EKSPOR	-232,7	-228,53	-230,06	-750,09	-103,7	-117,06	-96,27	1,49	-93,89	416,32	708,70
TOTAL IMPOR	2,94	3,96	-8,65	1,39	-0,16	-1,04	-0,25	-1,65	-1,72	-2,43	-1,53
TOTAL IMPOR	2,91	1,07	3,39	3,16	4,78	3,16	1,86	0,29	0,94	0,26	0,80

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2 Andil Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2023	2024					2025				
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80
KONSUMSI RUMAH TANGGA	3,31	3,58	3,36	3,25	3,09	3,32	3,68	3,72	3,37	3,46	3,57
KONSUMSI LNPRT	0,26	0,50	0,31	0,29	0,22	0,33	0,10	0,34	0,17	0,22	0,21
KONSUMSI PEMERINTAH	1,14	2,96	0,83	1,06	1,21	1,50	-0,12	-0,02	0,04	0,23	0,05
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	1,38	0,39	0,76	2,02	1,72	1,23	0,56	1,70	1,72	1,74	1,41
PERUBAHAN INVENTORI	0	0	0	0	1,56	0,61	0,06	0,00	0,00	-0,42	-0,71
TOTAL EKSPOR	1,04	1,34	-3,14	0,48	-0,06	-0,36	-0,08	-0,53	-0,54	-0,78	-0,49
TOTAL IMPOR	1,87	0,66	2,09	1,99	3,19	2,01	1,08	0,17	0,56	0,15	0,47

Sumber: BPS, diolah

1.1 SISI PENGELUARAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tumbuh positif ditopang oleh komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru. Secara Keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,26% (yoy) meningkat dibandingkan 5,19% (yoy) pada triwulan III 2025. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan barang konsumsi pada periode HBKN Natal dan Tahun baru. Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,30% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,94% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh bertambahnya luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) pada komoditas perkebunan utama, khususnya kelapa sawit, akibat berlanjutnya replanting kelapa sawit serta progres cetak sawah. Selain itu, optimalisasi

penyerapan belanja modal pemerintah maupun swasta dan berlanjutnya realisasi proyek strategis turut mendukung akselerasi ekonomi pada akhir tahun.

Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh membaik sebesar 1,35% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 0,26% (yoy), yang bersumber dari percepatan realisasi belanja pemerintah di akhir tahun, termasuk realisasi pembukaan pemblokiran anggaran serta semakin optimalnya alokasi dana terutama pada sektor pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat.

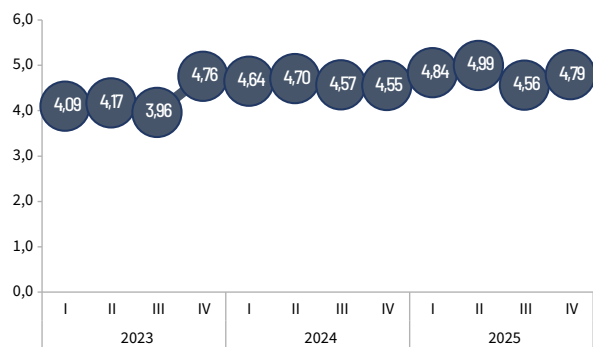
Kinerja ekspor tercatat berkontraksi lebih dalam sebesar 2,43% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,72% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya volume ekspor komoditas utama, khususnya batubara (HS27) dan karet (HS40), serta menurunnya aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai.

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan IV 2025 sebesar 4,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,56% (yoy). (Grafik 1.1). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada





seluruh komponen selain ekspor yang masih berkontraksi. Secara proporsi, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen utama penyumbang pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 3,46% (yoy), disusul oleh PMTB dengan andil sebesar 1,74% (yoy) dan komponen konsumsi pemerintah dengan andil sebesar 0,23% (yoy).



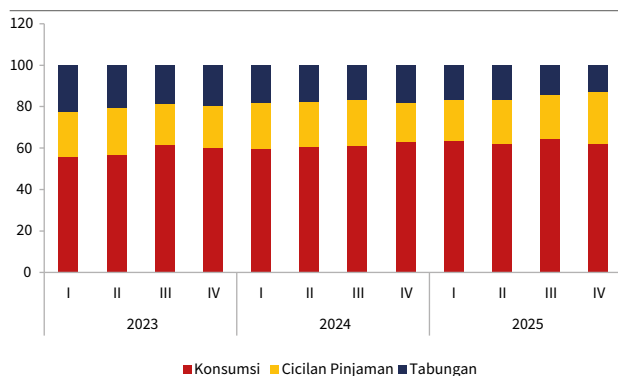
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu (% yoy)

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 5,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy) (Tabel 1.1). Dengan tingkat pertumbuhan ini, konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, turut didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada HBKN Natal dan Tahun baru.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei terkait dengan indeks konsumsi masyarakat, proporsi penggunaan penghasilan untuk aktivitas konsumsi, cicilan pinjaman dan tabungan cenderung stabil pada level 62,03%; 24,93%; dan 13,04% (Grafik 1.2).



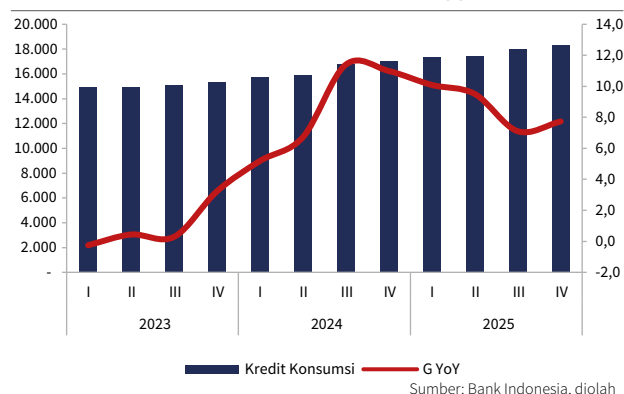
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2 Proporsi Penggunaan Penghasilan

Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan tabungan mencerminkan kecenderungan masyarakat memanfaatkan simpanan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, peningkatan cicilan menunjukkan adanya penyesuaian kemampuan bayar maupun pergeseran preferensi rumah tangga terhadap pengeluaran yang bersifat jangka panjang.

Pada triwulan IV 2025, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit meningkat sebesar Rp 3.000 per kilogram. Kondisi tersebut, disertai akselerasi kinerja LU pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, turut mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Tim Penetapan harga Tanda Buah Segar (TBS) menetapkan harga TBS sebesar Rp3.347 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp2.980 per kilogram. Kebijakan penetapan harga yang lebih tinggi ini memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan produksi dan pengeluaran rumah tangga, sekaligus membantu mengurangi volatilitas pendapatan. Di sisi lain, stabilitas harga TBS juga didukung oleh permintaan pasar yang mulai membaik, sejalan dengan peningkatan harga CPO global yang tercatat sekitar level \$1.004,27 per metrik ton.

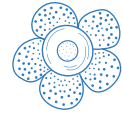
Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut didorong oleh meningkatnya komponen cicilan, yang mengindikasikan keyakinan rumah tangga dalam pengelolaan keuangan sekaligus meningkatnya permintaan terhadap barang konsumsi tahan lama. Kondisi ini mencerminkan peran signifikan sektor perbankan dalam menopang likuiditas dan kapasitas belanja masyarakat. Pertumbuhan kredit yang tetap positif menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan masih terjaga, baik untuk konsumsi jangka pendek maupun kebutuhan investasi rumah tangga. (Grafik 1.3).



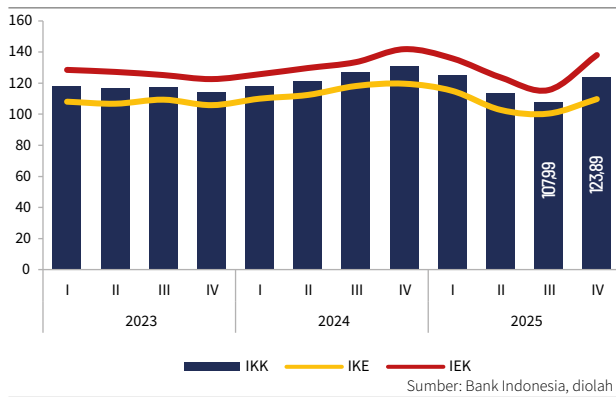
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



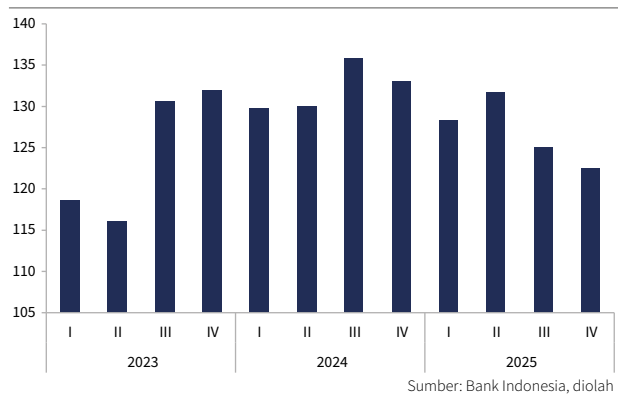


Lebih lanjut, persepsi konsumsi masyarakat pada triwulan IV 2025 tercatat meningkat. Kondisi ini tecermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 128,89, Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) sebesar 109,72; dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 138,06 atau berada di atas batas persepsi positif (100). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penguatan keyakinan konsumen yang berimplikasi pada peningkatan preferensi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, antara lain tercermin pada akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga (Grafik 1.4).



Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen

Lebih lanjut, berdasarkan perkembangan indeks konsumsi barang tahan lama menunjukkan kecenderungan melandai dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian konsumsi rumah tangga terhadap barang bernilai tinggi, seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kewajiban pembayaran cicilan rumah tangga, khususnya pada kredit konsumsi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, sehingga sebagian pendapatan masyarakat dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Akibatnya, ruang bagi rumah tangga untuk melakukan pembelian barang tahan lama baru menjadi relatif lebih terbatas pada periode pelaporan (Grafik 1.5).

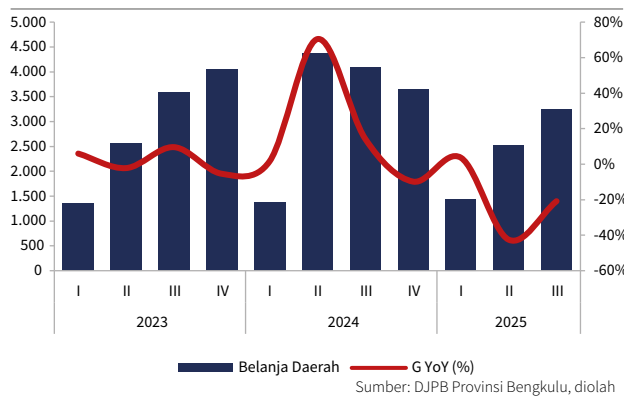


Grafik 1.5 Indeks Pembelian Barang Tahan Lama

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah tercatat membaik pada triwulan IV 2025. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah mengalami akselerasi sebesar 1,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 0,26% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi belanja pemerintah yang meningkat pada akhir tahun, sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran semester kedua, yang turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui penguatan belanja pemerintah.

Berdasarkan realisasi APBD konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/kota pada triwulan IV 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 31,64% atau Rp9.450,53 M dari target, tumbuh positif dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. (Grafik 1.6). Total belanja daerah hingga 31 Desember 2025 tercatat didominasi oleh belanja operasional.

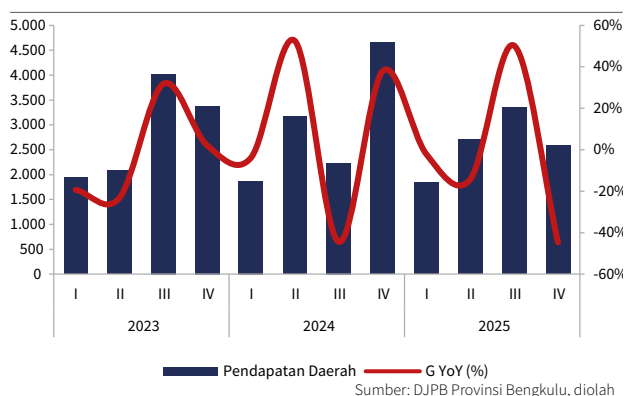


Grafik 1.6 Pola Historis Belanja Daerah



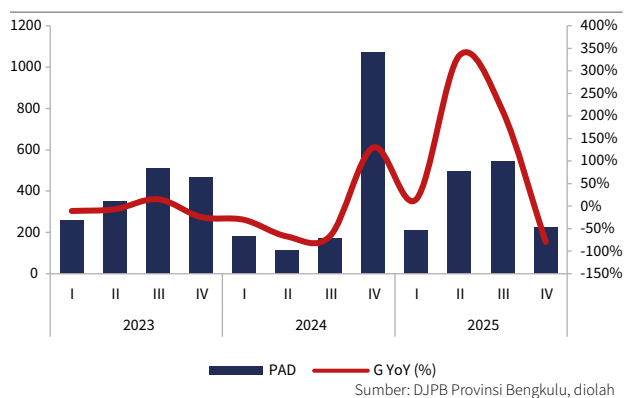


Sementara itu, pendapatan daerah berdasarkan APBD konsolidasi pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi yang signifikan sebesar 44,68%, menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 50,26%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai sekitar Rp 10,49 miliar dari target APBD yang telah ditetapkan.



Grafik 1.7 Kinerja Pendapatan Daerah

Berdasarkan komponennya, realisasi pendapatan daerah dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1.642 miliar atau 74,37% dari target. Pendapatan transfer turut menjadi kontributor utama pendapatan daerah mencapai Rp8.878,24 miliar atau 77,83% dari pagu.



Grafik 1.8 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

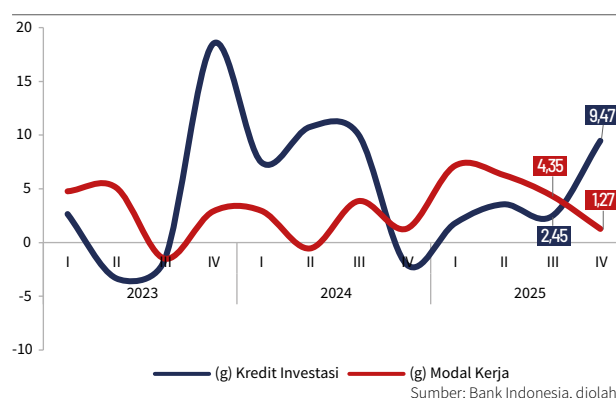
Kinerja APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan IV 2025 menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp10.487,93 miliar, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp9.450,53 miliar. Akibatnya, posisi fiskal mengalami surplus anggaran sebesar Rp1.037,4 miliar per 31 Desember 2025.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan kegiatan investasi pada triwulan IV 2025 tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

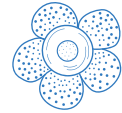
Pada periode laporan, PMTB tumbuh sebesar 4,30% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 3,94% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi proyek strategis pemerintah maupun swasta, sejalan dengan meningkatnya pembelian kendaraan baru seperti *truck*, *pick-up*, dan *light truck*. Di sisi lain, pertumbuhan juga didukung oleh berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta adanya peluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) komoditas kelapa sawit.

Dari sisi pembiayaan, kredit investasi pada triwulan IV 2025 tumbuh dengan akselerasi sebesar 9,47% (yoy). Sementara, kredit modal kerja tumbuh melambat menjadi 1,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,35% (yoy) (Grafik 1.9). Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi pelaku usaha menuju ekspansi jangka menengah-panjang seiring membaiknya ekspektasi prospek usaha. Di sisi lain, melambatnya kredit modal kerja, mencerminkan permintaan yang belum sepenuhnya kuat serta kehati-hatian pelaku usaha dalam pengelolaan produksi dan persediaan. Namun, perkembangan tersebut tetap menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi masih berlangsung, tetapi belum merata di seluruh sektor usaha.

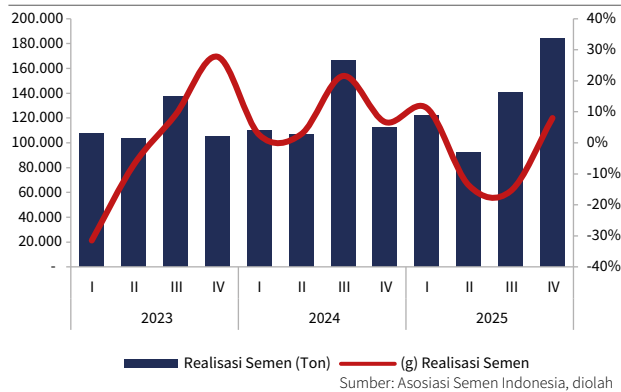


Grafik 1.9 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja



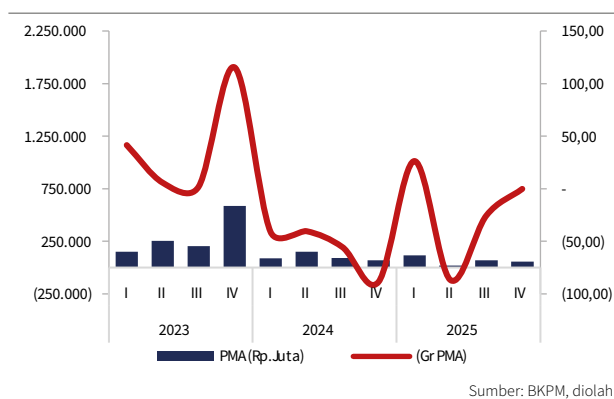


Indikator realisasi pengadaan semen pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 8% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (*Grafik 1.10*). Peningkatan permintaan semen tersebut mencerminkan menguatnya realisasi investasi fisik di daerah, sejalan dengan tren akselerasi kredit investasi pada periode yang sama.



Grafik 1.10 Realisasi Pengadaan Semen

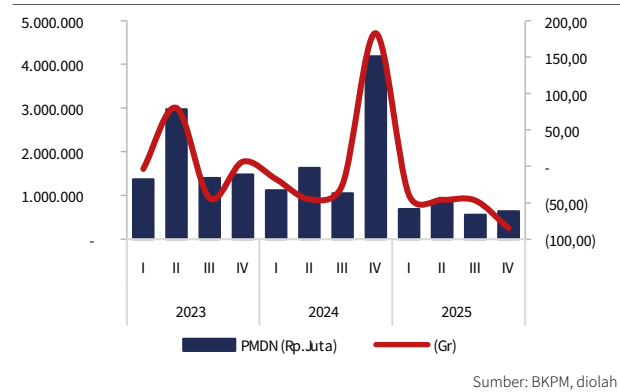
Berdasarkan data BKPM RI, Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 masih mengalami kontraksi sebesar 0,16% (yoy) . (*Grafik 1.11*) dengan nilai mencapai USD3.590 ribu. Kinerja PMA pada triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh investasi pada sektor pertambangan, tanaman pangan, dan industri makanan yang masih menjadi salah satu sektor utama yang menarik minat investor asing di daerah.



Grafik 1.11 Realisasi PMA

Berdasarkan data BKPM RI, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp636,42 miliar sedikit meningkat dibandingkan Rp557,28 miliar pada triwulan III 2025. PMDN tersebut

mengalami kontraksi lebih dalam jika dibandingkan periode yang sama sebelumnya yaitu -84,79% (yoy) dibandingkan -46,70% (yoy) (*Grafik 1.12*). Adapun secara keseluruhan tahun PMDN tercatat Rp2,76 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp7,98 triliun pada tahun 2024 . Penurunan terutama pada sektor pertambangan, sektor transportasi, dan sektor perumahan.

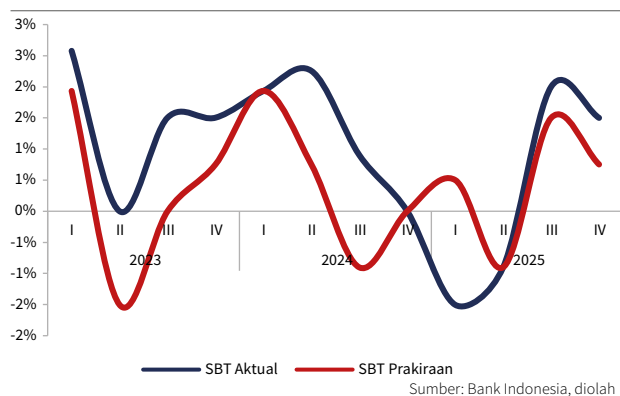


Grafik 1.12 Realisasi PMDN

di sektor perkebunan, khususnya di Kabupaten Seluma, menunjukkan hasil yang signifikan dengan tercatatnya 131 proyek yang berfokus pada pengembangan sektor tersebut. Meskipun demikian, secara keseluruhan, realisasi PMDN di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan, namun masih mengalami kontraksi sebesar 43,44% (yoy), yang meskipun lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 46,94% (yoy).

Sementara, Hasil Survei Kegiatan Dana Usaha (SKDU) mengindikasikan perbaikan kondisi investasi di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025. Khususnya pada LU konstruksi. Perbaikan tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang mencapai 1,50%. Meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,00%, kinerja investasi turut didukung oleh perkembangan positif pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, yang mencatat SBT sebesar 1,76%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut, mencerminkan proses perbaikan aktivitas usaha, baik dari sisi penjualan maupun perputaran barang, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap sentimen positif investasi.





Grafik 1.13

Kondisi Investasi SKDU

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kegiatan Ekspor-Impor

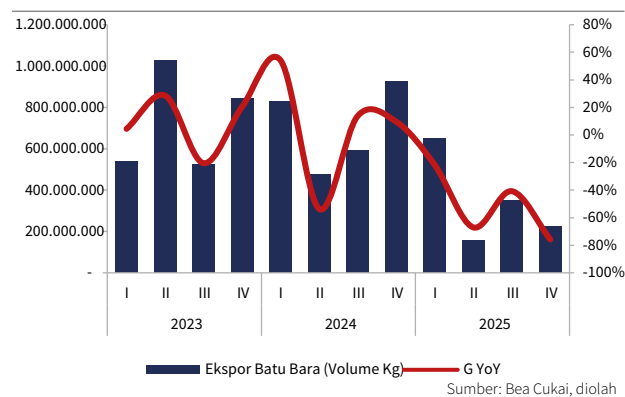
Kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja komponen ekspor barang dan jasa Bengkulu pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang lebih dalam, yakni sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 1,72% (yoy).

Pelembahan ini mengindikasikan berkurangnya permintaan eksternal terhadap komoditas unggulan Bengkulu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor komoditas batu bara dan karet. Selain itu, faktor domestik seperti kendala logistik dengan menurunnya aktivitas muat barang di Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan alur pelabuhan dan cuaca turut membatasi kapasitas produksi dan distribusi barang ekspor. Di sisi lain, tumbuhnya ekspor antar daerah LU pertanian dan industri pengolahan menahan kontraksi lebih dalam.

Di sisi lain, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, penurunan kinerja ekspor juga dipengaruhi oleh tidak tercatatnya ekspor CPO asal Bengkulu. Hal ini sejalan dengan mekanisme pencatatan ekspor yang didasarkan pada lokasi bersandarnya kapal. Sementara, pada periode pelaporan, aktivitas ekspor masih dilakukan melalui berbagai moda transportasi, termasuk jalur darat serta sejumlah pelabuhan di luar lokasi pencatatan utama, sehingga belum seluruhnya tercermin dalam statistik ekspor Bengkulu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, volume ekspor Luar Negeri Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 terkontraksi lebih dalam sebesar 75,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan komoditas terbesar yaitu karet dan batu bara (Grafik 1.14).



Grafik 1.14

Perkembangan Volume Ekspor Bengkulu

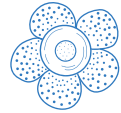
Sumber: Bea Cukai, diolah

Berdasarkan volumenya, ekspor komoditas batubara pada triwulan IV 2025 masih mengalami kontraksi sebesar 16,0% (yoy) meskipun tidak sedalam periode sebelumnya yang kontraksi sebesar 19,0% (yoy). Kondisi ini utamanya dipicu oleh cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi sehingga perusahaan penambangan kesulitan dalam berproduksi ditambah dengan demand dan harga yang masih rendah.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja ekspor batubara sebagai salah satu kontributor utama devisa daerah, tetapi juga menimbulkan efek terhadap rantai pasok, melemahnya nilai ekspor daerah, berkurangnya penerimaan daerah, serta berdampak pada penurunan permintaan kredit pada sektor-sektor terkait.

Sementara itu, dari sisi global, prospek perdagangan komoditas energi, termasuk batubara, pada triwulan IV 2025 menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan konsumen batubara terbesar dunia. Penurunan permintaan global juga dipengaruhi oleh pergeseran kebijakan energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan produksi batubara domestik di beberapa negara importir, yang mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan dari luar negeri.

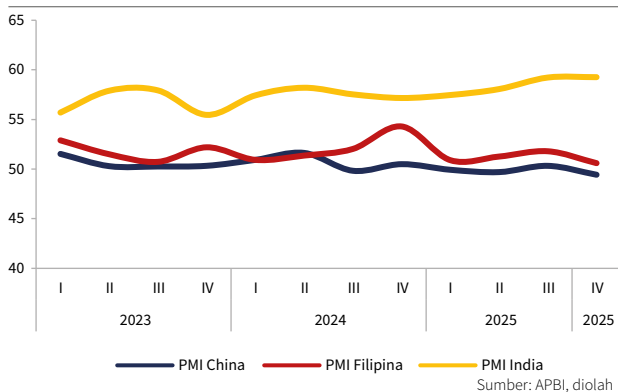




Selain itu, volatilitas harga batubara di pasar internasional akibat fluktuasi harga minyak mentah, dinamika geopolitik, dan perubahan kebijakan perdagangan turut memengaruhi daya saing ekspor batubara Bengkulu. Selain itu, proses pengerukan pelabuhan pulau baai diharapkan dapat menahan kontraksi yang lebih dalam

Harga batu bara global pada triwulan IV tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan rata-rata mencapai USD 104,19/ metrik ton.

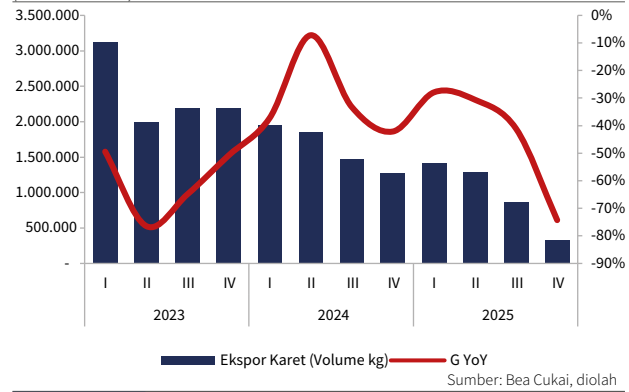
Ketidakpastian global turut memberikan tekanan terhadap arus investasi dan kinerja perdagangan internasional. Pada triwulan IV 2025, PMI India tercatat sebesar 59,27, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 59,23. Sementara, PMI Filipina menurun dari 51,80 menjadi 50,60; dan Jepang kembali melambat dari 49,00 menjadi 48,90 (Grafik 1.16)



Grafik 1.16 Purchasing Managers Index Negara Mitra Dagang

Perlambatan PMI tersebut mengindikasikan belum pulihnya perbaikan permintaan agregat global, khususnya dari negara-negara mitra dagang utama Bengkulu, sehingga berpotensi menahan kinerja ekspor pada triwulan selanjutnya. Namun, momentum ini tertahan sejalan dengan perbaikan kondisi logistik domestik, terutama dengan mulai terselesaikannya hambatan operasional di Pelabuhan Pulau Baai, sehingga kinerja ekspor Provinsi Bengkulu berpeluang mengalami pemulihan. Ke depan, kebijakan perdagangan global serta kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing produk ekspor, baik melalui diversifikasi komoditas maupun peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.

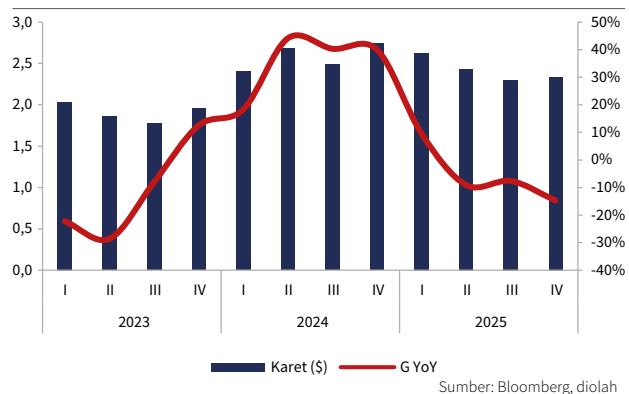
Selanjutnya, ekspor komoditas karet masih menunjukkan tren penurunan dimana pada triwulan IV 2025 terkontraksi lebih dalam sebesar 74,29% (yoy) pada triwulan IV 2025 (Grafik 1.17).



Grafik 1.17 Volume Ekspor Karet Bengkulu

Pelemahan ini sejalan dengan harga global komoditas yang fluktuatif seiring pergerakan harga minyak mentah yang berdampak terhadap substitusi karet sintetis. Selain itu meningkatnya pasokan karet alam dari negara produsen baru seperti Vietnam dan Kamboja menambah tekanan pada daya saing ekspor karet Bengkulu, baik dari sisi harga maupun pangsa pasar. Kondisi ini memperkuat pengembangan strategi hilirisasi karet di daerah, peningkatan efisiensi produksi, dan perluasan akses pasar non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global yang sangat sensitif terhadap perubahan harga dan dinamika pasokan.

Harga karet dunia pada triwulan IV 2025 adalah USD 2,30 per kg atau terkontraksi lebih dalam sebesar 14,72% (yoy) dibandingkan pertumbuhan harga pada periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,64% (yoy) (Grafik 1.18). Lebih lanjut, adanya alih fungsi lahan di daerah penghasil karet menjadi lahan kelapa sawit menyebabkan penurunan pasokan.

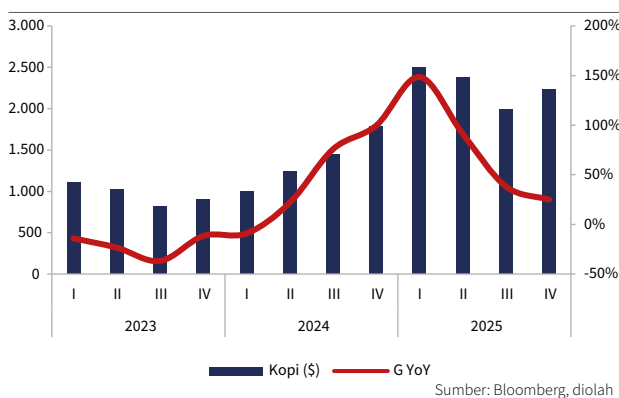


Grafik 1.18 Harga Karet Global





Di sisi lain, komoditas kopi menunjukkan penurunan harga dalam periode pelaporan. Harga komoditas kopi dunia pada triwulan IV 2025 melambat sebesar 24,91% (yoy). Dari sisi pasokan, terjadi kelebihan supply di pasar internasional seiring meningkatnya produksi dari negara produsen utama seperti Brazil dan Vietnam, berdampak dengan terjadinya surplus stok kopi Arabika sehingga mendorong surplus stok dan menekan harga kopi Arabika maupun Robusta. Selain itu, penguatan dolar AS sepanjang tahun 2025 turut menekan harga komoditas yang diperdagangkan dalam USD, termasuk kopi, sehingga harga internasional cenderung melemah.



Grafik 1.19 Harga Kopi Global

Kinerja impor Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat melambat dibandingkan periode triwulan III 2025, dengan pertumbuhan sebesar 0,26% (yoy), lebih rendah dari capaian pada periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,94% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh terhambatnya aktivitas pengiriman antar daerah seiring pelaksanaan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.

1.2 SISI LAPANGAN USAHA

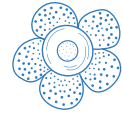
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), ekonomi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 4,79% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,56% (yoy). Pada triwulan IV 2025, tercatat sebanyak 14 lapangan usaha (LU) di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan positif. Secara persentase, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, diikuti oleh Jasa Lainnya, Jasa Keuangan dan Asuransi serta Industri Pengolahan. Sementara itu, dari sisi sumber pertumbuhan, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor utama, diikuti oleh Industri Pengolahan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran pada periode pelaporan.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2023	2024					2025				
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,8
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,06	(0,40)	6,57	1,64	2,42	2,57	5,24	3,82	4	3,43	4,11
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7,85	16,57	(14,05)	4,49	1,98	2,22	-0,85	-1,68	-1,44	-11,26	-4,16
INDUSTRI PENGOLAHAN	1,83	4,76	1,83	-2,38	2,17	1,49	6,61	9,84	9,94	11,06	9,41
PENGADAAN LISTRIK, GAS	3,96	7,94	4,13	1,23	3,13	4,04	3,97	1,71	3,93	4,45	3,51
PENGADAAN AIR	4,57	1,71	6,36	8,02	8,24	6,09	-0,22	-0,15	-1,53	2,01	0,03
KONSTRUKSI	5,04	3,74	5,33	7,97	5,37	5,63	-1,43	5,10	3,9	4,74	3,15
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3,05	1,89	3,59	3,09	4,54	3,32	3,82	3,89	2,46	2,88	3,25
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7,22	1,26	3,66	7,52	3,70	3,97	3,79	3,67	3,89	6,43	4,47
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,88	9,06	9,21	9,66	9,63	9,39	9,00	12,52	10,59	14,05	11,6
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,61	9,02	8,86	9,48	9,55	9,23	8,92	9,43	8,33	8,07	8,69
JASA KEUANGAN	(5,09)	5,20	4,74	9,57	2,23	5,46	4,00	3,28	6,89	24,44	9,45
REAL ESTATE	5,26	2,73	3,59	5,35	5,35	4,27	6,47	6,57	4,18	4,41	5,38
JASA PERUSAHAAN	7,84	6,18	7,65	9,33	9,6	8,21	4,41	8,84	7,62	9,89	7,74
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6,16	18,14	5,85	6,21	4,66	8,41	2,91	1,98	2,18	-0,33	1,69
JASA PENDIDIKAN	4,88	8,86	3,22	5,81	8,09	6,42	8,76	8,05	7,29	5,14	7,24
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,61	9,03	8,95	9,40	8,90	9,07	9,53	7,20	3,65	9,23	7,36
JASA LAINNYA	9,93	9,07	9,01	9,61	9,74	9,37	9,13	12,97	8,76	11,07	10,52

Sumber: BPS, diolah





Kinerja kuat pada ketiga lapangan usaha tersebut mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi regional yang ditopang oleh meningkatnya produksi komoditas primer seiring mulai terjadinya pergeseran struktur ekonomi daerah menuju sektor dengan nilai tambah yang tinggi, serta menguatnya arus distribusi barang, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun komoditas unggulan daerah.

Namun demikian, terjadi kontraksi yang lebih dalam pada kinerja LU Pertambangan dan Penggalan yang dipengaruhi oleh penurunan volume produksi batu bara seiring cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi pada akhir tahun. Kondisi tersebut berdampak pada

terganggunya aktivitas operasional penambangan serta distribusi akibat pengerukan alur Pelabuhan Palau Baai. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi Bengkulu tumbuh secara luas, kinerja sektoral berbasis komoditas ekstraktif masih menghadapi tekanan, baik dari faktor struktural maupun hambatan logistik yang memerlukan percepatan penanganan.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

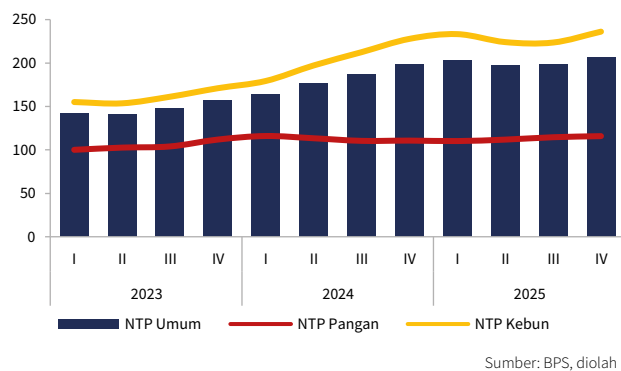
Kinerja LU Pertanian tercatat tumbuh solid, namun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tumbuh sebesar 3,43% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,00% (yoy). Tetap solidnya kinerja LU Pertanian turut didorong oleh program perluasan Lahan Belum Menghasilkan (TBM), mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian. Selanjutnya, pertumbuhan juga turut didukung oleh berlanjutnya program PSR komoditas kelapa sawit.

Selain itu, produksi jagung turut didukung oleh implementasi program SaDeSaHe (Satu Desa Satu Hektare) yang mendorong pemanfaatan lahan secara efisien melalui penanaman jagung secara serentak di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Metode ini tidak hanya meningkatkan produktivitas per satuan luas lahan, tetapi juga membantu petani dalam mengoptimalkan pendapatan melalui diversifikasi hasil panen.

Sementara itu, fluktuasi harga TBS dipengaruhi oleh faktor cuaca, dinamika permintaan pasar global, serta

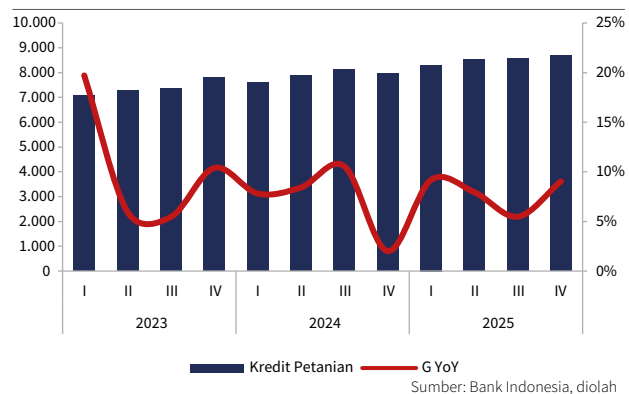
kebijakan pemerintah. Di sisi lain, penetapan harga TBS di tingkat provinsi yang mencapai Rp3.347/kg menunjukkan pergerakan yang berbeda dengan tren penurunan harga CPO global, yang tercatat sekitar USD1.004,27 per metrik ton. Meskipun harga CPO global mengalami penurunan, harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di tingkat provinsi tidak mengikuti pola yang sama, mencerminkan faktor-faktor lokal yang lebih dominan dalam menentukan harga TBS.

Berdasarkan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator yang mencerminkan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan perbaikan yaitu NTP Umum dan Kebun pada periode laporan yang tercatat tumbuh masing-masing sebesar 206,93 dan 236,13, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 198,03 dan 223,60. (Grafik 1.20).



Grafik 1.20 Nilai Tukar Petani

Selanjutnya, kinerja pertumbuhan kredit LU pertanian pada triwulan IV 2025 menguat sebesar 9,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,48% (yoy) (Grafik 1.21).



Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Pertanian

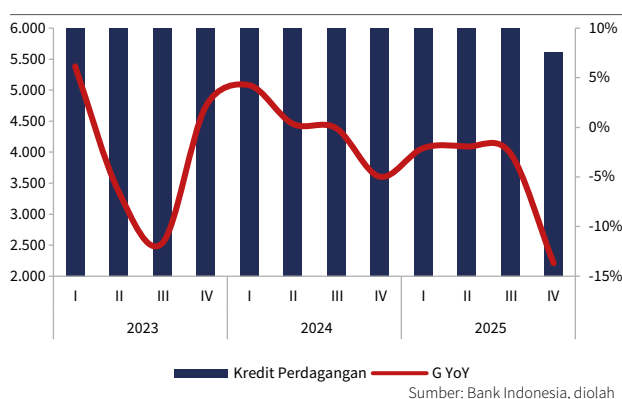




LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami akselerasi dibandingkan triwulan III 2025. LU Perdagangan tumbuh sebesar 2,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,46% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan barang konsumsi selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru.

Akselerasi ini tertahan oleh pertumbuhan kredit perdagangan pada triwulan IV 2025 yang terkontraksi lebih dalam sebesar 13,69% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy) (Grafik 1.22)



Grafik 1.22

Perkembangan Kredit Perdagangan

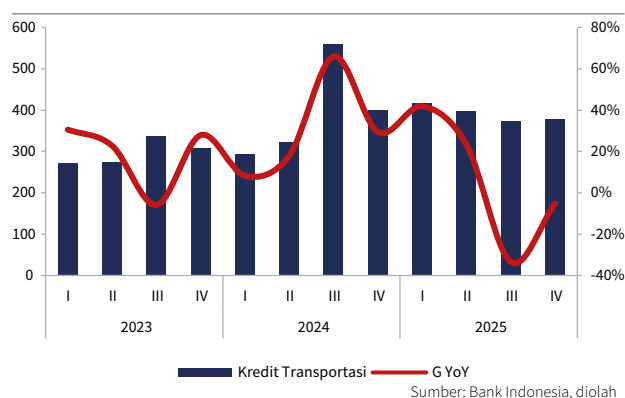
Di sisi lain, pelemahan pada sektor pertambangan dan penggalian sejalan dengan menurunnya volume produksi komoditas utama dan terbatasnya aktivitas operasional di sektor tersebut akibat cuaca. Selain itu, kinerja LU Perdagangan juga melemah akibat moderasi permintaan domestik dan penurunan aktivitas distribusi melalui Pelabuhan Pulau Baai, mengurangi perputaran komoditas dan aktivitas perdagangan terkait.

LU Transportasi dan Pergudangan

Pada triwulan III 2025, Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Pergudangan tumbuh membaik menjadi 6,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 3,89% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru, serta mulai pulihnya

konektivitas logistik seiring penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Selain itu, penguatan aktivitas perdagangan dan dukungan pembiayaan LU transportasi turut mendorong perbaikan kinerja transportasi, yang mencerminkan semakin membaiknya aktivitas ekonomi dan kelancaran distribusi barang di Provinsi Bengkulu.

Kinerja kredit LU transportasi pada triwulan IV 2025 terakselerasi sebesar 5,10% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mengalami kontraksi sebesar 33,50% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan menguatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas penumpang pada momentum periode puncak libur di triwulan pelaporan. (Grafik 1.23).



Grafik 1.23

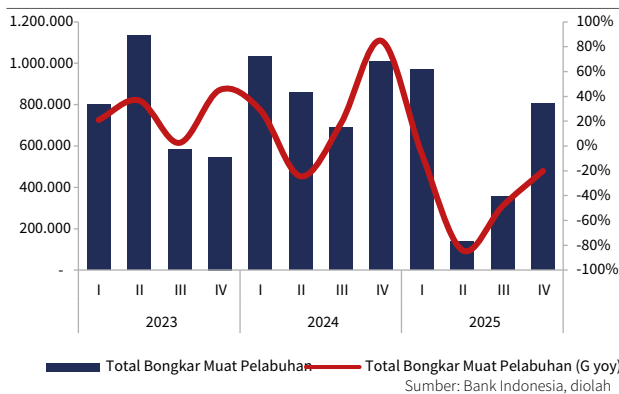
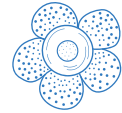
Perkembangan Kredit Transportasi

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, volume bongkar muat jalur laut pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh membaik 20,1% (yoy), namun masih terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar 48,4% (yoy). Perbaikan tersebut terutama didorong oleh penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai pada akhir periode pelaporan yang mencapai kedalaman 6,5 meter. Kondisi ini berdampak pada mulai pulihnya aktivitas distribusi barang, termasuk melalui konektivitas jalur darat.

Sementara itu, volume barang bongkar muat di bandara mengalami akselerasi sebesar 120,5% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun baru.

Disamping itu, perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan triwulan IV 2025 ditopang oleh berlanjutnya





Grafik 1.24 Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelabuhan

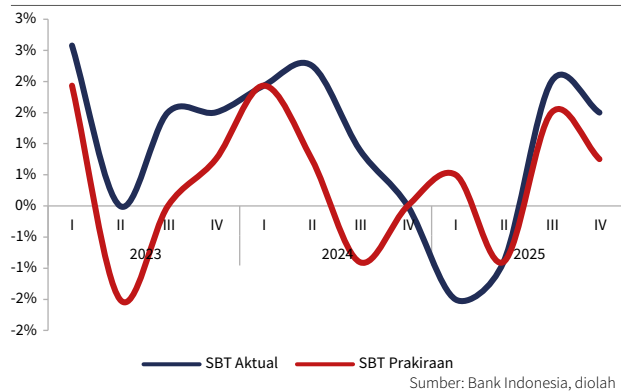
implementasi kebijakan logistik nasional dan penguatan infrastruktur transportasi. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 dan PMK Nomor 36 Tahun 2025 yang memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat ekonomi domestik. Dengan intervensi fiskal ini, subsektor angkutan udara dapat menjaga permintaan di tengah tantangan logistik jalur laut, sekaligus mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian daerah pada periode laporan.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU Konstruksi tumbuh sebesar 4,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konstruksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,90% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya realisasi pengadaan semen serta penguatan kinerja PMTB/ Investasi. Selain itu, peningkatan LU Konstruksi juga didukung oleh terealisasinya belanja modal pemerintah pada triwulan IV, pasca pembukaan blokir anggaran yang terjadi pada semester II 2025.

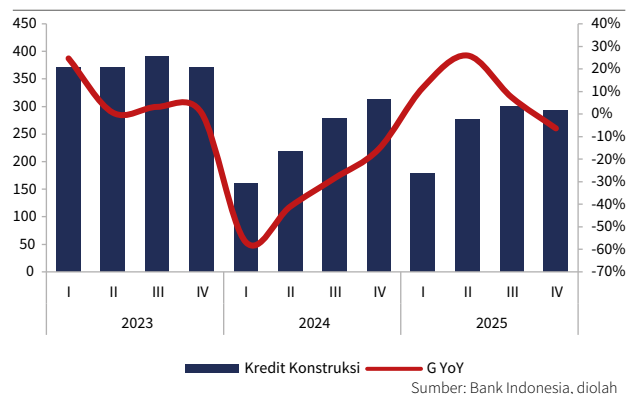
Namun, pertumbuhan LU Konstruksi masih tertahan oleh kinerja Saldo Bersih Tertimbang (SBT) aktual yang tercatat sebesar 1,50%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,00%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja LU konstruksi pada triwulan IV ditopang oleh penyelesaian proyek serta optimalisasi belanja modal pemerintah pada akhir tahun. Penurunan SBT yang tidak sejalan dengan peningkatan realisasi tersebut mencerminkan terbatasnya prospek permintaan

dan pipeline proyek ke depan, seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berisiko membatasi ruang belanja pemerintah daerah. Sehingga, pertumbuhan konstruksi masih kuat pada periode berjalan, namun berpotensi mengalami normalisasi pada triwulan berikutnya.



Grafik 1.25 SBT Perkembangan Kegiatan Usaha SKDU

Selanjutnya, kinerja kredit pada LU konstruksi berkontraksi pada periode pelaporan, yakni sebesar 6,37% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,41% (yoy). Penurunan kinerja ini sejalan dengan telah diselesaikannya sebagian besar proyek-proyek strategis pemerintah pada triwulan sebelumnya, sehingga hanya melanjutkan beberapa proyek yang belum selesai.



Grafik 1.26 Perkembangan Kredit Konstruksi

LU Industri Pengolahan

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 menunjukkan akselerasi pertumbuhan, didorong oleh meningkatnya pasokan bahan baku kelapa sawit sehingga mendorong

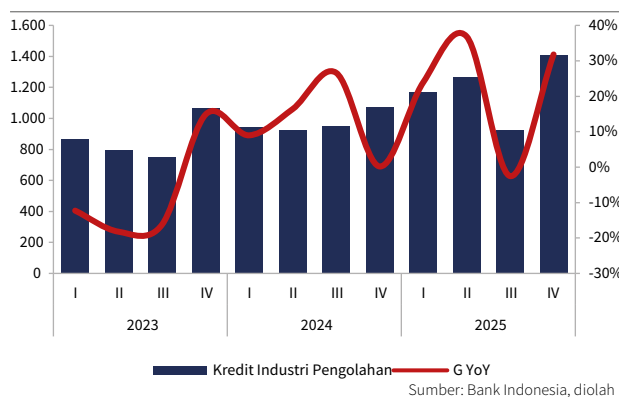




kenaikan aktivitas produksi pada industri besar dan sedang, terutama industri pengolahan CPO, sehingga memperkuat kinerja LU industri secara keseluruhan pada triwulan berjalan.

Stabilitas pasokan bahan baku pada periode pelaporan turut memastikan kelancaran proses produksi, sehingga kapasitas utilisasi industri dapat dioptimalkan secara lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

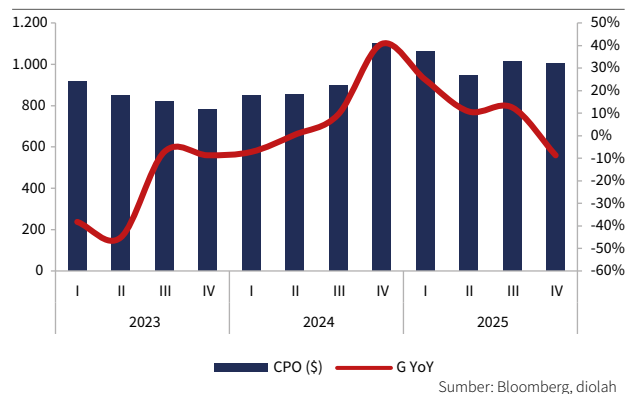
Pada triwulan IV 2025, kinerja LU industri pengolahan tumbuh sebesar 11,06% (yoy) lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,94% (yoy). Kondisi ini juga tecermin dari perbaikan produktivitas CPO seiring dengan perbaikan kapasitas produksi. Selain itu, pada sektor kredit mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV 2025, yakni sebesar 31,79% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,54% (yoy). (Grafik 1.27).



Grafik 1.27

Kredit LU Industri Pengolahan

Sementara, harga CPO global menunjukkan penurunan yaitu sebesar 8,73% (yoy) pada triwulan IV atau berkontraksi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,52% (yoy) (Grafik 1.28).



Grafik 1.28

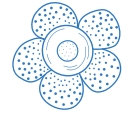
Harga CPO Global

Harga CPO pada periode berjalan tercatat meningkat, mencerminkan menguatnya permintaan global di tengah pengetatan pasokan dari negara produsen utama. Kenaikan tersebut juga didorong oleh tingginya serapan domestik untuk memenuhi kebutuhan serta ekspektasi pelaku industri terhadap permintaan pada triwulan selanjutnya.

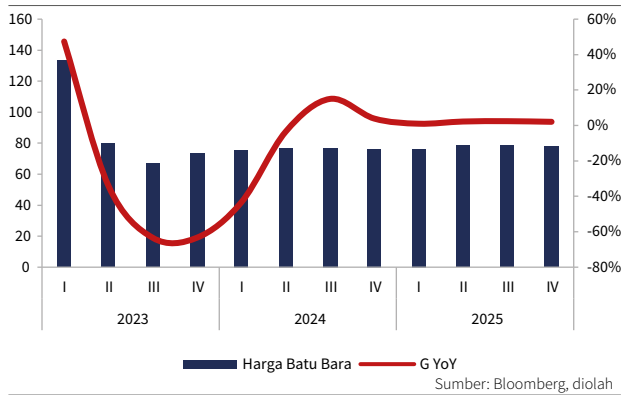
LU Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan pada periode triwulan IV 2025. LU Pertambangan dan Penggalian berkontraksi lebih dalam sebesar 11,26% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,44% (yoy). Aktivitas pertambangan terbesar di Provinsi Bengkulu didominasi oleh komoditas batu bara. Pelemahan kinerja LU Pertambangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan volume produksi batu bara akibat curah hujan tinggi pada akhir tahun, berdampak pada terganggunya aktivitas operasional penambangan serta distribusi, sehingga menahan kinerja LU pertambangan secara keseluruhan.

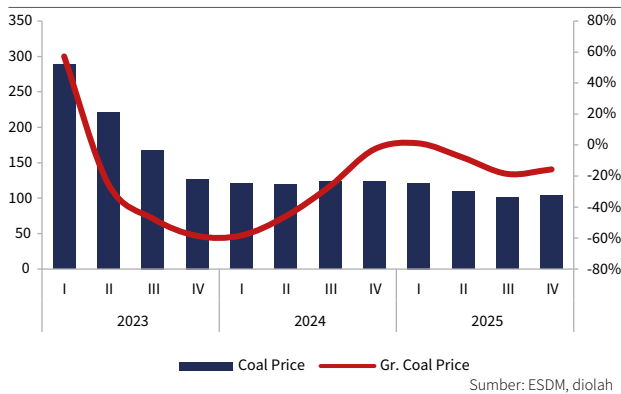
Rata-rata indeks harga batubara pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 92,31, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level 113,36. Penurunan tersebut mencerminkan melemahnya permintaan global di tengah pasokan yang relatif memadai dari negara produsen utama. Selain itu, penurunan harga juga dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan pembangkit



listrik di sejumlah negara Asia, terutama Tiongkok dan India. Pelemahan indkes harga ini turut memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor komoditas batu bara.



Grafik 1.29 Tren Harga Komoditas Batu Bara



Grafik 1.30 Tren Harga Acuan Komoditas Batu Bara

1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 tumbuh menguat sebesar 4,80% (yoy) dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy).

SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT pada tahun 2025 tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik dari Rp2.507.079 pada tahun 2024 menjadi Rp2.670.039 pada tahun 2025, yang berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara asal Provinsi Bengkulu di dalam wilayah Provinsi Bengkulu turut mendorong terjadinya peningkatan pengeluaran konsumsi RT, khususnya makanan dan minuman,

termasuk restoran dan hotel. Kinerja investasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di tahun 2025. Peningkatan investasi ini tercermin dari bertambahnya luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) pada komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam jangka panjang.

Selain itu, berlanjutnya berbagai kegiatan konstruksi di Provinsi Bengkulu, seperti pembangunan dan revitalisasi sekolah, pembangunan pos pengendalian banjir, preservasi jalan, serta pembangunan pos pengamanan pantai, turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja investasi. Namun, di sisi lain, kinerja ekspor luar negeri mengalami kontraksi yang lebih lebih dalam, dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor komoditas batubara (HS 27) dan karet (HS 40) serta berkurangnya aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai.

SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berasal dari LU pertanian, industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan. Kinerja LU pertanian didorong oleh peningkatan produksi jagung, seiring dengan dilaksanakannya panen raya di beberapa kabupaten sebagai hasil dari implementasi program Sadesahe (Satu Desa Satu Hektare). Selain itu, program peningkatan produksi komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan kopi, juga turut memberikan kontribusi positif. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah menjangkau 24 kelompok tani di 6 kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Sejalan dengan hal tersebut, LU industri pengolahan juga mencatatkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh meningkatnya pasokan bahan baku kelapa sawit. Hal ini mendukung kinerja industri besar dan sedang, khususnya industri pengolahan CPO, yang semakin diperkuat dengan mulai beroperasinya dua pabrik CPO baru di Kabupaten Seluma. Selain itu, kinerja LU transportasi dan pergudangan turut menunjukkan penguatan, didorong berlanjutnya tahap kedua revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, serta meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara selama periode pelaporan.





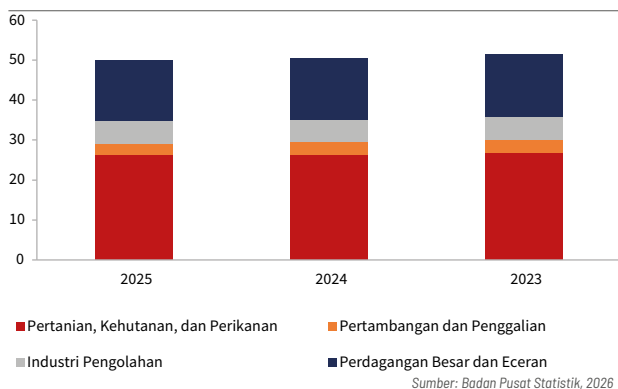
Sementara itu, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tertahan oleh kinerja LU sektor pertambangan dan penggalian, yang dipengaruhi oleh penurunan volume produksi batubara dan emas akibat tingginya curah hujan pada akhir tahun, seiring dengan adanya perbaikan alur Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi tersebut berdampak pada melandainya kinerja LU perdagangan besar dan eceran, yang dipengaruhi oleh penurunan sektor pertambangan dan penggalian, serta menurunnya volume penjualan kendaraan baru, baik mobil maupun motor, yang turut menahan laju pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran.



BOKS 1

PROSPEK KINERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN SEBAGAI MOTOR PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BENGKULU

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian Provinsi Bengkulu. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara konsisten menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pangsa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada 25-26% terhadap PDRB ADHK, mencerminkan struktur ekonomi Bengkulu yang masih berbasis komoditas primer dan sumber daya alam.



Grafik B1.1 Struktur PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha (Empat Sektor Terbesar) (%)

Selain memberikan kontribusi terbesar terhadap output daerah, sektor ini juga meyerap sekitar 44,43% atau 489,33 ribu dari total penduduk yang bekerja, sehingga dinamika kinerjanya memiliki implikasi langsung terhadap pendapatan rumah tangga, daya beli masyarakat perdesaan, serta stabilitas sosial ekonomi daerah. Dengan besarnya peran tersebut, setiap perubahan pada produktivitas, harga komoditas, maupun kondisi iklim yang memengaruhi sektor ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian Bengkulu secara keseluruhan.

Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada periode 2028–2029. Target ini

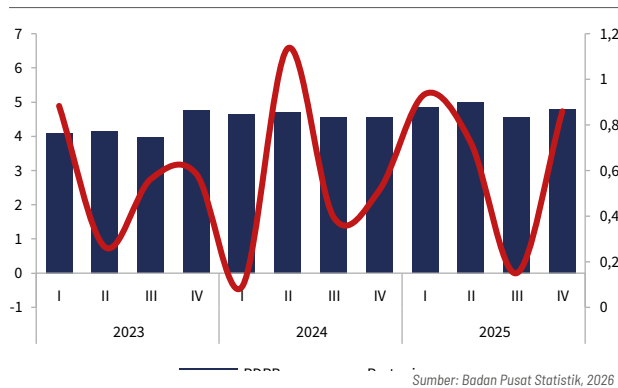
merefleksikan upaya percepatan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Bengkulu, yang dalam lima tahun terakhir mencatat rata-rata pertumbuhan di bawah angka tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian target nasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memiliki basis struktural kuat dan daya ungkit tinggi. Pada Provinsi Bengkulu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB menjadi salah satu tumpuan utama akselerasi pertumbuhan melalui optimalisasi produktivitas, stabilitas harga komoditas unggulan, serta pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah dan mendorong transformasi ekonomi daerah. Di sisi lain, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan investasi, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas logistik menjadi faktor krusial dalam mempercepat realisasi potensi ekonomi daerah, sehingga Bengkulu dapat meningkatkan laju pertumbuhan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

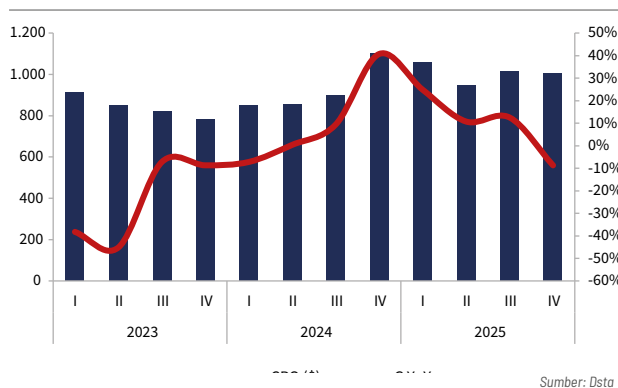
Perkembangan Kinerja dan Faktor Pendorong

Kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam lima tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 2-4 % (yoy ditopang oleh subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, karet, dan kopi. Kelapa sawit menjadi komoditas dominan baik dari sisi luas areal maupun kontribusinya terhadap ekspor daerah. Harga *Crude Palm Oil* (CPO) global yang berada pada kisaran USD 800 - 1000/ metrik ton turut menopang pendapatan petani dan menjaga likuiditas ekonomi perdesaan.





Grafik B1.2 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu (yoy)



Grafik B1.3 Perkembangan Harga Crude Palm Oil (CPO)

Sementara, subsektor tanaman pangan masih menghadapi tantangan akibat pola curah hujan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produktivitas serta kualitas hasil panen di sejumlah sentra produksi. Meskipun demikian, berbagai upaya penguatan kapasitas produksi terus diakselerasi melalui program perluasan areal tanam, termasuk kegiatan cetak sawah baru dan implementasi program SaDeSaHe (Satu Desa Satu Hektare) yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan lahan.

Selanjutnya, keberlanjutan program peremajaan kelapa sawit dengan luas sekitar 500.000 hektare serta pengembangan kegiatan pembenihan ikan di sejumlah kabupaten turut menjadi faktor pendukung penguatan kinerja sektor pertanian dalam arti luas. Program peremajaan sawit diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman, memperbaiki kualitas hasil, serta memperkuat kesinambungan pasokan bahan baku industri pengolahan. Sementara itu, pengembangan pembenihan ikan berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi subsektor perikanan budidaya, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendorong peningkatan nilai tambah sektor primer

secara berkelanjutan. Sinergi berbagai program tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tengah berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi daerah.

Ketimpangan Hulu-Hilir dan Permasalahan Struktural

Meskipun memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menghadapi ketimpangan struktural dalam penciptaan nilai tambah. Dari sisi eksternal, volatilitas harga komoditas global, khususnya crude palm oil (CPO) dan karet menjadi faktor signifikan mengingat tingginya ketergantungan Bengkulu terhadap komoditas tersebut. Fluktuasi harga internasional tidak hanya memengaruhi kinerja ekspor daerah, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan petani dan likuiditas ekonomi perdesaan, sehingga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDRB.

Dari sisi lain, risiko cuaca ekstrem dan perubahan iklim dapat mengganggu stabilitas produksi melalui gangguan irigasi, banjir, maupun kekeringan. Selain itu, keterbatasan produktivitas lahan, rendahnya adopsi teknologi modern, serta minimnya regenerasi petani menjadi tantangan jangka menengah yang berpotensi menghambat transformasi sektor menuju sistem produksi yang lebih efisien dan berdaya saing.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya ketimpangan dalam penciptaan nilai tambah. Meskipun pengolahan awal sawit menjadi CPO telah dilakukan di Bengkulu, seluruh produksi masih dipasarkan ke luar daerah untuk proses lanjutan, sehingga manfaat ekonomi turunan belum sepenuhnya dinikmati secara regional. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kebocoran nilai tambah (*value leakage*) yang membatasi efek pengganda terhadap sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa penunjang.

Dari sisi distribusi, sekitar 36% volume CPO dikapalkan melalui Pelabuhan Pulau Baai, sementara sekitar 65% sisanya didistribusikan melalui jalur darat ke Padang, Lampung, dan Palembang. Pola tersebut mencerminkan keterbatasan kapasitas dan efisiensi logistik daerah, yang berdampak pada tingginya biaya distribusi dan belum optimalnya pengembangan industri hilir berbasis sawit



di Bengkulu. Selain itu, mekanisme pencatatan ekspor berdasarkan lokasi penyandaran kapal menyebabkan pengiriman CPO tidak tercatat sebagai ekspor daerah, sehingga kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap kinerja ekspor regional belum optimal. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi berbasis kawasan industri CPO di Pelabuhan Pulau Baai, disertai perbaikan tata kelola distribusi dan pencatatan ekspor, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah domestik

Dampak Hilirisasi pada Kawasan Industri terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan, khususnya industri pengolahan sawit di sekitar Pelabuhan Pulau Baai, berpotensi memberikan dampak struktural yang signifikan terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Bengkulu.

1. PENGUATAN PERMINTAAN BAHAN BAKU DAN STABILITAS HARGA PETANI

Peningkatan permintaan bahan baku yang lebih stabil dan terstruktur berpotensi menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Selama ini, sebagian besar CPO dipasarkan ke luar daerah untuk proses lanjutan sehingga harga TBS sangat dipengaruhi oleh dinamika distribusi dan biaya logistik. Kehadiran Kawasan industri yang terintegrasi diperkirakan dapat memperpendek rantai pasok, menurunkan biaya distribusi, serta meningkatkan efisiensi transmisi harga dari industri ke petani.

Stabilitas harga tersebut berimplikasi pada peningkatan pendapatan petani dan penguatan daya beli masyarakat perdesaan. Mengingat besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja, kondisi ini berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI

Pengembangan kawasan industri berbasis *Crude Palm Oil* (CPO) berpotensi mendorong pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor primer menuju ekonomi berbasis pengolahan (*resource-based industrial economy*).

Selama ini, aktivitas pengolahan sawit di Bengkulu masih terbatas pada tahap produksi CPO, sementara proses hilirisasi lanjutan dilakukan di luar daerah. Kehadiran industri hilir, seperti minyak goreng, biodiesel, maupun produk oleokimia tahap awal, diperkirakan dapat meningkatkan nilai tambah domestik secara signifikan.

Peningkatan nilai tambah tersebut akan mendorong kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sekaligus menekan kebocoran nilai tambah ke luar wilayah. Dalam jangka menengah, transformasi ini berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja formal, serta memperkuat basis penerimaan daerah.

3. EFEK PENGGANDA TERHADAP SUBSEKTOR LAIN DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Dampak pengembangan kawasan industri tidak terbatas pada subsektor kelapa sawit. Penguatan ekosistem industri berpotensi menciptakan permintaan turunan terhadap berbagai komoditas lain, seperti biomassa, hasil kehutanan non-kayu, serta bahan baku pakan berbasis produk samping pertanian dan perikanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan sistem logistik di sekitar kawasan industri diperkirakan meningkatkan efisiensi distribusi komoditas dan perikanan secara lebih luas.

Pada subsektor perikanan, manfaat tersebut antara lain tercermin dari peluang pengembangan *cold storage*, fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta integrasi rantai pasok yang lebih modern. Kondisi ini membuka ruang peningkatan nilai tambah sekaligus perluasan akses pasar, baik domestik maupun ekspor.

4. PENINGKATAN INVESTASI DAN MODERNISASI PRODUKSI

Pengembangan kawasan industri berpotensi mendorong masuknya investasi baru, baik pada sektor pengolahan maupun sektor hulu sebagai respons terhadap peningkatan permintaan bahan baku. Peningkatan investasi tersebut dapat mempercepat modernisasi praktik budidaya melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta penerapan teknologi pertanian presisi.

Dalam jangka panjang, modernisasi tersebut diperkirakan meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi produksi

sehingga memperkuat daya saing sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara keseluruhan. Integrasi dengan industri pengolahan juga mendorong penerapan standar kualitas dan keberlanjutan yang lebih tinggi, termasuk sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) maupun standar ekspor lainnya.

5. PERBAIKAN TATA KELOLA DISTRIBUSI DAN PENCATATAN EKSPOR

Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai berpotensi memperbaiki tata kelola distribusi serta pencatatan ekspor daerah. Selama ini, sebagian distribusi CPO melalui jalur darat menyebabkan pengiriman tidak tercatat sebagai ekspor Provinsi Bengkulu. Optimalisasi kawasan industri dan pelabuhan diperkirakan dapat meningkatkan proporsi ekspor yang dicatat langsung dari Bengkulu, sehingga memperkuat kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap kinerja ekspor regional sekaligus meningkatkan kualitas indikator statistik perdagangan daerah.

Prospek 2026: Momentum Penguatan sebagai Motor Pertumbuhan

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bersama GAPKI, kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 2026 diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu, dengan laju pertumbuhan pada kisaran 8-10% (yoy). Proyeksi tersebut mempertimbangkan kondisi fundamental sektor yang relatif kuat, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta asumsi stabilitas faktor eksternal.

Prospek tersebut didukung oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang relatif kondusif, baik dari sisi harga komoditas global, peningkatan kapasitas produksi, percepatan hilirisasi, maupun perbaikan iklim usaha dan infrastruktur pendukung.

1. STABILITAS DAN POTENSI KENAIKAN HARGA KOMODITAS GLOBAL

Dari sisi eksternal, pergerakan harga komoditas global diperkirakan masih memberikan dukungan terhadap kinerja subsektor perkebunan. Berdasarkan informasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), harga *Crude Palm Oil* (CPO) global pada tahun 2026

diprakirakan berada pada kisaran 4.100-4.400 ringgit/metik. Prospek stabilitas harga tersebut mencerminkan keseimbangan antara permintaan global yang tetap terjaga dan dinamika pasokan dari negara produsen serta kebijakan energi terbarukan di beberapa negara importir utama. Stabilitas harga ini berpotensi menjaga margin usaha dan pendapatan petani sawit, yang pada akhirnya memperkuat daya beli masyarakat perdesaan.

Mengacu pada struktur ekonomi Bengkulu, di mana kelapa sawit merupakan komoditas dominan dari sisi luas areal dan volume produksi, setiap pergerakan harga CPO memiliki korelasi langsung terhadap likuiditas ekonomi lokal. Stabilitas harga tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga mendorong aktivitas perdagangan, transportasi, dan jasa penunjang di wilayah sentra produksi.

Selain sawit, potensi perbaikan harga kopi robusta dan karet juga menjadi faktor penguat. Permintaan global terhadap kopi, termasuk kopi specialty, menunjukkan tren meningkat, yang membuka peluang peningkatan ekspor kopi Bengkulu apabila didukung oleh peningkatan kualitas dan sertifikasi. Sementara itu, stabilisasi harga karet di pasar internasional dapat mengurangi tekanan terhadap subsektor yang sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

2. PROGRAM HILIRISASI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Faktor penguat prospek lainnya adalah penguatan agenda hilirisasi komoditas unggulan. Selama ini, struktur produksi komoditas Bengkulu masih didominasi ekspor bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah domestik relatif terbatas. Pada 2026, pengembangan industri pengolahan berbasis sawit di sekitar Pelabuhan Pulau Baai, termasuk rencana kawasan industri CPO, berpotensi menjadi katalis transformasi struktural ekonomi daerah.

Kehadiran kawasan industri, khususnya komoditas kelapa sawit akan mendorong pergeseran struktur ekonomi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi daerah dengan basis pengolahan (*resource-based industrial economy*). Dampaknya tidak hanya terbatas pada peningkatan output industri pengolahan, tetapi juga memperkuat



keterkaitan (*linkage*) antara sektor primer dan sekunder. Permintaan bahan baku yang lebih stabil dari industri lokal berpotensi menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, sehingga mengurangi volatilitas pendapatan.

Selain sawit, pengembangan hilirisasi kopi robusta Bengkulu, termasuk pengolahan pascapanen, roasting, hingga pengemasan produk bernilai tambah, berpotensi meningkatkan daya saing ekspor. Produk olahan berbasis UMKM juga dapat memperluas pasar domestik dan regional, sekaligus meningkatkan

3. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prospek sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan pada 2026 juga ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan pada penguatan kapasitas produksi dan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan nasional, perluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) pada komoditas perkebunan menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan pasokan

Sementara itu, program cetak sawah dan optimalisasi

Dari sisi pembiayaan, kegiatan peremajaan didukung melalui skema bantuan dan pendampingan budidaya, panen, serta pascapanen dengan nilai dukungan sekitar Rp60.000.000 per hektare. Skema ini diharapkan dapat mempercepat adopsi praktik budidaya yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil, serta memperkuat kapasitas usaha petani dalam jangka menengah.

Di sisi infrastruktur, optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai dan peningkatan konektivitas logistik diharapkan mampu menurunkan biaya distribusi dan mempercepat arus barang. Efisiensi logistik yang membaik akan meningkatkan daya saing komoditas Bengkulu di pasar domestik maupun internasional.



Gambar B1.1 Tanam Perdana Cetak Sawah Rakyat

lahan pertanian pangan berpotensi meningkatkan produksi padi dan komoditas pangan strategis, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membantu pengendalian inflasi daerah.



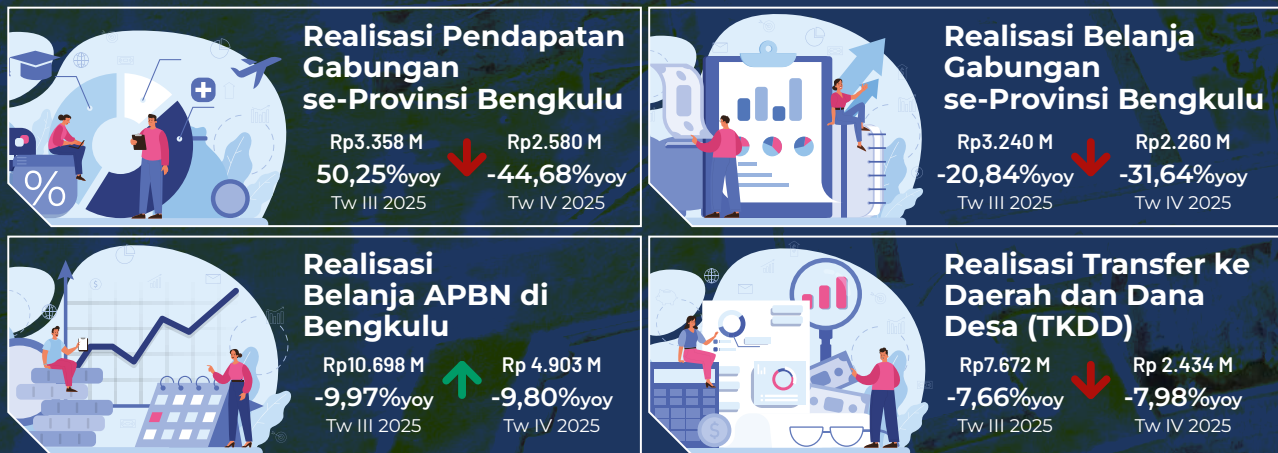
Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 2



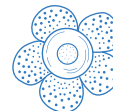
KEUANGAN PEMERINTAH



Kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV 2025 menunjukkan moderasi dibandingkan periode tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan daerah, serapan belanja APBD, maupun belanja pemerintah pusat melalui APBN. Meskipun realisasi pada triwulan IV mulai menunjukkan perbaikan seiring percepatan penyerapan anggaran pada akhir tahun, secara keseluruhan kinerja fiskal sepanjang tahun 2025 tercatat lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

- Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bengkulu hingga Triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp10.487,93 miliar, atau 77,17% dari pagu anggaran, dengan kinerja yang terkontraksi sebesar 12,17% (yoy). Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi pada komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan adanya perbaikan kinerja penerimaan daerah.
- Realisasi belanja APBD pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp2.260,16 miliar, dengan total realisasi sepanjang tahun mencapai Rp9.450,53 miliar atau sekitar 85,52% dari pagu anggaran. Secara tahunan, realisasi tersebut terkontraksi sebesar 21,49% (yoy), seiring dengan terbatasnya realisasi pada berbagai komponen belanja, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- Kinerja belanja APBN di Provinsi Bengkulu juga terkontraksi sebesar 8,69% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp15.107,1 miliar, atau 96,83% dari pagu. Hal ini mencerminkan terbatasnya intensitas program pemerintah pusat.





Tabel 2.1 Realisasi APBD Pemerintah se-Provinsi Bengkulu (Rp Miliar)

APBD PROVINSI BENGKULU	TOTAL 2024				TW. I 2025	TW. II 2025	TW. III 2025	TW. IV 2025	TOTAL 2025			
	(Rp MILIAR)		% REALISASI	% GROWTH (YOY)	(Rp MILIAR)	(Rp MILIAR)	(Rp MILIAR)	(Rp MILIAR)	(Rp MILIAR)		% REALISASI	% GROWTH (YOY)
	PAGU	REALISASI			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PAGU	REALISASI		
PENDAPATAN APBD	13.314,22	11.941,12	89,69%	1,01%	1.833,13	2.716,91	3.357,81	2.755,26	13.591,45	10.487,93	77,17%	-12,17%
PAD	1.864,79	1.541,52	82,66%	-3,85%	208,11	497,31	542,05	395,30	2.208,79	1.642,77	74,37%	6,57%
PENDAPATAN PERIMBANGAN / TRANSFER	11.333,38	10.389,23	91,67%	2,46%	1.624,75	2.212,63	2.787,23	2.162,63	11.289,84	8.787,24	77,83%	-15,42%
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	116,05	10,37	8,94%	-86,84%	0,28	6,97	28,52	22,15	92,82	57,92	62,40%	458,53%
JUMLAH BELANJA APBD	13.780,47	12.037,95	87,36%	2,20%	1.434,15	2.518,11	3.238,27	2.260,31	13.814,11	9.450,83	68,41%	-21,49%
BELANJA OPERASI	9.907,64	8.549,65	86,29%	7,38%	1.282,00	1.932,24	2.307,57	1.453,17	9.776,40	6.974,97	71,34%	-18,42%
BELANJA MODAL	1.915,99	1.656,34	86,45%	-14,05%	20,64	90,62	434,36	457,06	2.181,08	1.002,67	45,97%	-39,46%
BELANJA TAK TERDUGA	35,04	0,98	2,80%	-21,50%	-	0,15	0,15	0,20	28,16	0,50	1,78%	-48,76%
BELANJA TRANSFER	1.921,80	1.830,98	95,27%	-3,00%	129,72	495,11	498,13	349,73	1.828,47	1.472,69	80,54%	-19,57%
SURPLUS/DEFISIT		(96,83)			398,98	198,81	119,54		(222,65)	1037,10		

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

2.1 APBD GABUNGAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

Pendapatan daerah Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami moderasi dibandingkan periode tahun sebelumnya. Secara tahunan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp10.487,93 miliar atau 77,17% dari pagu anggaran, dan terkontraksi sebesar 12,17% (yoy). Terbatasnya realisasi pendapatan tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi pada komponen transfer ke daerah dari pemerintah pusat, di tengah dinamika penyaluran dana transfer sepanjang tahun anggaran 2025.

Realisasi belanja daerah juga tercatat menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp9.450,53 miliar atau 85,52% dari pagu anggaran, dan terkontraksi sebesar 21,49% (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi pada komponen belanja operasi dan belanja modal, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian prioritas belanja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

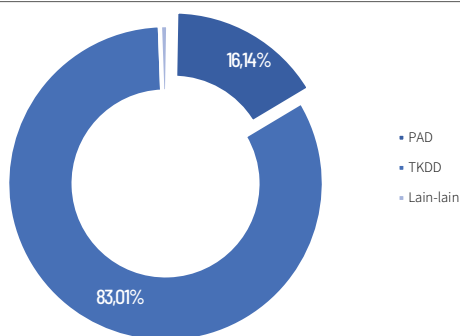
2.1.1 Pendapatan APBD se-Provinsi Bengkulu

Realisasi pendapatan gabungan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp10.487,93 miliar, atau mencapai 77,17% dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp13.591,45 miliar. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11.941,12 miliar.

Realisasi pendapatan gabungan Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 menunjukkan moderasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan, total pendapatan daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp10.487,93 miliar, atau mencapai 77,17% dari pagu anggaran sebesar Rp13.591,45 miliar. Secara tahunan, realisasi tersebut terkontraksi sebesar 12,17% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2024. Dari sisi triwulanan, realisasi pendapatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp2.755,26 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan moderasi penerimaan daerah serta penyesuaian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025.

Khusus realisasi pada triwulan IV 2025, total realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp2.755,26 miliar. Realisasi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan telah terealisasinya sebagian besar penerimaan daerah pada triwulan sebelumnya, khususnya yang bersumber dari komponen transfer pemerintah pusat serta pajak daerah, sehingga ruang peningkatan penerimaan pada akhir tahun relatif terbatas. Selain itu, pada tahun 2025 tidak lagi terdapat kebijakan insentif penerimaan daerah seperti program pemutihan pajak kendaraan yang pada tahun sebelumnya turut mendorong peningkatan realisasi PAD. Secara tahunan, pendapatan daerah pada tahun 2025 tercatat terkontraksi sebesar 12,17% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.





Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.1

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh komponen Pendapatan Perimbangan/Transfer (TKDD).

Hingga akhir tahun 2025, total realisasi TKDD tercatat sebesar Rp8.787,24 miliar, atau 77,83% dari pagu sebesar Rp11.289,84 miliar. Kondisi ini menunjukkan penurunan sebesar 15,42% (yoy) dibandingkan realisasi pada tahun 2024. Meskipun kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perbaikan, komponen transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penopang utama dalam struktur pendapatan daerah, sehingga secara keseluruhan realisasi pendapatan APBD tercatat menurun. Tingginya proporsi komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu masih relatif bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat sebagai sumber utama penerimaan daerah.

RASIO EFEKTIFITAS APBD SPASIAL DI PROVINSI BENGKULU

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target (pagu) yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasionya, semakin efektif kinerja pendapatan daerah tersebut. Pada TW IV 2025, terlihat adanya variasi kinerja antar kabupaten/kota, yang menunjukkan perbedaan kapasitas fiskal, basis pajak, dan efektivitas pemungutan.

Daerah dengan kinerja terbaik ditunjukkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencatat rasio efektivitas sebesar 72,51%, menjadi yang tertinggi di provinsi. Capaian ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam memaksimalkan realisasi pendapatan,

terutama melalui pemanfaatan PAD dan pengelolaan TKD yang lebih efektif. Kabupaten Bengkulu Selatan menyusul dengan rasio 71,09%, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pemungutan pajak daerah yang cukup optimal. Sementara itu, Kabupaten Seluma juga menunjukkan efektivitas yang kuat dengan capaian 65,63%, menggambarkan stabilitas dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sebagian besar daerah berada pada kategori efektivitas menengah, seperti Mukomuko (61,57%), Kepahiang (61,87%), Bengkulu Utara (58,57%), Kota Bengkulu (55,50%), dan Provinsi Bengkulu (55,34%). Daerah-daerah ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memiliki ruang perbaikan terutama dalam optimalisasi PAD dan penguatan basis wajib pajak. Ketergantungan terhadap TKD masih relatif tinggi, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah menjadi kebutuhan strategis yang perlu terus diperkuat.

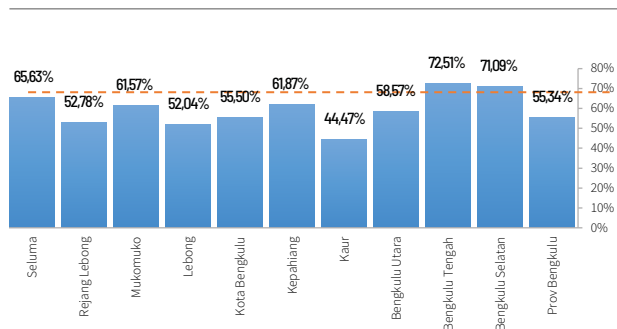
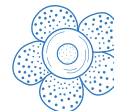
Di sisi lain, beberapa daerah mencatat rasio efektivitas yang relatif rendah seperti Rejang Lebong (52,78%), Lebong (52,04%), dan Kaur (44,47%). Rendahnya capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemungutan pendapatan daerah, baik dari sisi pengelolaan pajak maupun kemampuan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Perlu adanya langkah penguatan, termasuk peningkatan sistem pemungutan pajak, diversifikasi sumber PAD, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengoptimalkan TKD.

Secara keseluruhan, capaian efektivitas pendapatan pada tahun 2025 memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat beberapa daerah yang sudah menunjukkan performa sangat baik, pemerataan kapasitas fiskal antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah. Penguatan PAD, pengembangan sektor ekonomi unggulan, serta modernisasi sistem pemungutan menjadi kunci agar efektivitas pendapatan dapat meningkat secara lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Bengkulu.

RASIO KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL

Pemetaan rasio kemandirian dan desentralisasi fiskal pada Triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih didominasi





Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.2

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Spasial di Provinsi Bengkulu

oleh ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Rasio desentralisasi, yang menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, serta rasio kemandirian yang mengukur kemampuan daerah membiayai kebutuhan fiskalnya dari PAD terhadap TKDD, memberikan gambaran yang cukup kontras antarwilayah.

Kota Bengkulu menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi. Dengan rasio desentralisasi mencapai 25,65% dan rasio kemandirian 28,16%, Kota Bengkulu menunjukkan struktur PAD yang relatif kuat dibandingkan daerah lainnya. Kinerja ini mencerminkan kapasitas ekonomi perkotaan yang lebih besar, basis pajak yang lebih luas, serta kemampuan pemungutan pendapatan daerah yang lebih efektif.

Di kelompok menengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong menempati posisi berikutnya.

Keduanya mencatat rasio desentralisasi dan kemandirian di atas 8–10 persen. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD yang mulai signifikan, didukung oleh aktivitas ekonomi yang lebih beragam, seperti pertanian, perdagangan, dan sebagian sektor pertambangan.

Sebaliknya, mayoritas kabupaten lainnya berada pada kategori rendah, dengan rasio desentralisasi berkisar antara 4 hingga 8 persen. Kabupaten Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Selatan masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap TKDD sebagai sumber utama pendapatan. Kinerja PAD di wilayah-wilayah ini masih terbatas, mencerminkan perlunya penguatan basis pajak, diversifikasi ekonomi lokal, dan optimalisasi pemungutan retribusi.

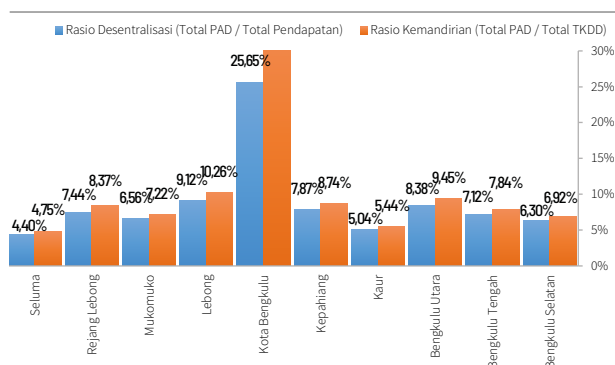
Secara keseluruhan, analisis spasial ini menegaskan bahwa kapasitas pendapatan daerah di Bengkulu masih belum merata. Hanya Kota Bengkulu yang menunjukkan pola fiskal lebih mandiri, sementara sebagian besar kabupaten masih berada pada kategori rendah dengan ketergantungan yang signifikan terhadap TKDD. Ke depan, penguatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi seluruh daerah di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.2 Realisasi Belanja APBD Pemerintah se-Provinsi Bengkulu (Rp Miliar)

BELANJA APBD PEMERINTAH SE-PROVONSI	TOTAL 2024 Rp MILIAR			TW. II 2025 Rp MILIAR	TW. II 2025 Rp MILIAR	TW. III 2025 Rp MILIAR	TW. IV 2025 Rp MILIAR	TOTAL 2025 Rp MILIAR			GROWTH (YOY)
	PAGU	REALISASI	%	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	PAGU	REALISASI	%	%
BELANJA OPERASI	9,907.64	8,549.65	86.29%	1,282.00	1,932.24	2,307.57	1,453.17	6,974.97	6,974.97	100.00%	-18.42%
BELANJA PEGAWAI	5,673.37	5,039.83	88.83%	1,110.70	1,438.07	1,330.84	807.57	5,673.37	4,687.18	82.62%	-7.00%
BELANJA BARANG & JASA	3,560.10	2,932.61	82.37%	153.88	487.21	917.93	597.04	3,560.10	2,156.06	60.56%	-26.48%
BELANJA BUNGA	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA HIBAH	663.41	567.51	85.54%	17.41	6.14	57.88	48.11	663.41	129.54	19.53%	-77.17%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	10.62	9.71	91.43%	-	0.82	0.93	0.44	10.62	2.19	20.61%	-77.46%
BELANJA MODAL	1,915.99	1,656.34	86.45%	20.64	90.62	434.36	457.06	2,181.08	1,002.67	45.97%	-39.46%
BELANJA TAK TERDUGA	35.04	0.98	2.79%	-	0.15	0.15	0.20	28.16	0.50	1.78%	-48.57%
BELANJA TRANSFER	1,921.80	1,830.98	95.27%	129.72	495.11	498.13	349.73	1,828.47	1,472.69	80.54%	-19.57%
JUMLAH BELANJA APBD	13,780.47	12,037.95	87.36%	1,432.36	2,518.11	3,240.21	2,260.16	11,012.68	9,450.83	85.82%	-21.49%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah
*Total 2024

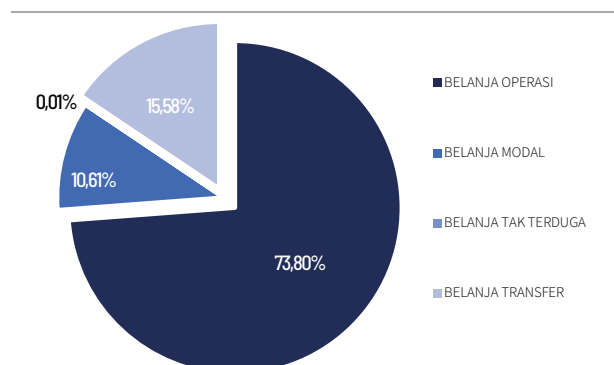




Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.3

Rasio Kemandirian Fiskal di Provinsi Bengkulu



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.4

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025

2.1.2 Belanja APBD se-Provinsi Bengkulu

Belanja APBD pemerintah se-Provinsi Bengkulu pada 2025 tercatat mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 realisasi belanja tercatat sebesar Rp9.450,53 miliar dari total pagu Rp11.012,68 miliar, atau sekitar 85,52% dari target tahunan. Secara tahunan, realisasi tersebut terkontraksi sebesar 21,49% (yoy), mencerminkan moderasi belanja pemerintah daerah dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini utamanya dipengaruhi oleh penyesuaian kapasitas fiskal daerah seiring kebijakan efisiensi fiskal nasional serta dinamika transfer ke daerah, yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengeksekusi belanja sepanjang tahun anggaran 2025.

Kenaikan realisasi belanja ini juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah memasuki fase percepatan pelaksanaan kegiatan, setelah pada TW I dan TW II realisasi masih cenderung terbatas akibat penyesuaian administrasi awal tahun dan proses pengadaan. Peningkatan serapan belanja di TW III menjadi indikator penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, serta mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui kegiatan belanja pemerintah.

Secara keseluruhan, dinamika belanja hingga TW IV 2025 menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat ruang akselerasi pada TW IV untuk memastikan realisasi anggaran mencapai tingkat optimal. Upaya percepatan penyerapan belanja modal dan peningkatan kualitas belanja operasional menjadi kunci agar APBD dapat

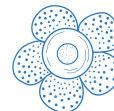
memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih maksimal bagi masyarakat Bengkulu.

Realisasi belanja operasi tumbuh positif pada Tahun 2025. Belanja operasi pemerintah se-Provinsi Bengkulu hingga Triwulan IV 2025 terkoreksi 18,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja operasi pada periode ini mencapai Rp2,307,57 miliar, atau tumbuh 23,42% (yoy). Kenaikan ini menandakan meningkatnya aktivitas layanan publik dan operasional pemerintahan yang mulai bergerak cepat pada semester kedua.

Komponen terbesar dalam belanja operasi masih berasal dari belanja pegawai, dengan realisasi Rp4.687,18 miliar dan pertumbuhan terkoreksi 7,00% (yoy). Pangsa belanja pegawai yang mencapai lebih dari separuh total belanja operasi menunjukkan bahwa walau terdapat kebijakan efisiensi anggaran, struktur fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan aparatur dan layanan dasar. Di sisi lain, belanja barang dan jasa pada tahun 2025 mengalami koreksi lebih dalam, hingga 26,48% (yoy) dengan realisasi Rp2.156,06 miliar, mencerminkan mulai intensifnya pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Triwulan III.

Komponen belanja hibah dan bantuan sosial juga mengalami perlambatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Belanja hibah turun hingga 77,17% (yoy), sedangkan belanja bantuan sosial merosot tajam sebesar 77,46% (yoy). Penurunan kedua komponen ini mengindikasikan penyesuaian prioritas pemerintah daerah yang lebih berfokus pada operasional, layanan





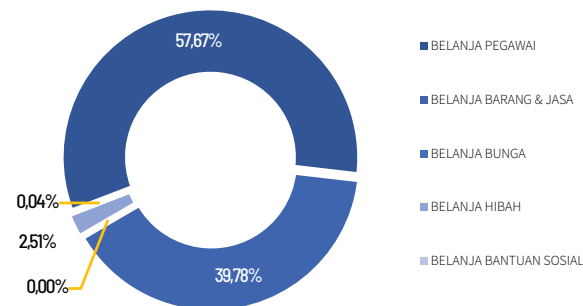
publik, dan percepatan kegiatan pembangunan ditengah pengetatan anggaran fiskal.

Realisasi belanja modal Provinsi Bengkulu tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif terbatas, dengan realisasi sebesar Rp1.002,67 miliar atau 45,97% dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 39,46% (yoy). Serapan yang melemah ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan proyek fisik pada sebagian besar daerah, terutama akibat proses pengadaan dan penyesuaian kontraktual yang masih berlangsung.

Berdasarkan komponennya, belanja modal tahun 2025 didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yang mencapai Rp566,42 miliar atau menyumbang 56,49% dari total belanja modal. Komponen ini menjadi pendorong utama kegiatan pembangunan fisik, terutama untuk peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar di berbagai kabupaten/kota. Selanjutnya, belanja modal peralatan dan mesin berkontribusi sebesar Rp184,44 miliar atau 18,39%, mencerminkan kinerja sarana operasional pemerintah daerah dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Belanja modal gedung dan bangunan mencapai Rp181,84 miliar atau 18,14 %, menunjukkan aktivitas pembangunan atau rehabilitasi fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya. Komponen belanja modal lainnya masih relatif kecil, dengan nilai Rp69,97 miliar atau 6,98 %, yang mencakup pengadaan aset fisik lain di luar kategori utama. (Grafik 2.6).

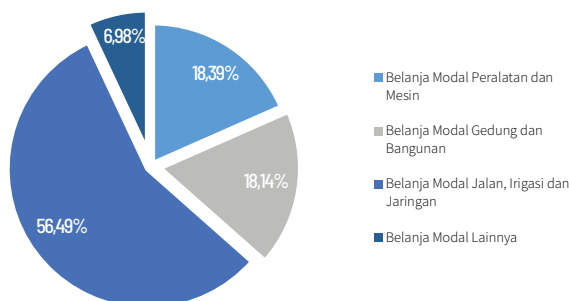
Belanja transfer pemerintah se-Provinsi Bengkulu tahun 2025 menunjukkan kinerja yang terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp1.472,69 miliar, terkoreksi 19,57% (yoy). Terbatasnya realisasi ini mencerminkan melemahnya dukungan keuangan pemda kepada pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta penerima lain yang menjalankan program pelayanan publik dan komunitas.



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.5

Komposisi Realisasi Belanja Operasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 2.6

Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2025

2.2 REALISASI BELANJA APBN PROVINSI BENGKULU

Realisasi belanja APBN tahun 2025 di Provinsi Bengkulu tercatat melambat dibandingkan periode tahun sebelumnya. Total Belanja Negara hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp15.107,71 miliar, atau 96,83% dari pagu anggaran sebesar Rp15.601,97 miliar. Capaian tersebut terkoreksi sebesar 8,69% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, menurunnya belanja tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pagu belanja negara, khususnya pada komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seiring dengan kebijakan efisiensi fiskal serta perubahan prioritas belanja pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025.

Realisasi belanja APBN melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi TKDD mencapai Rp10.106,46 miliar





atau 97,73% dari pagu anggaran, terkoreksi 7,98% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp10.983,02 miliar. Pangsa transfer TKDD sendiri mencapai 66,90% dari total belanja APBN, menunjukkan bahwa dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah masih kuat dalam struktur belanja di Provinsi Bengkulu.

Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp6.413,97 miliar atau 98,53% dari pagu. Meskipun terkoreksi sebesar 2,69% (yoy), kondisi ini menunjukkan bahwa DAU tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat menurun sebesar 21,05% (yoy) pada tahun 2025, dengan total realisasi sebesar Rp1.932,12 miliar. Penurunan ini utamanya didorong oleh kontraksi DAK Fisik yang mencapai 63,66% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp385,39 miliar, sejalan dengan penyesuaian alokasi belanja pembangunan yang bersumber dari APBN.

Lebih lanjut, kinerja belanja APBN dimaksud secara umum masih ditopang oleh transfer ke daerah dengan realisasi Rp9.153,47 miliar atau 98,37% dari pagu anggaran, terkontraksi 7,53% (yoy) secara tahunan. Hal ini didorong oleh realisasi penyaluran Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah yang masing-masing turun sebesar 6,98% dan 74,00% (yoy), dengan realisasi berada pada angka Rp9.153,47 dan Rp952,99 miliar pada 2025.

Di sisi lain, peningkatan realisasi DAK Non Fisik menahan penurunan DAK lebih dalam. Realisasi DAK Non Fisik justru mengalami peningkatan sebesar 11,55% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.546,63 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran anggaran yang mendukung pelaksanaan program layanan dasar pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga turut menopang pembiayaan berbagai layanan publik di daerah.

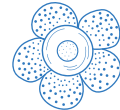
Lebih lanjut, kinerja penyaluran Dana Insentif Daerah pada tahun 2025 terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp20,82 miliar atau 99,98% dari pagu anggaran. Meskipun tingkat penyerapan hampir mencapai 100%, jumlah tersebut menurun signifikan secara tahunan, yakni terkontraksi sebesar 74% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan pagu alokasi Dana Insentif Daerah secara nasional serta penyesuaian skema insentif fiskal pemerintah pusat.

Selanjutnya, pada 2025 Dana Desa tercatat terealisasi sebesar Rp952,99 miliar atau 91,91% dari pagu anggaran, menurun sebesar 12,14% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi Dana Desa secara nasional serta dinamika penyaluran yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaporan oleh pemerintah desa.

Secara keseluruhan, terkoreksinya TKDD pada tahun 2025 mencerminkan adanya penyesuaian alokasi transfer pemerintah pusat kepada daerah pada beberapa komponen belanja, khususnya yang bersifat berbasis program dan insentif. Meskipun demikian, tingginya rasio realisasi terhadap pagu menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di daerah tetap berjalan optimal sehingga dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu tetap terjaga.

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Bengkulu pada 2025 juga cenderung melambat dengan realisasi mencapai Rp5.001,25 miliar atau 95,07% dari pagu. Kondisi ini melambat 10,08% (yoy) dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kinerja ini menandakan berkurangnya intensitas kegiatan pemerintah pusat pada tahun 2025, terutama terkait pelayanan publik, program nasional berbasis wilayah, serta pembangunan infrastruktur.




Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBN Provinsi Bengkulu sampai dengan Desember 2025 (Rp Miliar)

BELANJA APBN	2024			2025			% PERTUMBUHAN (YOY)
	(RP MILIAR)		% REALISASI	(RP MILIAR)		% REALISASI	
	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.964,92	5.561,80	93,24%	5.260,37	5.001,25	95,07%	-10,08%
BELANJA PEGAWAI	2.076,72	2.104,56	101,34%	2.070,64	1.689,86	81,61%	-19,70%
BELANJA BARANG	2.934,92	2.553,73	87,01%	1.674,45	903,36	53,95%	-64,63%
BELANJA MODAL	931,25	881,48	94,66%	977,50	413,33	42,28%	-53,11%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	22,03	22,03	100,00%	24,11	14,90	61,81%	-32,36%
BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	11.154,46	10.983,02	98,46%	10.341,60	10.106,46	97,73%	-7,98%
TRANSFER KE DAERAH	10.067,77	9.898,35	98,32%	9.304,74	9.153,47	98,37%	-7,53%
A. DANA PERIMBANGAN	9.969,15	9.818,26	98,49%	9.283,91	9.132,65	98,37%	-6,98%
1) DANA ALOKASI UMUM	6.669,55	6.591,20	98,83%	6.509,87	6.413,91	98,53%	-2,69%
2) DANA BAGI HASIL	779,72	779,64	99,99%	822,05	786,61	95,69%	0,89%
3) DANA ALOKASI KHUSUS	2.519,89	2.447,41	97,12%	1.951,99	1.932,12	98,98%	-21,05%
* DAK FISIK	1.089,24	1.060,87	97,40%	397,94	385,49	96,87%	-63,66%
* DAK NON FISIK	1.430,65	1.386,54	96,92%	1.554,05	1.546,63	99,52%	11,55%
B. DANA INSENTIF DAERAH	98,62	80,09	81,21%	20,83	20,82	99,98%	-74,00%
DANA DESA	1.086,69	1.084,67	99,81%	1.036,86	952,99	91,91%	-12,14%
JUMLAH BELANJA NEGARA	17.119,38	16.544,82	96,64%	15.601,97	15.107,71	96,83%	-8,69%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, diolah





BOKS 2

PENURUNAN TKDD PROVINSI BENGKULU 2026: PENYESUAIAN FISKAL DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2026 tercatat turun sekitar Rp347,93 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi salah satu variabel penting dalam penyusunan APBD 2026, mengingat porsi dana transfer masih memegang peran dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi APBD Provinsi Bengkulu relatif terjaga, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja. Namun, struktur pendapatan yang masih ditopang oleh dana transfer pusat membuat setiap gejolak langsung berdampak pada kapasitas belanja. Ketika dana transfer berkurang, ruang untuk membiayai program prioritas juga turut terbatas.

PENYESUAIAN PADA STRUKTUR BELANJA

Dampak awal dari penurunan TKDD terlihat pada kebutuhan penataan ulang komposisi belanja. Porsi belanja pegawai dan belanja wajib lainnya yang relatif besar membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan secara drastis. Dengan kondisi tersebut, penyesuaian lebih banyak diarahkan pada belanja yang dinilai dapat ditunda atau dikurangi tanpa mengganggu fungsi pelayanan dasar.

Konsekuensinya, belanja modal dan beberapa program pembangunan berpotensi mengalami perlambatan. Proyek infrastruktur provinsi, peningkatan kualitas konektivitas wilayah, serta dukungan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan perlu disusun ulang skalanya agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal terbaru.

Situasi ini tidak hanya menyangkut angka dalam APBD, tetapi juga ritme pelaksanaan pembangunan. Penundaan proyek atau pengurangan cakupan kegiatan dapat

memengaruhi arus belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah

IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Penyesuaian anggaran juga tercermin dalam kebijakan internal pemerintahan. Sejak awal 2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan skema kerja di mana ASN diwajibkan hadir di kantor tiga hari dalam seminggu, sementara dua hari lainnya dapat bekerja dari lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*). Kebijakan ini sebagai bentuk strategi efisiensi belanja operasional, termasuk pengurangan biaya listrik, konsumsi, dan kebutuhan administrasi lainnya ditengah ruang fiskal yang menyempit.

Selain pengaturan pola kerja, penyesuaian pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga menjadi bagian dari upaya menekan beban anggaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penurunan dana transfer tidak hanya berdampak pada program pembangunan, tetapi juga pada struktur pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Meski demikian, efektivitas layanan publik tetap menjadi perhatian utama. Pola kerja yang lebih fleksibel memerlukan penguatan sistem koordinasi dan pengawasan agar tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam jangka pendek, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan disiplin kinerja aparat.

IMPLIKASI TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI DAERAH

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. Ketika kapasitas belanja menurun atau tertahan, dampaknya dapat merambat pada sektor konstruksi, jasa, hingga pelaku usaha lokal yang terlibat dalam proyek pemerintah.

Penurunan TKDD berpotensi menekan laju pertumbuhan belanja modal, yang selama ini berkontribusi terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB) daerah. Jika tidak dikelola secara terarah, kondisi ini dapat memperlambat perbaikan infrastruktur dan mengurangi efek pengganda terhadap sektor-sektor terkait.

Namun demikian, dampak tersebut tidak bersifat otomatis. Besarnya pengaruh

STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS PENDAPATAN DAERAH

Di tengah penurunan TKDD, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi semakin penting, memberikan ruang bagi penguatan kapasitas fiskal daerah secara bertahap.

Optimalisasi PAD tidak selalu identik dengan kenaikan tarif pajak atau retribusi. Perbaikan sistem pemungutan, pembaruan basis data wajib pajak, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dapat menjadi langkah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif juga dapat memperluas sumber penerimaan daerah dalam jangka menengah.

MENYEIMBANGKAN PRIORITAS DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

Penurunan TKDD Provinsi Bengkulu pada 2026 merupakan tantangan yang menuntut penyesuaian menyeluruh dalam pengelolaan APBD. Dampaknya tidak hanya terlihat pada angka pendapatan, tetapi juga pada komposisi belanja, kebijakan internal pemerintahan, hingga dinamika ekonomi daerah. Ke depan, ketahanan fiskal provinsi akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara belanja prioritas dan kapasitas pendapatan yang tersedia. Dengan perencanaan yang realistis serta pelaksanaan yang konsisten, tekanan fiskal ini dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.



BAB 3



PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Triwulanan Provinsi Bengkulu (yoy)



2,77%
Tw IV 2025

2,57%
Tw III 2025

Inflasi Bulanan Provinsi Bengkulu (mtm)



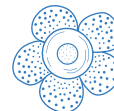
0,43% mtm
Des

0,04% mtm
Nov

Indeks Harga Konsumen Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy). Besaran ini meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,57% (yoy). Inflasi pada triwulan IV 2025 utamanya dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,27% (yoy) dengan komoditas pendorong utama cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM).

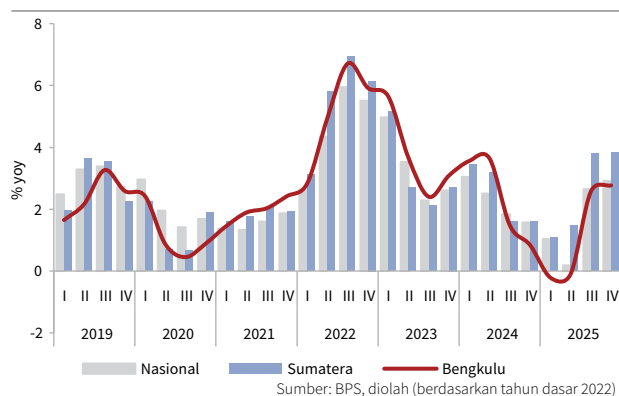
- Inflasi lebih tinggi pada triwulan IV 2025 didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan base year effect, dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya harga cabai merah sangat rendah.
- Pada triwulan I 2026, Provinsi Bengkulu diperkirakan mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Hal ini didorong kenaikan permintaan terutama pangan bergejolak seiring HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh di bulan Maret atau akhir triwulan I 2026.





3.1 INFLASI TRIWULANAN

Realisasi inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat deflasi sebesar 2,57% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional dan regional Sumatera yang tercatat masing-masing sebesar 2,92% (yoy) dan 3,82% (yoy).



Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Nasional, Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu (% yoy)

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (andil 2,27% yoy); diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (andil 0,52% yoy); kelompok transportasi (andil 0,23% yoy); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (andil 0,12% yoy); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (andil 0,10% yoy); kelompok pakaian dan alas kaki (andil 0,04% yoy); kelompok kesehatan (andil 0,02% yoy); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (andil masing-masing ~0% yoy).

Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi lebih tinggi yaitu kelompok pendidikan (andil -0,50% yoy) dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (andil -0,03% yoy) (Tabel 3.1).

Penyebab utama inflasi Provinsi Bengkulu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan pendorong inflasi utama adalah komoditas cabai merah. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh *base year effect*, dimana harga cabai merah pada periode yang sama di

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok

KELOMPOK	INFLASI TAHUNAN TW IV 2025 (% YOY)			ANDIL INFLASI TAHUNAN TW IV 2025 (% YOY)		
	OKT	NOV	DES	OKT	NOV	DES
UMUM	2,85	2,68	2,77	2,85	2,68	2,77
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	7,64	6,94	7,05	2,42	2,22	2,27
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1,23	1,03	0,70	0,07	0,06	0,04
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,55	0,64	0,64	0,08	0,10	0,10
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RT	-0,29	~0	-0,07	-0,01	~0	~0
KESEHATAN	1,22	1,36	1,04	0,03	0,03	0,02
TRANSPORTASI	1,18	1,42	1,74	0,16	0,19	0,23
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0,06	0,07	0,07	~0	~0	~0
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	-0,69	-1,52	-1,60	-0,01	0,03	-0,03
PENDIDIKAN	-9,55	-9,55	-9,55	-0,50	-0,50	-0,50
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	1,47	1,26	1,26	0,14	0,12	0,12
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	8,52	8,95	9,56	0,47	0,49	0,52

Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

tahun sebelumnya mengalami deflasi sangat rendah karena panen raya di tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, inflasi turut didorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama disumbangkan oleh komoditas emas perhiasan seiring tren kenaikan harga emas dunia yang berlanjut. Harga emas dunia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat USD4152,13 per *troy ounce*, meningkat sekitar 20,07% dibandingkan akhir triwulan III 2025 senilai USD3458,20 per *troy ounce*. (Sumber: bloomberg).

Kontributor penahan inflasi terbesar di Provinsi Bengkulu berasal dari kelompok pendidikan, seiring penurunan biaya sekolah setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur No. 00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, yang pada pokoknya menginstruksikan satuan pendidikan untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam, uang buku tertentu, maupun iuran dalam bentuk apapun pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya turut menyumbang deflasi yang dipengaruhi mainan anak dan makanan hewan peliharaan masing-masing sebesar 0,01% (yoy).



**Tabel 3.2** Komoditas Penyumbang Inflasi Triwulan IV 2025

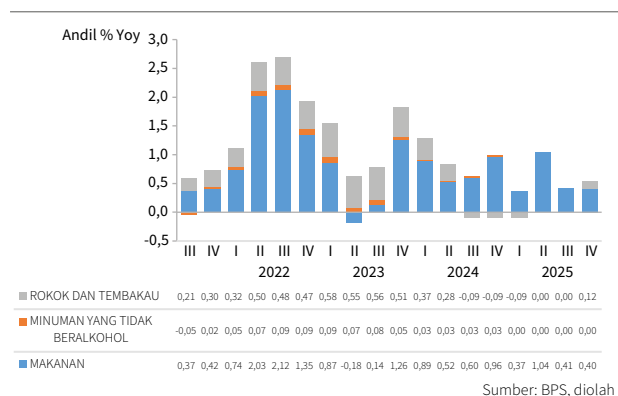
INFLASI		DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (% YOY)	KOMODITAS	ANDIL (% YOY)
OKTOBER 2025			
Emas Perhiasan	0,13	Bawang Merah	-0,05
Cabai Merah	0,13	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	-0,03
Udang Basah	0,03	Terong	-0,02
Kopi Bubuk	0,02	Tomat	-0,02
Roti Manis	0,01	Beras	-0,02
NOVEMBER 2025			
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	0,05	Cabai Merah	-0,12
Angkutan Udara	0,04	Jengkol	-0,03
Emas Perhiasan	0,03	Beras	-0,03
Ikan Tuna	0,03	Tomat	-0,02
Bawang Merah	0,02	Makanan Hewan Peliharaan	-0,01
DESEMBER 2025			
Daging Ayam Ras	0,18	Jengkol	-0,02
Bawang Merah	0,09	Udang Basah	-0,02
Cabai Merah	0,06	Ikan Tuna	-0,02
Cabai Rawit	0,05	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	-0,01
Emas Perhiasan	0,04	Kentang	-0,01

Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

3.2 INFLASI TAHUNAN (YOY)

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 7,05% (yoy). Kondisi ini sedikit melandai dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang mengalami inflasi sebesar 7,17% (yoy). Dari tiga sub kelompok, seluruh sub kelompok mengalami inflasi dengan sub kelompok makanan sebesar 8,86% (yoy), sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 2,49% (yoy) dan sub kelompok rokok dan tembakau yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,78% (yoy) pada periode triwulan laporan (Grafik 3.2).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2

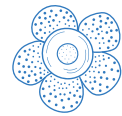
Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (% yoy)

Sub kelompok makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 8,86% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 8,17% (yoy). Inflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras dipengaruhi peningkatan permintaan pada periode HBKN Nataru dan Libur Sekolah. Kenaikan daging ayam ras disebabkan berkurangnya stok dan pasokan dari dalam dan luar wilayah Bengkulu. Lebih lanjut, perluasan penerima MBG turut mendorong permintaan. Selain itu, kenaikan turut dipicu oleh adanya kenaikan harga pakan ternak.

Di sisi lain, jengkol dan tomat menahan inflasi lebih tinggi dipengaruhi banyaknya pasokan karena panen di berbagai daerah sentra lokal Kab Kepahiang Kab Rejang Lebong.

Selanjutnya, sub kelompok minuman tidak beralkohol mengalami tekanan inflasi sebesar 2,49% (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,66% (yoy). Pendorong inflasi dari subkelompok ini yakni minuman kesegaran dan teh.

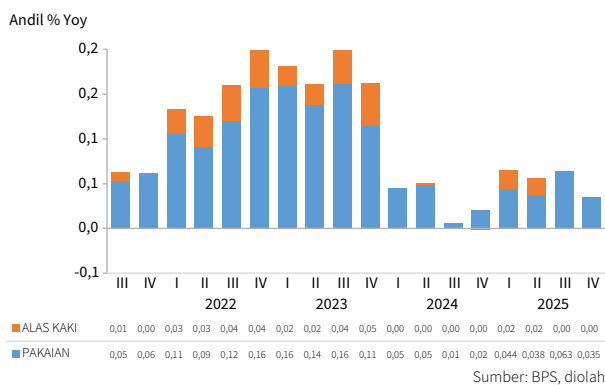




Tekanan inflasi pada sub kelompok rokok dan tembakau tercatat sebesar 3.63% (yoy) atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,78% (yoy). Tekanan yang terjadi pada sub kelompok ini terutama didorong kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM). Kenaikan komoditas pada sub kelompok ini sejalan dengan PMK No. 96 tahun 2024 dan PMK No. 97 tahun 2024 mengenai penyesuaian tarif cukai hasil tembakau secara gradual sebesar 10,0% sepanjang 2025.

Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Penyesuaian harga seragam sekolah anak mendorong tekanan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki pada triwulan IV 2025. Inflasi kelompok pakaian dan alas kaki pada periode laporan tercatat sebesar 1,23% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 0,64% (yoy). Seluruh subkelompok mengalami inflasi, dengan pendorong utama berasal dari seragam sekolah anak, ongkos jahit, seragam sekolah pria, dan seragam sekolah wanita.



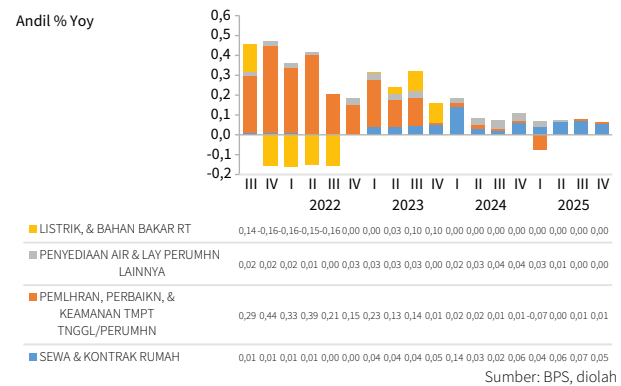
Grafik 3.3

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (% yoy)

Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kenaikan tarif sewa rumah mendorong tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada triwulan IV 2025. Tekanan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar tercatat sebesar 0,55% (yoy), sedikit melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,64% (yoy). Tekanan inflasi didorong oleh sub kelompok sewa dan kontrak rumah, sub kelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal, dan sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah

tangga. Sedangkan subkelompok yang tidak mengalami perubahan yakni subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya.



Grafik 3.4

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT (% yoy)

Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Penurunan harga pengharum cucian, sabun cair, dan pembersih lantai mehanan tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada triwulan IV 2025. Kelompok ini pada triwulan IV 2025 mengalami deflasi sebesar 0,29% (yoy), tidak sedalam triwulan III 2025 yang deflasi sebesar 0,34% (yoy). Deflasi terdalam dialami oleh subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar -1,16% (yoy), sedangkan deflasi terendah terjadi pada subkelompok tekstil rumah tangga sebesar -0,04%. Subkelompok yang menahan deflasi lebih dalam yakni subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,71% (yoy) dan subkelompok tekstil rumah tangga sebesar 0,04% (yoy). Komoditas yang mengalami deflasi diantaranya pembersih lantai, sabun cair/cuci piring, dan pengharum cucian/pelembut. Di sisi lain, komoditas yang mengalami inflasi yakni upah asisten rumah tangga.



Grafik 3.5

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT (%yoy)

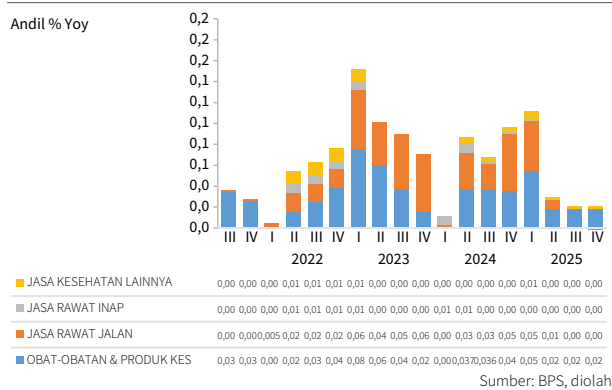




Inflasi Kelompok Kesehatan

Tekanan inflasi kelompok kesehatan pada triwulan IV 2025 melandai dibandingkan triwulan IV 2025 dipicu sub kelompok jasa kesehatan lainnya.

Tekanan inflasi kelompok kesehatan pada triwulan IV 2025 tercatat melandai, menjadi sebesar 1,22% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 1,29% (yoy). Inflasi disumbangkan oleh sub kelompok jasa kesehatan lainnya, sub kelompok jasa rawat inap, sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan lainnya, dan sub kelompok jasa rawat jalan. Kenaikan dipicu adanya penyesuaian tarif *check up* seiring kenaikan biaya operasional rumah sakit.

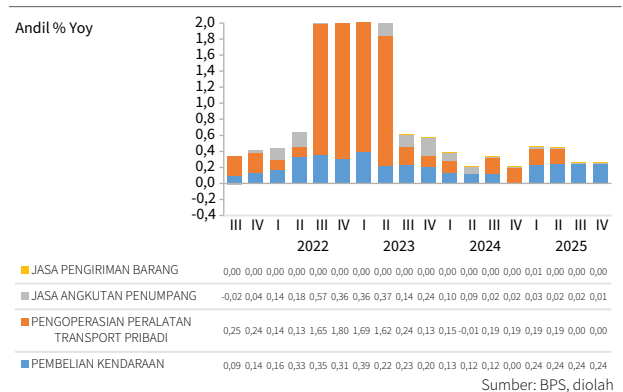


Grafik 3.6

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Kesehatan

Inflasi Kelompok Transportasi

Inflasi kelompok transportasi triwulan IV 2025 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dipengaruhi penyesuaian harga kendaraan roda dua dan roda empat. Kelompok transportasi pada triwulan IV 2025 mencatat inflasi sebesar 1,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 0,67% (yoy). Penyumbang inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh sub kelompok pembelian kendaraan dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Di sisi lain, tekanan inflasi diredam oleh subkelompok jasa angkutan penumpang. Inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara pada periode pelaporan terutama pada bulan Desember 2025, dimana beberapa maskapai memberikan promo pada periode akhir tahun.

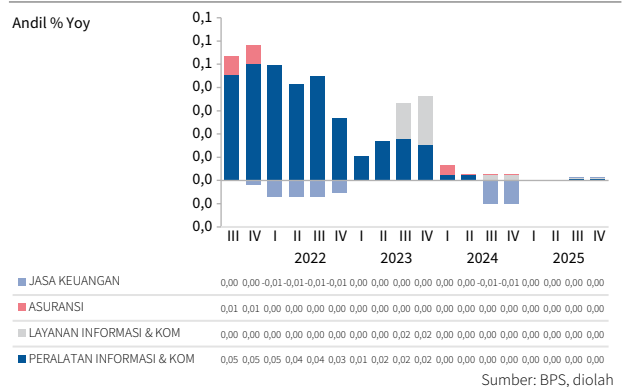


Grafik 3.7

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada periode laporan mengalami inflasi yang relatif kecil. Kelompok ini pada triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 0,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat inflasi sebesar 0,05% (yoy). Inflasi kelompok ini bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi dan subkelompok jasa keuangan. Sedangkan subkelompok layanan informasi dan komunikasi tidak mengalami perubahan.



Grafik 3.8

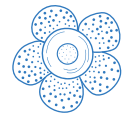
Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (% yoy)

Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

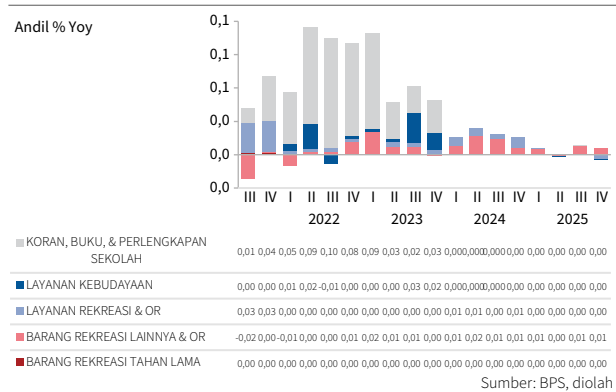
Inflasi kelompok rekreasi, olahraga dan budaya meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tekanan inflasi kelompok ini pada periode laporan tercatat sebesar 0,69% (yoy). Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 0,51% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh sub kelompok layanan kebudayaan dan subkelompok koran, buku, dan





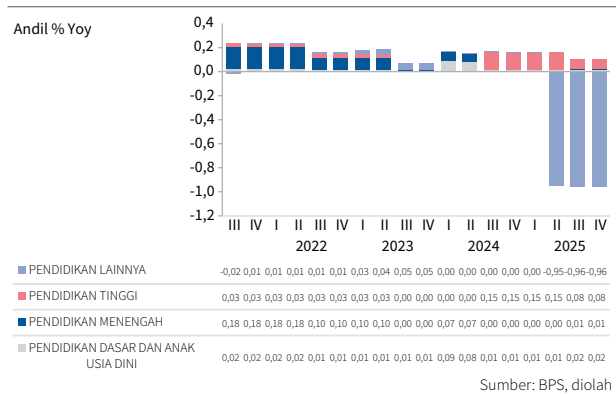
perlengkapan sekolah. Di sisi lain, subkelompok layanan rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan pada periode laporan. Komoditas kelompok ini tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan. Sub kelompok yang mengalami deflasi yakni subkelompok mainan anak dan makanan peliharaan masing-masing sebesar 0,01% (yoy).



Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya (% yoy)

Inflasi Kelompok Pendidikan

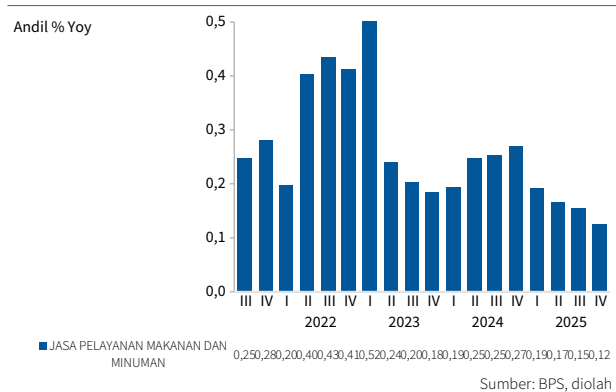
Tekanan inflasi kelompok pendidikan pada triwulan IV 2025 mengalami deflasi signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi deflasi kelompok pendidikan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar -9,55% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,77% (yoy). Subkelompok yang mengalami deflasi pada periode ini adalah subkelompok pendidikan menengah. Sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi yakni subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, subkelompok pendidikan tinggi, dan subkelompok pendidikan lainnya. Deflasi signifikan pada periode ini dipengaruhi oleh Surat Edaran Gubernur No. 00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, dimana sekolah diminta untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam dan uang buku tertentu serta iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).



Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran melandai pada triwulan IV 2025. Inflasi tercatat sebesar 1,47% (yoy), melandai dibandingkan 1,57% (yoy) pada triwulan III 2025. Komoditas yang dominan memberikan dorongan inflasi adalah ketupat/lontong sayur, nasi dengan lauk, mie, kue kering berminyak, bakso siap santap, dan kopi siap saji.



Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

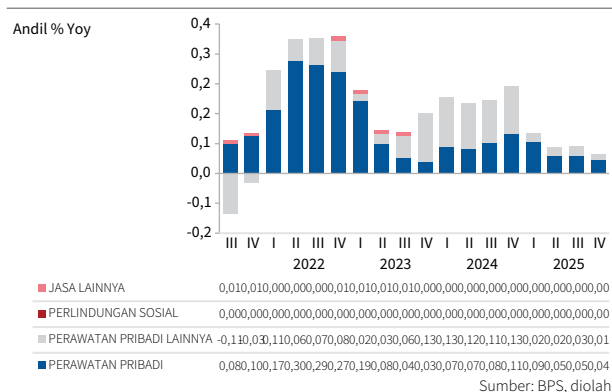
Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi tercatat sebesar 8,52% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,03 % (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan utamanya pada sub kelompok perawatan pribadi lainnya yaitu pada komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,47% (yoy). Adapun hal ini seiring permintaan emas sebagai *safe haven* di tengah





ketidakpastian global. Pada akhir triwulan IV 2025 tercatat Rp2.501.000/gram, meningkat 12% dibandingkan akhir triwulan III 2025 senilai Rp2.234.000/gram (Sumber: www.harga-emas.org).



Grafik 3.12

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

3.3 INFLASI BULANAN (MTM)

Inflasi Bulan Oktober Melandai

Emas Perhiasan Dorong Inflasi Periode Oktober 2025. IHK Provinsi Bengkulu pada Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,97% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,12% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm).

Secara tahunan, pada Oktober 2025 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,85 % (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 2,86% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,34% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,42% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu cabai merah sebesar 1,14% (yoy). Hal ini disebabkan oleh hasil

produksi cabai merah yang disebabkan cuaca kurang baik. Lebih lanjut, harga cabai pada periode yang sama di tahun 2024 relatif rendah sehingga menyebabkan inflasi tahunan relatif tinggi. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Oktober 2025 terutama disebabkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil (mtm) sebesar 0,15%. Komoditas yang dominan menyumbang andil inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan sebesar 0,13% (mtm). Hal ini didorong oleh kenaikan harga emas dunia yang dipengaruhi berbagai faktor pendukung seperti peningkatan permintaan masyarakat terhadap aset safe haven. Lebih lanjut, inflasi turut didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,03% (mtm) dengan komoditas pendorong utama yakni cabai merah yang dipengaruhi penurunan hasil produksi akibat cuaca yang kurang baik sepanjang Oktober 2025. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi ditahan komoditas bawang merah dengan andil sebesar -0,05% (mtm). Penurunan harga bawang merah dipengaruhi membaiknya pasokan karena panen di daerah sentra lokal di Kab Kepahiang dan daerah sentra Jawa Tengah.

Inflasi Melandai pada Bulan November

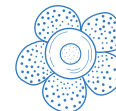
Normalisasi Tarif Angkutan Udara Dorong Inflasi Periode November 2025. IHK Provinsi Bengkulu pada November 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,18% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,18% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,17% (mtm).

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Bulanan

OKT 2025	INFLASI (MTM) 0,18%	NOV 2025	INFLASI (MTM) -0,26%	DES 2025	INFLASI (MTM) -0,53%	JAN 2025	DEFLASI (MTM) 0,75%
KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLASI	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLASI	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLASI	(ANDIL % MTM)
EMAS PERHIASAN	0,13	CABAI MERAH	0,18	CABAI MERAH	0,62	CABAI MERAH	-0,76
CABAI MERAH	0,13	BAWANG MERAH	0,07	DAGING AYAM RAS	0,20	DAGING AYAM RAS	-0,14
UDANG BASAH	0,03	IKAN DENCIS	0,04	ANGKUTAN UDARA	0,08	BAWANG MERAH	-0,07

Sumber: BPS, diolah





Secara tahunan, pada November 2025 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 2,72% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,19% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,22% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu cabai merah sebesar 1,02% (yoy). Hal ini disebabkan oleh hasil produksi cabai merah yang disebabkan cuaca kurang baik. Lebih lanjut, harga cabai pada periode yang sama di tahun 2024 relatif rendah sehingga menyebabkan inflasi tahunan relatif tinggi. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan November 2025 terutama disebabkan oleh kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,04% (mtm). Komoditas yang menjadi pendorong utama yakni tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,04% (mtm) dipengaruhi berakhirnya periode promo tiket pesawat dan normalisasi tarif tiket pesawat. Di samping itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut mendorong inflasi dengan andil (mtm) sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan menyumbang andil inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan sebesar 0,03% (mtm). Hal ini didorong oleh kenaikan harga emas dunia yang dipengaruhi berbagai faktor pendukung seperti peningkatan permintaan masyarakat terhadap aset *safe haven*. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi ditahan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar -0,05% (mtm) dengan komoditas penahan utama yakni cabai merah yang dipengaruhi normalisasi pasca kenaikan harga harga akibat membaiknya hasil panen di daerah sentra pada periode November.

Inflasi Meningkat Pada Bulan Desember

Kenaikan harga Daging Ayam Ras Dorong Inflasi Periode Desember 2025. IHK Provinsi Bengkulu pada Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,43%

(mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,04% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,34% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm).

Secara tahunan, pada Desember 2025 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 2,92% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,23% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,27% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu cabai merah sebesar 0,97% (yoy). Hal ini disebabkan *base-year effect*, dimana pada periode yang sama di tahun 2024, harga cabai merah sangat rendah, disebabkan panen raya yang terjadi pada periode tersebut. . Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Desember 2025 terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,39% (mtm). Komoditas yang menjadi pendorong utama yakni daging ayam ras dengan andil sebesar 0,18% (mtm) dipengaruhi kenaikan permintaan daging ayam ras seiring semakin masifnya perluasan MBG dan terdapat kenaikan permintaan di HBKN Nataru. Di samping itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut mendorong inflasi dengan andil (mtm) sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan menyumbang andil inflasi pada kelompok ini yakni emas perhiasan sebesar 0,04% (mtm). Hal ini didorong oleh kenaikan harga emas dunia yang dipengaruhi berbagai faktor pendukung seperti peningkatan permintaan masyarakat terhadap aset *safe haven*. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi ditahan oleh kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar -0,02% (mtm) dengan komoditas penahan utama yakni celana panjang jeans pria dengan andil sebesar -0,01%





(mtm) dipengaruhi diskon/promo akhir tahun, terutama di *to-e-commerce* sehingga penjual retail harus bertahan dan bersaing dengan turut menurunkan harga.

Kondisi Inflasi bulan Januari dan prakiraan triwulan I 2026

Pasokan Cabai Merah yang Membaik Sebabkan Deflasi Periode Januari 2026. IHK Provinsi Bengkulu pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,43% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -0,40% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar -0,15% (mtm).

Secara tahunan, pada Januari 2026 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 3,55% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 1,84% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,65% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu tarif listrik sebesar 1,56% (yoy). Hal ini disebabkan *base-year effect*, dimana pada periode yang sama di tahun 2025, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% pada pelanggan PLN dengan daya <1.300 VA. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

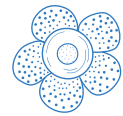
Berdasarkan kelompoknya, deflasi pada bulan Januari 2026 terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar -0,88% (mtm). Komoditas yang menjadi penyebab utama deflasi yakni cabai merah dengan andil sebesar -0,76% (mtm) dipengaruhi normalisasi permintaan pasca kenaikan di periode HBKN Nataru. Lebih lanjut, penurunan harga signifikan dipengaruhi panen pasokan cabai merah di daerah sentra yakni Rejang Lebong, Kepahiang dan

Seluma. Distribusi pasokan juga membaik seiring cuaca yang bersahabat. Di samping itu, kelompok transportasi turut mempengaruhi deflasi dengan andil (mtm) sebesar -0,04%. Komoditas yang dominan menyumbang andil deflasi pada kelompok ini yakni bensin sebesar -0,04% (mtm) dan angkutan udara sebesar -0,02% (mtm). Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada bulan Januari 2026. Di sisi lain, deflasi lebih dalam ditahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,16% (mtm) dengan komoditas penahan utama yakni emas perhiasan dengan andil sebesar 0,12% (mtm) dipengaruhi kenaikan harga komoditas emas dunia yang didorong peningkatan permintaan aset *safe haven* ditengah ketidakpastian global dan konflik geopolitik.

IHK Provinsi Bengkulu pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 3,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 4,76% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,10% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,20% (yoy) dan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu tarif listrik sebesar 2,11% (yoy).

Kondisi tersebut disebabkan *base-year effect*, dimana pada periode yang sama di tahun 2025, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% pada pelanggan PLN dengan daya <1.300. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Di sisi lain, inflasi lebih tinggi ditahan oleh berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bengkulu seperti Pasar Murah dan Edukasi Belanja Bijak terus didorong untuk dapat menjaga ekspektasi konsumen dalam periode ini dan menahan inflasi yang lebih tinggi.



3.4 AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI (TPID)

TPID Provinsi Bengkulu senantiasa mengupayakan beberapa langkah preventif dalam rangka menjaga laju tekanan inflasi agar tetap rendah dan stabil.

Untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), upaya pengendalian inflasi disusun berdasarkan *roadmap* periode 2025-2027 dengan prioritas strategi pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang didukung ekosistem yang lebih kondusif dan ketersediaan data yang akurat dalam kerangka 4K.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan pada triwulan III 2025, meliputi:

1) Ketersediaan Pasokan

- a. (13/11) — Capacity Building TPID Seluruh Indonesia Semester II 2025 di Batam mengenai “Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga melalui Inovasi Program Intervensi dan Optimalisasi Sinergi Pusat-Daerah”.
- b. (27/11) — High Level Meeting TPID Kabupaten Bengkulu Utara bertajuk “Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. (03/12) — High Level Meeting TPID Kabupaten Bengkulu Selatan – Pengendalian Inflasi & Penguatan Ketahanan Pangan 2025–2026 yang dipimpin oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin.
- d. (04/12) — High Level Meeting TPID Kabupaten Kepahiang – Pengendalian Inflasi & Penguatan Ketahanan Pangan Menjelang Nataru 2025/2026 yang dipimpin oleh Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata S.IP.
- e. (15/12) — Pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – Pengendalian Inflasi dan Penguatan Digitalisasi Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Pj. Sekda Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan

dirangkaikan pula dengan Penguatan sisi permintaan melalui penyerahan simbolis buku resep diversifikasi pangan, Penguatan sisi pasokan melalui Pemberdayaan Pesantren untuk pengendalian Inflasi (TRENDI), MoU penyerapan hasil TRENDI Pesantren Produktif dengan SPPG Regional Provinsi Bengkulu, dan Penguatan kelancaran distribusi melalui Ado Galo Mobile. Beberapa rangkaian kegiatan tsb diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu yang lebih baik di tahun 2026.

2) Keterjangkauan Harga

- a. (09/10) — Sidak Pasar Bengkulu Tengah yang dipimpin Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Wakapolres, Kajari, dan BPS Bengkulu Tengah.
- b. (17/12) — Pelaksanaan Sidak Pasar oleh Wakil Gubernur Bengkulu dan didampingi oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu d.r. meninjau keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan menjelang HBKN Nataru 2025.
- c. (23/12) — Puncak pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” (Pasar Murah Membantu Rakyat) TPID Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali setiap hari Senin dan Selasa sepanjang bulan Desember menjelang Nataru.
- d. Setiap Akhir Pekan — Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Malam Berbinar Bengkulu Tengah yang digelar setiap akhir pekan.
- e. Setiap Selasa dan Kamis — Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis di Kota Bengkulu.
- f. Setiap Senin —Sinergi BI dan TNI/Polri dalam pelaksanaan rutin GPM/penjualan murah di markas TNI/Polri (Yon TP 847, Kodim Kota Bengkulu, Kodim Seluma) sebagai perluasan jangkauan intervensi.
- g. “PASRAH MEMBARA” (Pasar Murah Membantu Rakyat) yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bengkulu setiap hari Senin dan Selasa sepanjang Desember 2025 menjelang Nataru, untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, dimana Pasar Murah dilaksanakan di daerah yang





dekat dengan pasar sehingga dapat menjangkau masyarakat yang akan berbelanja di Pasar.

- h. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis di Kota Bengkulu.

3) Kelancaran Distribusi

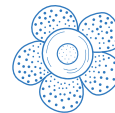
- a. (22/10) — Hibah penyerahan satu unit kendaraan truk dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Hibah ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan pasokan bahan pangan strategis. Kendaraan ini juga diharapkan dapat memperlancar Kerjasama Antar Daerah, dan Gerakan Pangan Murah.
- b. (25/11 dan 22/10) — Hibah penyerahan satu unit kendaraan truk kepada Pemerintah Kota Bengkulu dan satu unit kendaraan truk kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dari Bank Indonesia. Hibah ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan pasokan bahan pangan strategis. Kendaraan ini juga diharapkan dapat memperlancar Kerjasama Antar Daerah, dan Gerakan Pangan Murah.
- c. (15/12) — Pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – Pengendalian Inflasi dan Penguatan Digitalisasi Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Pj. Sekda Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan dirangkaikan pula dengan Penguatan sisi permintaan melalui penyerahan simbolis buku resep diversifikasi pangan, Penguatan sisi pasokan melalui Pemberdayaan Pesantren untuk pengendalian Inflasi (TRENDI), MoU penyerapan hasil TRENDI Pesantren Produktif dengan SPPG Regional Provinsi Bengkulu, dan Penguatan kelancaran distribusi melalui Ado Galo Mobile. Beberapa rangkaian kegiatan tsb diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu yang lebih baik di tahun 2026.
- d. (15/12) — Hibah penyerahan satu unit kendaraan truk kepada Pemerintah Kota Bengkulu dan

satu unit kendaraan truk kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dari Bank Indonesia. Hibah ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan pasokan bahan pangan strategis. Kendaraan ini juga diharapkan dapat memperlancar Kerjasama Antar Daerah, dan Gerakan Pangan Murah.

4) Komunikasi Efektif

- a. (09/10) — Capacity Building TPID Provinsi Bengkulu mengenai Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Bengkulu.
- b. (09/10)— High Level Meeting TPID Kabupaten Kaur bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Kerangka Strategi 4K”.
- c. (22/10) — High Level Meeting TPID Kabupaten Mukomuko mengenai Evaluasi Kegiatan TPID sepanjang 2025 dan upaya pengendalian inflasi terutama pada komoditas penyumbang utama yakni Cabai Merah dan Daging Ayam Ras.
- d. (13/11) — Capacity Building TPID se-Provinsi Bengkulu mengenai Evaluasi Kinerja TPID sepanjang tahun 2025.
- e. (14/11) — Capacity Building TPID se-Provinsi Bengkulu mengenai Pelaporan Program Unggulan TPID 2025.
- f. (14/11) — Benchmarking Visit TPID Seluruh Indonesia ke TPID Prov Kepri/Kota Batam, serta Sharing Session Sinergi Asosiasi Distributor.
- g. 22/11) — Pelaksanaan Puncak Festival Literasi dan Edukasi Inflasi (FLEKSI) dengan tema “Diversifikasi Pangan: Bijak Konsumsi, Kendalikan Inflasi”, dengan Lomba Cipta Resep Diversifikasi Pangan sekaligus perlombaan memasak dengan juri Chef Rudy Choirudin sekaligus sebagai narasumber diversifikasi pangan. Kegiatan ini diikuti oleh 200 Peserta dari berbagai organisasi istri, yakni PIPEBI, IWABA, Bhayangkari, Persit, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan Jalasenastri. Kegiatan dilaksanakan di Bencoolen Mall, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperluas edukasi mengenai diversifikasi pangan untuk menjaga ekspektasi.





- h. (26/11) — High Level Meeting TPID Kabupaten Seluma mengenai Penguatan Sinergi dan Aksi Pengendalian inflasi di Kabupaten Seluma menjelang HBKN Nataru yang dipimpin oleh Wakil Bupati Seluma.
- i. (03/12) — High Level Meeting TPID Kabupaten Bengkulu Selatan – Pengendalian Inflasi & Penguatan Ketahanan Pangan 2025–2026 yang dipimpin oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin.
- j. (04/12) — High Level Meeting TPID Kabupaten Kepahiang – Pengendalian Inflasi & Penguatan Ketahanan Pangan Menjelang Nataru 2025/2026 yang dipimpin oleh Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata S.IP.
- k. (05/12) — High Level Meeting TPID Kabupaten Rejang Lebong – Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Nataru 2025/2026 yang dipimpin oleh Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, S.E., M.AP.
- l. (08/12) — Pelaksanaan Rakorpusda Pengendalian Inflasi Nasional yang dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bengkulu mendapatkan Juara 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera pada TPID Awards 2025 berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian RI No. 386 Tahun 2025.
- m. (15/12) — Pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – Pengendalian Inflasi dan Penguatan Digitalisasi Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Pj. Sekda Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan dirangkaikan pula dengan Penguatan sisi permintaan melalui penyerahan simbolis buku resep diversifikasi pangan, Penguatan sisi pasokan melalui Pemberdayaan PesantREN untuk pengendalian Inflasi (TRENDI), MoU penyerapan hasil TRENDI Pesantren Produktif dengan SPPG Regional Provinsi Bengkulu, dan Penguatan kelancaran distribusi melalui Ado Galo Mobile. Beberapa rangkaian kegiatan tsb diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi Provinsi Bengkulu yang lebih baik di tahun 2026.
- n. Setiap Senin — TPID se-Provinsi Bengkulu rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom yang dipimpin oleh Kemendagri.



BOKS 3

PRAKIRAAN INFLASI 2026, STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, DAN OPTIMALISASI PERAN KDKMP MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Memasuki tahun 2026, prospek inflasi di Provinsi Bengkulu secara umum tetap terjaga, namun kewaspadaan perlu terus diperkuat. Pengalaman pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan harga di Bengkulu terutama muncul dari komoditas pangan strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan, cuaca, dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, dinamika harga komoditas global dan pola permintaan musiman juga tetap menjadi faktor yang perlu dicermati agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkesinambungan.

Sepanjang 2026, tekanan inflasi diperkirakan masih akan bersumber dari komoditas pangan bergejolak, khususnya hortikultura dan protein hewani, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Komoditas-komoditas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat karena perubahannya cepat dirasakan dalam konsumsi sehari-hari. Selain itu, komoditas inti tertentu seperti emas perhiasan juga tetap berpotensi memberi tekanan, sejalan dengan perkembangan harga global dan perilaku konsumsi masyarakat.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa risiko utama yang perlu diantisipasi sepanjang 2026. **Pertama**, risiko pada sisi pasokan pangan, terutama apabila terjadi gangguan cuaca, pergeseran masa tanam/panen, serangan hama, atau penurunan produktivitas di sentra produksi. **Kedua**, risiko pada sisi distribusi, mengingat sebagian komoditas strategis masih dipasok dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan konektivitas, hambatan logistik, dan kenaikan biaya angkut. **Ketiga**, risiko musiman pada periode Ramadan/Idulfitri dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akhir tahun yang umumnya mendorong

peningkatan permintaan. Keempat, risiko eksternal, termasuk dinamika harga komoditas global yang dapat memengaruhi harga domestik secara bertahap.

Dengan memperhatikan berbagai risiko tersebut, pengendalian inflasi daerah pada 2026 perlu tetap dilakukan secara konsisten melalui penguatan strategi 4K. Pada aspek **Ketersediaan Pasokan**, fokus utama diarahkan pada penguatan produksi pangan dan keberlanjutan pasokan, antara lain melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana produksi, pemanfaatan benih unggul, perbaikan irigasi, dan pengaturan pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca. Penguatan pasokan lokal menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pada aspek **Keterjangkauan Harga**, pelaksanaan intervensi harga perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan berbagai langkah stabilisasi lainnya perlu diarahkan secara lebih tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama pada komoditas yang menjadi sumber tekanan utama. Dengan demikian, upaya stabilisasi tidak hanya hadir sebagai respons saat harga sudah tinggi, tetapi juga menjadi instrumen antisipatif untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pada aspek **Kelancaran Distribusi**, penguatan rantai pasok dan dukungan logistik menjadi kunci. Kerja sama antardaerah perlu terus diperkuat untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap terjaga, terutama pada saat terjadi gangguan produksi lokal atau peningkatan permintaan. Selain itu, dukungan sarana distribusi dan penguatan tata



kelola pasokan juga penting agar aliran barang dari sentra produksi ke wilayah konsumsi dapat berlangsung lebih efisien dan tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.

Pada aspek **Komunikasi Efektif**, penguatan koordinasi dan komunikasi berbasis data perlu terus dioptimalkan. Pemantauan harga dan pasokan yang dilakukan secara rutin perlu ditindaklanjuti dengan respons kebijakan yang cepat, serta disertai penyampaian informasi yang konsisten kepada masyarakat. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap terjaga, tetapi juga mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijak, termasuk melalui edukasi diversifikasi pangan.

OPTIMALISASI PERAN KDKMP DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Sejalan dengan penguatan strategi 4K, KDKMP perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi pengendalian inflasi yang dekat dengan kondisi riil. Peran KDKMP akan lebih optimal apabila tidak hanya diposisikan sebagai kelembagaan, tetapi difungsikan sebagai penghubung antara produksi, stok, distribusi, dan kebutuhan masyarakat. KDKMP dapat menjadi simpul yang membantu daerah membaca kondisi pasokan lebih cepat, menyalurkan komoditas lebih efisien, dan memperkuat respons stabilisasi harga pada saat dibutuhkan.

Di wilayah sentra produksi lokal, KDKMP dapat memperkuat pengumpulan hasil panen, menjaga kontinuitas pasokan, dan membantu memastikan produk lokal terserap dengan lebih baik. Sementara di wilayah konsumsi, KDKMP dapat berperan sebagai titik penyaluran komoditas strategis yang lebih dekat ke masyarakat. Dengan fungsi yang disesuaikan menurut karakter wilayah, KDKMP akan lebih relevan dan berdampak dibandingkan pendekatan yang seragam.

Selain itu, KDKMP juga perlu diperkuat dari sisi tata kelola dan kapasitas usaha agar mampu beroperasi secara berkelanjutan. Kelembagaan yang aktif, pencatatan stok dan transaksi yang tertib, serta jejaring kemitraan yang jelas dengan petani, distributor, Bulog/BUMD pangan,

maupun pelaku usaha lokal akan sangat menentukan efektivitas peran KDKMP. Dalam praktiknya, stabilisasi harga sering kali membutuhkan respons cepat. Karena itu, KDKMP yang memiliki data sederhana namun tertib dan jaringan pasok yang aktif akan jauh lebih siap mendukung intervensi daerah dibanding kelembagaan yang hanya aktif saat ada program.

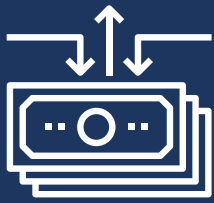
Peran KDKMP juga menjadi semakin penting apabila terintegrasi dengan kerja TPID. Dengan integrasi tersebut, KDKMP tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pengendalian inflasi daerah—misalnya sebagai simpul informasi stok, titik distribusi komoditas, atau kanal penyaluran pada saat pelaksanaan intervensi harga. Pola ini akan membuat strategi 4K lebih terasa di tingkat operasional, karena kebijakan daerah dapat ditopang oleh kelembagaan lokal yang memahami kondisi wilayahnya.

Dalam jangka menengah, penguatan KDKMP dapat memberi manfaat ganda. Di satu sisi, KDKMP membantu memperkuat ketahanan pangan melalui pasokan yang lebih terjaga, distribusi yang lebih efisien, dan keterhubungan yang lebih baik antara produsen dan konsumen. Di sisi lain, KDKMP membantu meningkatkan kualitas pengendalian inflasi, karena intervensi daerah menjadi lebih cepat, lebih dekat ke masyarakat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, KDKMP tidak hanya relevan sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai pengungkit stabilitas harga pangan yang lebih berkelanjutan.

Prakiraan inflasi Bengkulu sepanjang 2026 tetap terjaga, namun diperlukan antisipasi yang konsisten. Penguatan sinergi TPID, implementasi strategi 4K, serta optimalisasi peran KDKMP yang terintegrasi menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.



BAB 4



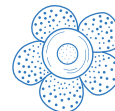
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dari sisi rumah tangga, korporasi dan perbankan secara umum.

- Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif. Peningkatan tingkat Loan to Deposit Ratio mencerminkan peningkatan rasio penyaluran kredit yang lebih besar dibandingkan tingkat penghimpunan dana. Namun demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan membaiknya rasio kredit bermasalah/Non-Performing Loan/Funding.
- Kinerja penyaluran kredit pada triwulan laporan mengalami peningkatan didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang terus tumbuh meski sedikit melambat.
- Kinerja penghimpunan dana tercatat positif sebagaimana ditunjukkan oleh posisi DPK yang meningkat pada tabungan, deposito, dan giro dengan pertumbuhan yang sedikit menguat. Sejalan dengan hal tersebut, aset perbankan tercatat tetap positif meski sedikit melambat
- Kinerja perbankan syariah cenderung meningkat disertai dengan peningkatan pangsa perbankan syariah pada triwulan laporan.
- Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang menurun dan tetap di bawah batas aman NPL.





4.1 GAMBARAN UMUM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan IV 2025 tetap terjaga dari sisi rumah tangga.

Fungsi intermediasi perbankan di sektor rumah tangga tetap terjaga didukung oleh penyaluran kredit yang meningkat sebesar 7,75% (yoy) meskipun tidak sebesar triwulan sebelumnya. Walau melambat, kondisi ini masih ditopang oleh pertumbuhan kredit KPR dari 5,00% (yoy) pada triwulan III 2025, menjadi 6,45% (yoy) pada periode laporan, mengindikasikan perbaikan permintaan pembiayaan perumahan. Dari sisi DPK, simpanan rumah tangga tumbuh 2,14% (yoy), sedikit melandai dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,32% (yoy). Kondisi ini mencerminkan kecenderungan rumah tangga untuk mempertahankan likuiditas. Adapun tingkat risiko kredit mengalami penurunan, ditunjukkan oleh tingkat *non-performing loan* yang berada di level 1,93%, mengindikasikan risiko kredit yang sedikit mengalami penurunan pada periode laporan.

Kondisi penyaluran kredit korporasi di Provinsi Bengkulu tumbuh menguat pada triwulan laporan, dengan tingkat risiko kredit yang membaik.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 8,76% (yoy), menguat setelah pada periode sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,82% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit korporasi dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit investasi sebesar 4,08% (yoy) yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 0,32% (yoy). Peningkatan tersebut sedikit tertahan oleh pertumbuhan kredit modal kerja 15,57% (yoy) yang lebih lambat dari triwulan sebelumnya sebesar 18,04% (yoy). Lebih lanjut, tingkat NPL kredit korporasi tercatat membaik, yakni menjadi sebesar 0,63%, berada di bawah batas aman yaitu 5%.

Terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Bengkulu tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap positif dan penyaluran kredit 2025 menunjukkan pertumbuhan.

Dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan pada triwulan IV 2025 ialah sebesar Rp19,14 triliun dengan pertumbuhan 5,12% (yoy) atau sedikit menguat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 5,05% (yoy). Perbankan Provinsi Bengkulu masih bertumpu pada sektor rumah tangga untuk ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pangsa 79,55% dari keseluruhan DPK. Penyaluran kredit Perbankan juga tumbuh positif dengan laju pertumbuhan yang sedikit menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit pada periode laporan tercatat sebesar Rp38,71 triliun atau tumbuh sebesar 6,32% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni masing-masing tercatat sebesar 9,47% (yoy) dan 7,73% (yoy). Pertumbuhan kredit modal kerja tercatat melandai namun tetap positif sebesar 1,27% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi memiliki pangsa kredit terbesar yang mencakup 47,29% dari total penyaluran kredit.

Besarnya pangsa kredit konsumsi juga sejalan dengan disagregasi ekonomi Provinsi Bengkulu yang mayoritas disumbangkan oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Risiko kredit konsumsi pada triwulan berjalan tetap terkendali dengan NPL di bawah batas aman 5%.

Kinerja intermediasi perbankan secara umum di Provinsi Bengkulu masih terjaga pada triwulan IV 2025.

Intermediasi perbankan secara umum yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 202,26% atau meningkat dari triwulan III 2025 yang sebesar 193,71%. Peningkatan tingkat LDR dipicu tingkat penyaluran kredit yang lebih besar dibandingkan tingkat penghimpunan dana. Adapun nilai LDR di atas 100% menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Provinsi Bengkulu dipenuhi oleh perbankan luar Provinsi Bengkulu. Sementara itu, tingkat *non-performing loan* menurun di level 1,42%, mengindikasikan kualitas kredit yang tetap baik pada periode laporan.

Kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu relatif meningkat pada triwulan IV 2025 yang terlihat dari peningkatan pangsa perbankan syariah dan kualitas pembiayaan.

Pangsa perbankan syariah di Provinsi Bengkulu berada pada kisaran 10,86%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 7,44%, dan meningkat dari triwulan yang





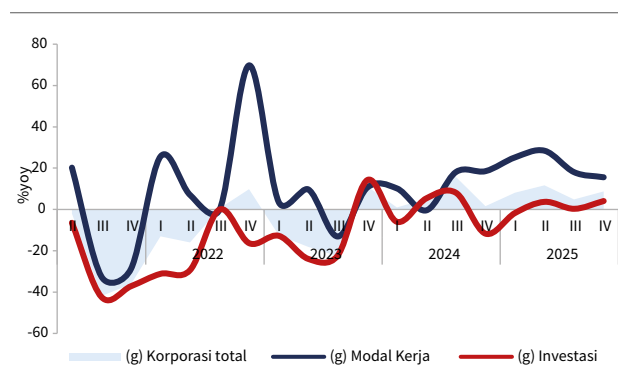
sama pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, peningkatan kualitas pembiayaan tercermin dari penurunan *level Non-Performing Financing* (NPF) pada triwulan IV 2025 yang sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,2% (yoy).

Aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan masih terjaga. Pada triwulan laporan pangsa kredit UMKM sebesar 38,46% dari total kredit, atau cenderung menurun dari triwulan sebelumnya yaitu 39,35% dari total kredit. Hal ini disertai penurunan risiko kredit UMKM yang tercermin dari tingkat NPL sebesar 1,98%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,1% namun tetap berada di bawah batas aman NPL 5%.

4.2 KORPORASI DAN RUMAH TANGGA

Eksposur Perbankan Terhadap Korporasi

Secara umum, penyaluran kredit kepada segmen korporasi pada triwulan IV 2025 menunjukkan peningkatan. Penyaluran kredit korporasi tercatat tumbuh menguat menjadi sebesar 8,76% (yoy), setelah pada periode sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,82% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit korporasi ini terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit investasi dari 0,32% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 4,08% (yoy) pada triwulan IV 2025. Kondisi ini sedikit tertahan dengan melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja yang sebelumnya tumbuh sebesar 18,04% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 15,57% (yoy) pada triwulan IV. (Grafik 4.1).

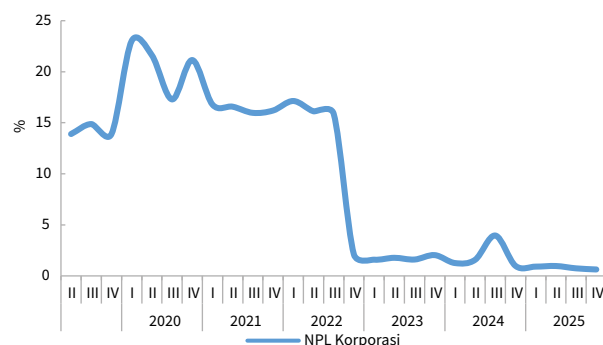


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1

Perkembangan Kredit Korporasi

Lebih lanjut, kredit investasi masih menjadi pasar kredit utama untuk korporasi di Provinsi Bengkulu yang mencakup 50,29% dari total kredit korporasi Provinsi Bengkulu, dilanjutkan oleh kredit modal kerja sebesar 41,16%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2

Perkembangan NPL Korporasi

Dari sisi kerentanan pembiayaan, rasio *non performing loan* kredit Korporasi tercatat sebesar 0,63%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 0,74% (Grafik 4.2). Hal ini mencerminkan kualitas kredit yang semakin baik pada korporasi Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut, angka NPL ini masih berada jauh di bawah 5% yang menandakan jika kemampuan bayar korporasi masih cukup baik di tengah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu saat ini.

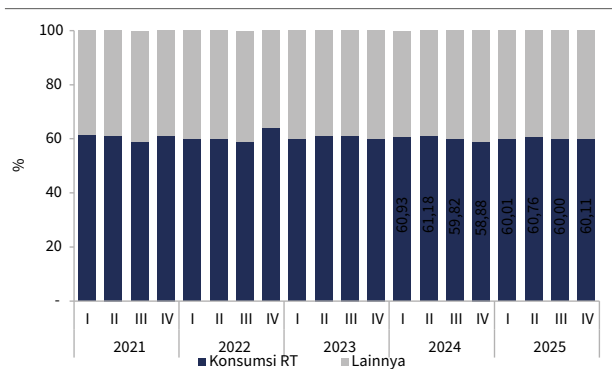
Kinerja dan Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Provinsi Bengkulu menunjukkan kondisi perekonomian bertumpu pada pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT). Kontribusi tingkat konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 60,11% dari total pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 atau sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang memiliki kontribusi sebesar 60,00% (Grafik 4.3). Kontribusi komponen konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi sejalan dengan peningkatan konsumsi pada momen libur sekolah, serta HBKN Natal dan Tahun Baru 2026.

Eksposur Perbankan Terhadap Rumah Tangga

Perbankan Provinsi Bengkulu mendapatkan mayoritas sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Simpanan Rumah Tangga. Simpanan rumah tangga

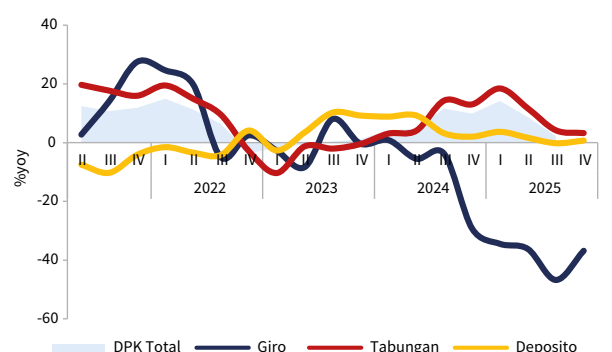




Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.3 Kontribusi Pertumbuhan Konsumsi RT

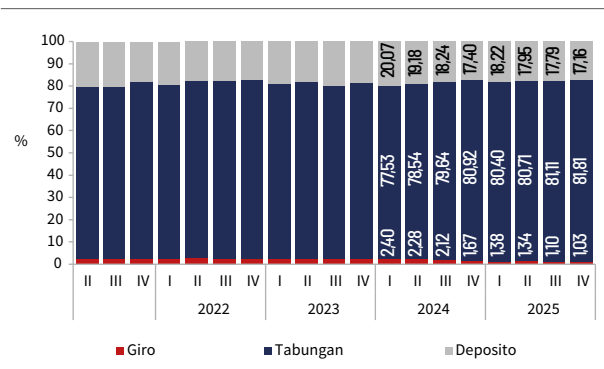
tercatat memiliki pangsa 79,55% dari total simpanan perbankan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 74,67%. Sebaliknya, pangsa simpanan pemerintah menurun dari 10,67% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,30% pada triwulan laporan. Secara tahunan, simpanan rumah tangga tumbuh 2,14% (yoy), sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,32% (yoy) (Grafik 4.4). Kondisi ini mencerminkan kecenderungan rumah tangga untuk mempertahankan likuiditas di tengah meningkatnya tingkat konsumsi. Terdapat kemungkinan rumah tangga masih cenderung mengalihkan sebagian dana ke instrumen lain di luar simpanan perbankan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan DPK Rumah Tangga

Tabungan masih menjadi jenis produk simpanan yang paling diminati bagi rumah tangga di Provinsi Bengkulu dengan pangsa pasar sebesar 81,81% (Grafik 4.5). Pangsa tabungan rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 81,11%.



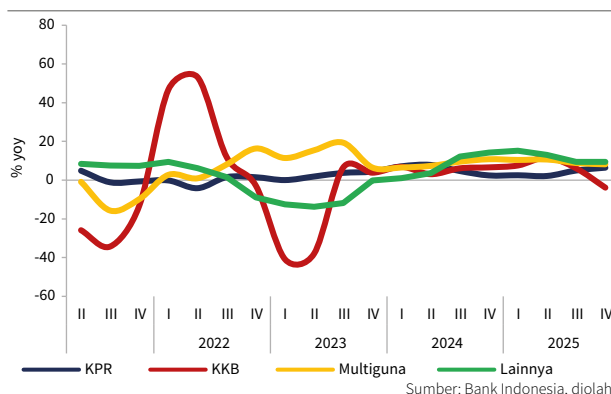
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Pangsa Jenis DPK Rumah Tangga

Secara umum pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan IV 2025 cenderung tumbuh melambat. Pertumbuhan sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tabungan tetap tumbuh sebesar 3,25% (yoy), dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,21% (yoy). Deposito terpantau tumbuh sebesar 0,69% (yoy) dimana sebelumnya berada di angka -0,20% (yoy). Di lain sisi, pertumbuhan giro masih terkoreksi sejak triwulan II 2024. Pada triwulan IV 2025 giro terkoreksi sebesar 36,83% (yoy), dimana sebelumnya sebesar 46,77% (yoy). Perkembangan ini mencerminkan pola simpanan rumah tangga yang tertahan di tengah dinamika perekonomian Provinsi Bengkulu.

Dari sisi penyaluran kredit rumah tangga, pada triwulan IV 2025 pertumbuhan terpantau melandai.

Pertumbuhan penyaluran kredit RT di triwulan IV 2025 ialah sebesar 7,75% (yoy) atau lebih rendah dibanding pertumbuhan di triwulan sebelumnya sebesar 8,21% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan kredit RT pada segmen KKB dan Multiguna yang masing-masing sebesar -3,86% dan 8,19% (yoy).



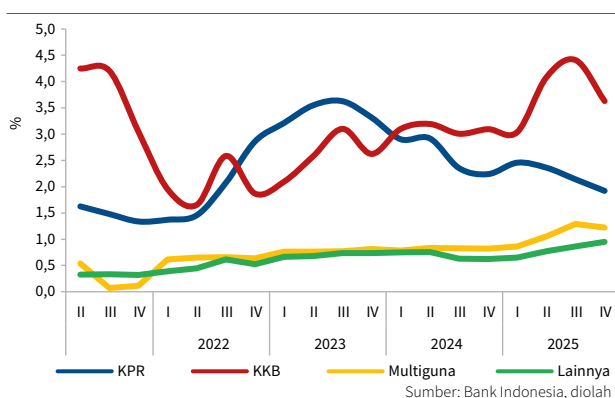
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan kedua segmen tersebut lebih tinggi, yaitu 6,09% dan 8,84% (yoy). Di tengah perlambatan tersebut, kinerja kredit KPR menahan penurunan lebih dalam, dengan pertumbuhan yang menguat dari 5,00% pada triwulan sebelumnya menjadi 6,45% (yoy), mengindikasikan perbaikan permintaan pembiayaan perumahan pada periode laporan.

Melandainya pertumbuhan kredit rumah tangga juga dibarengi dengan tingkat *non performing loan* di triwulan IV 2025 yang mengalami penurunan. Rasio NPL yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 2,18%, menurun menjadi 1,93% pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada jumlah kredit yang bermasalah. Rasio tersebut masih berada di bawah level indikatif 5% yang menunjukkan kondisi kualitas kredit yang masih terjaga (Grafik 4.7).

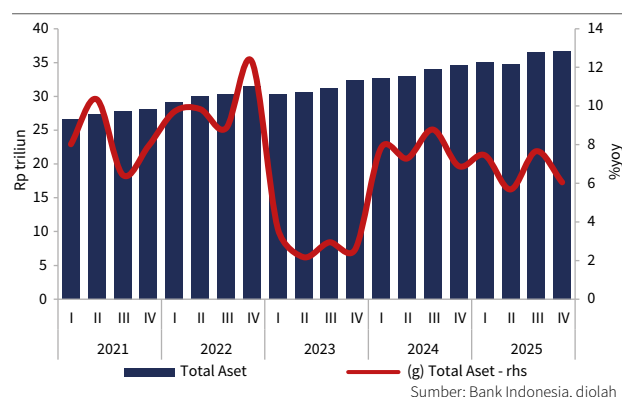


Grafik 4.7 Perkembangan NPL Rumah Tangga

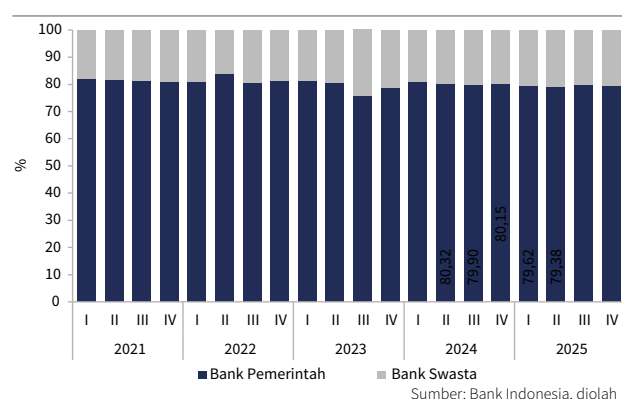
4.3 PERKEMBANGAN BANK UMUM

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh pada triwulan IV tahun 2025 sejalan dengan tetap terjaganya kinerja indikator perbankan. Aset bank umum di Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan tercatat meningkat menjadi Rp36,72 triliun atau tumbuh sebesar 6,05% (yoy). Jumlah aset tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 36,58 triliun dengan pertumbuhan 7,66% (yoy) (Grafik 4.8).

Berdasarkan kepemilikannya, aset perbankan di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh aset bank umum milik pemerintah, dengan pangsa mencapai 79,48% (Grafik 4.9). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 79,99%.

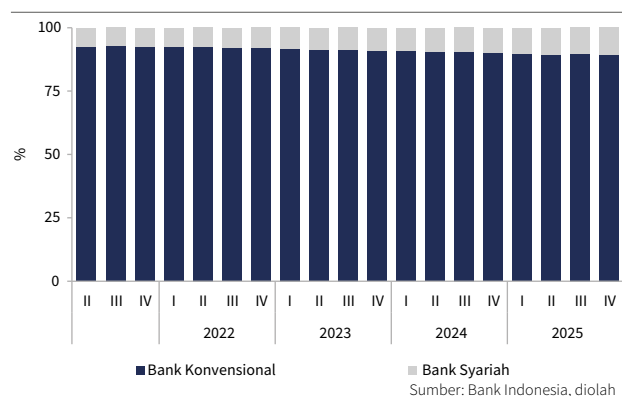


Grafik 4.8 Aset Bank Umum di Provinsi Bengkulu



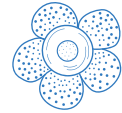
Grafik 4.9 Aset Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan

Aset perbankan Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh bank konvensional yang mencakup 89,14% dari total aset pada periode laporan, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 89,63%. Sementara itu, pangsa pasar bank syariah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 10,86%, sedikit menurun namun tetap stabil dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 10,36% dari total aset. Stabilitasnya pangsa pasar aset bank syariah menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap fasilitas perbankan syariah (Grafik 4.10).



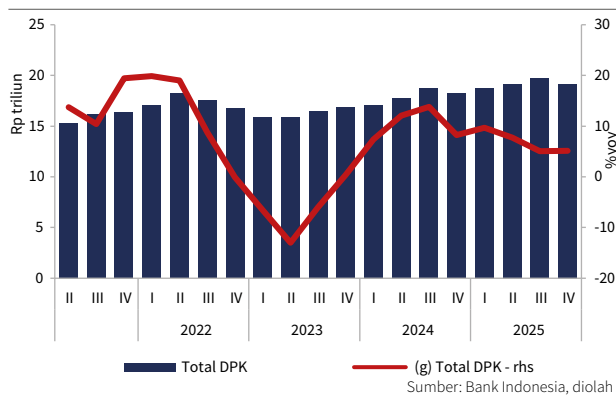
Grafik 4.10 Aset Bank Berdasarkan Sistem





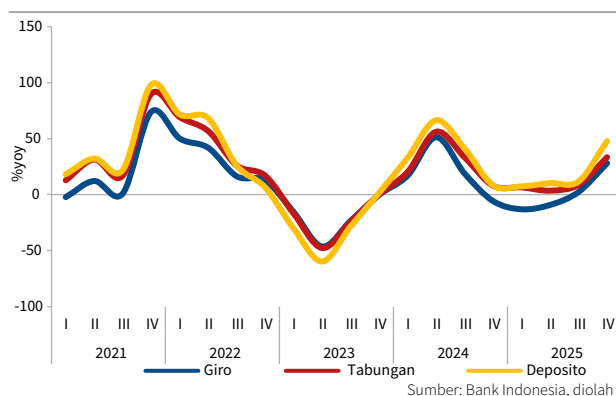
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Secara umum, pertumbuhan DPK pada Triwulan IV 2025 secara tahunan (yoy) mengalami pertumbuhan sedikit meningkat. Total DPK pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp19,14 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy), tumbuh sedikit menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy) dengan posisi DPK sebesar Rp19,73 triliun (Grafik 4.11).



Grafik 4.11 Perkembangan Total DPK Bank Umum

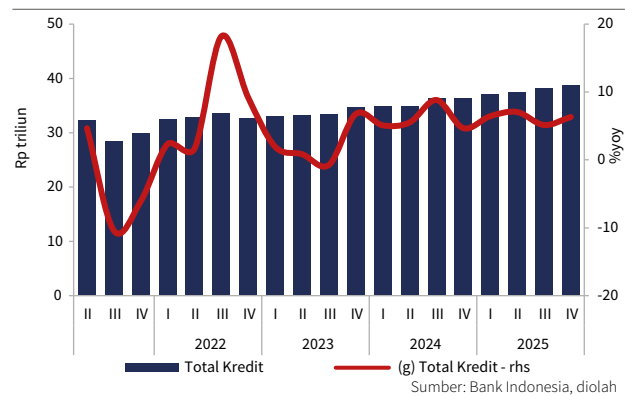
Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Bengkulu terdiri dari produk tabungan, giro, dan deposito dengan masing-masing bernilai sebesar Rp13,25 triliun, Rp2,29 triliun, dan Rp3,60 triliun. Pada triwulan IV 2025, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan. Tabungan tumbuh sebesar 5,22% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,40% (yoy). Adapun deposito tercatat tumbuh menguat menjadi 9,60% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,90% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan giro terkoreksi sebesar -1,75% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,36% (yoy) (Grafik 4.12).



Grafik 4.12 Pertumbuhan DPK Bank Umum

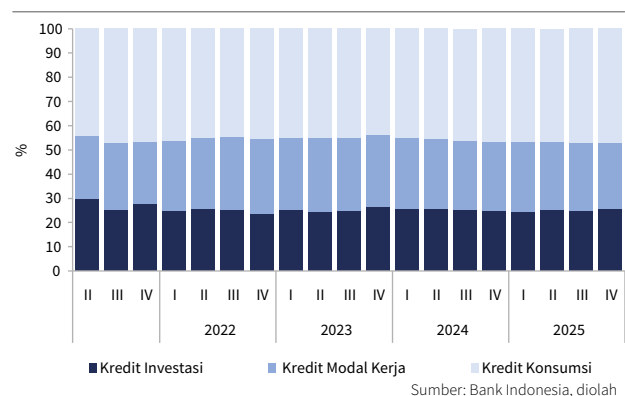
Perkembangan Penyaluran Kredit

Kredit perbankan menunjukkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025, sedikit menguat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Adapun penyaluran kredit pada periode laporan tercatat sebesar Rp38,71 triliun atau tumbuh sebesar 6,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy) dengan total kredit Rp38,22 triliun. (Grafik 4.13).



Grafik 4.13 Penyaluran Kredit Bank Umum

Kredit berdasarkan jenis penggunaannya terbagi menjadi tiga yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit konsumsi menjadi penopang kredit terbesar di Provinsi Bengkulu dengan pangsa 47,29%. Porsi kredit konsumsi pada periode laporan relatif meningkat dibandingkan triwulan III 2025 dengan pangsa 47,03%. Jenis penggunaan kredit terbesar kedua adalah kredit modal kerja dengan pangsa 27,14%, kemudian diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa 25,57% (Grafik 4.14).

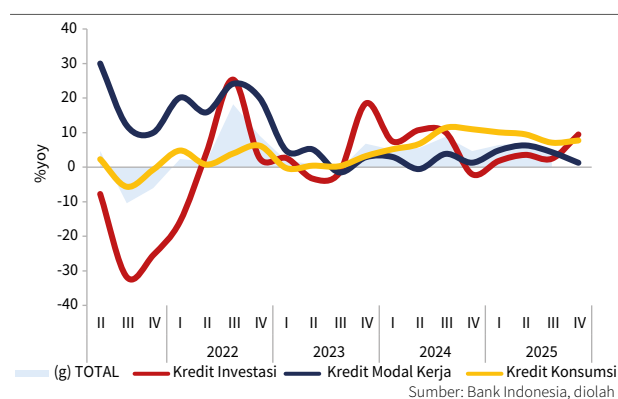


Grafik 4.14 Pangsa Kredit Bank Umum Jenis Penggunaan





Dari sisi pertumbuhan, kredit konsumsi mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,73% (yoy), tumbuh menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 7,10% (yoy). Sejalan dengan kredit konsumsi, pertumbuhan kredit investasi juga terpantau menguat signifikan dengan pertumbuhan sebesar 9,47% (yoy), dimana pada periode sebelumnya tumbuh sebesar 2,45% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja melandai dengan pertumbuhan sebesar 1,27% (yoy) pada periode ini setelah sebelumnya berada di angka 4,35% (yoy). (Grafik 4.15).

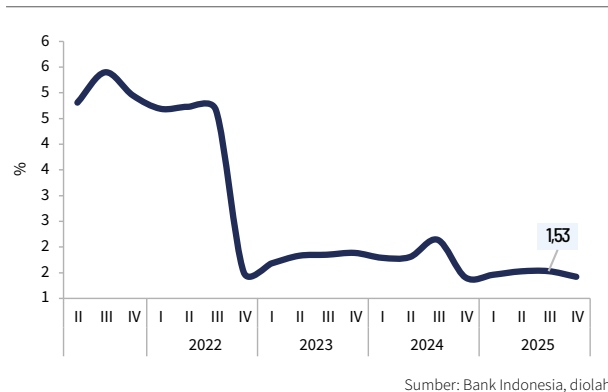


Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan

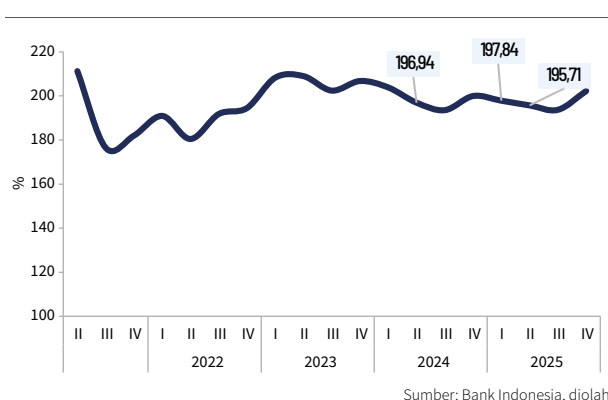
Risiko Stabilitas Sistem Keuangan

Pada triwulan IV 2025, risiko kredit tetap terjaga dengan nilai yang masih cukup rendah. *Non performing loan* kredit perbankan Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 1,42%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 1,53% dari (Grafik 4.16). Hal ini mencerminkan kualitas kredit yang kian baik di Provinsi Bengkulu. Angka NPL ini masih berada di bawah 5% yang menandakan jika kemampuan bayar pelaku usaha cukup baik di tengah perekonomian saat ini.

Kinerja intermediasi perbankan secara umum di Provinsi Bengkulu masih terjaga. Intermediasi perbankan tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dimana pada triwulan laporan tercatat sebesar 202,26%. Kondisi ini meningkat dari triwulan III 2025 dengan LDR sebesar 193,71%. (Grafik 4.17). Peningkatan rasio LDR ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran dana kredit lebih tinggi dibandingkan tingkat penghimpunan dana.



Grafik 4.16 NPL Bengkulu (Lokasi Proyek)



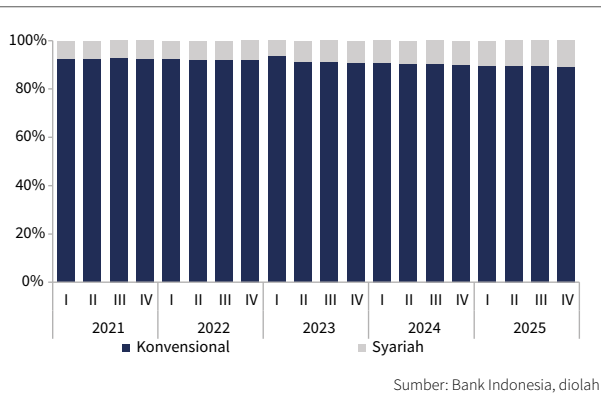
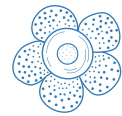
Grafik 4.17 LDR Bengkulu (Lokasi Proyek)

4.4 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Perkembangan Aset Bank Syariah

Aset bank syariah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3.989 triliun atau tumbuh sebesar 17,22% (yoy), angka tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian pada triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 16,56% (yoy). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan total aset perbankan secara keseluruhan (konvensional dan syariah), aset bank syariah di Bengkulu saat ini memiliki pangsa pasar sebesar 10,86%, angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 10,37% (Grafik 4.18). Pangsa aset bank syariah di Bengkulu tercatat di atas rata-rata nasional yang berada sekitar 7,44% dari total aset perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perkembangan perbankan syariah cukup tinggi namun perlu terus dioptimalkan untuk mendorong akseptasi dan akses keuangan yang lebih luas.

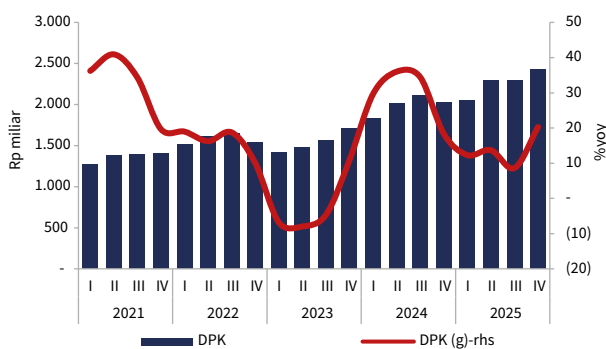




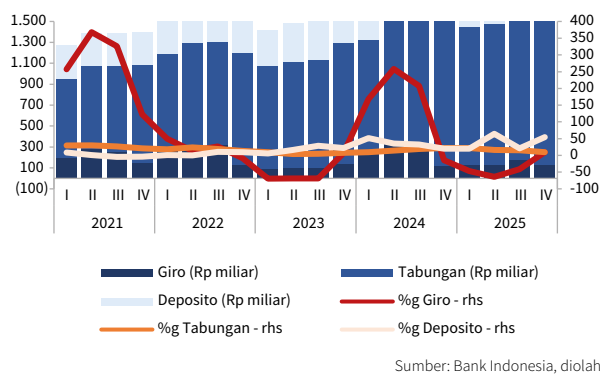
Grafik 4.18 Distribusi Aset Bank Syariah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah

DPK perbankan syariah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025. DPK mengalami peningkatan signifikan pada triwulan laporan 2025 menjadi 20,24% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,59% (yoy) (Grafik 4.19). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 18,35% (yoy).



Grafik 4.19 Pertumbuhan DPK Bank Syariah

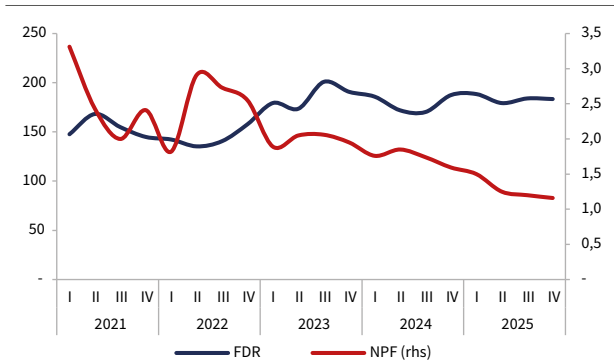


Grafik 4.20 Komponen DPK Bank Syariah

Peningkatan jumlah DPK bersumber dari peningkatan komponen deposito sebesar 54,17% (yoy) pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 20,55% (yoy). Peningkatan juga dialami oleh komponen giro yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,24% (yoy) dibandingkan dengan periode sebelumnya -41,04% (yoy). Di sisi lain, komponen tabungan mengalami penurunan yaitu sebesar 9,10% (yoy) jika dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 15,39% (yoy).

Risiko Stabilitas Sistem Keuangan Syariah

Dari sisi kualitas pembiayaan, terdapat peningkatan kualitas pembiayaan perbankan syariah pada triwulan IV 2025. Peningkatan kualitas tercermin dari penurunan *level Non-Performing Financing (NPF)* pada triwulan IV 2025 yang sebesar 1,16% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,2% (yoy) (Grafik 4.21). Sementara itu, rasio intermediasi perbankan yang tercermin *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tercatat menurun pada triwulan IV 2025 sebesar 183,42% dari triwulan sebelumnya sebesar 184,05%.



Grafik 4.21 NPF dan FDR Perbankan Syariah

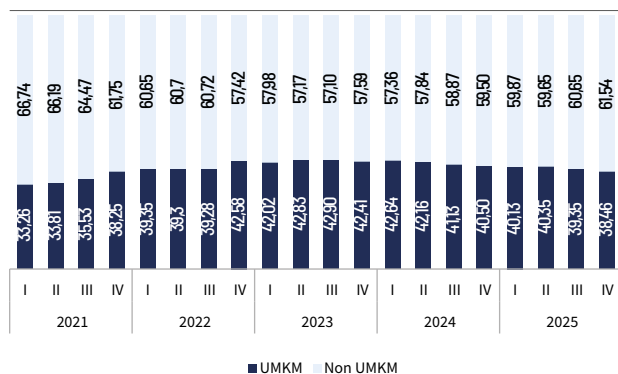
4.5 SEKTOR UMKM

UMKM merupakan salah satu pilar pendukung ketahanan perekonomian bangsa. Secara historis, UMKM merupakan kelompok usaha yang dapat menjadi *buffer* perekonomian pada saat krisis. Oleh sebab itu, dukungan terhadap pengembangan UMKM perlu terus ditingkatkan. Salah satu indikator untuk melihat pengembangan UMKM adalah tingkat penyaluran kredit perbankan terhadap UMKM. Penyaluran kredit kepada UMKM memiliki porsi





yang cukup signifikan terhadap total pangsa pasar kredit Provinsi Bengkulu. Pada triwulan IV 2025, pangsa pasar kredit UMKM dari total penyaluran kredit melambat sebesar 38,46%, dari triwulan sebelumnya yaitu 39,35% (Grafik 4.22).



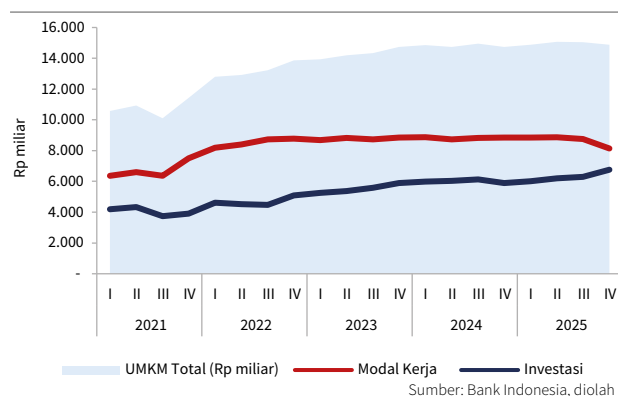
Grafik 4.22

Pangsa Kredit UMKM

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar yang mencapai 49,22% dan 36,81% dari total kredit UMKM di triwulan IV 2025 (Grafik 4.24). Di sisi lain, pertumbuhan kredit lapangan usaha pertanian tumbuh pada triwulan laporan yaitu sebesar 8,60% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 5,77% (yoy). Tren tersebut juga berlangsung pada sektor perdagangan yang tumbuh sebesar -4,23% (yoy) lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya -5,91% (yoy).

Sejalan dengan komposisi PDRB, penyaluran kredit UMKM didominasi oleh LU utama daerah. Pada triwulan IV 2025, distribusi penyaluran kredit masih didominasi pada lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha

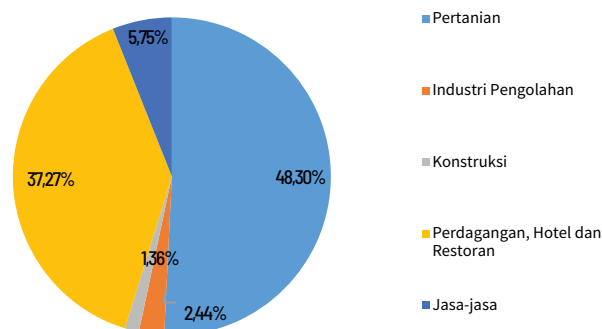


Grafik 4.23

Nominal Kredit UMKM Jenis Penggunaan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

perdagangan dengan pangsa lebih dari 85% total penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bengkulu (Grafik 4.24). Selanjutnya distribusi kredit UMKM disumbangkan dari sektor jasa, industri pengolahan, dan konstruksi.



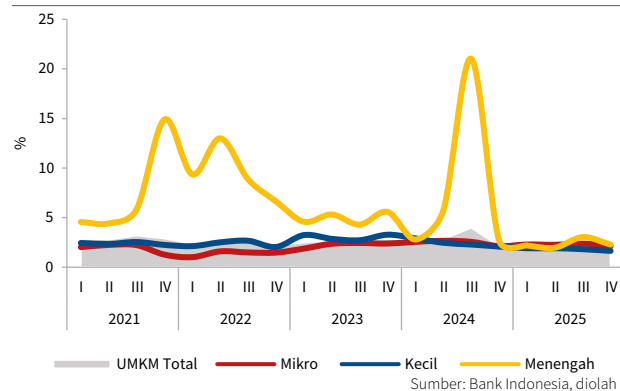
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24

Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Lapangan Usaha

Perkembangan Risiko Kredit UMKM

Berdasarkan risiko kredit, NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2025 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL kredit UMKM triwulan IV 2025 tercatat 1,98%, menurun dari triwulan III 2025 sebesar 2,10% (Grafik 4.25).



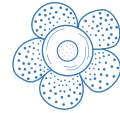
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25

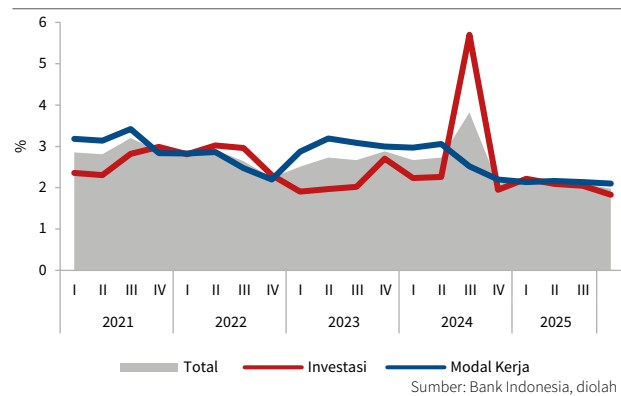
NPL Kredit UMKM Skala Usaha

Penurunan NPL kredit UMKM terutama disebabkan oleh penurunan NPL dari skala usaha menengah secara signifikan pada posisi 2,29% dibandingkan triwulan sebelumnya 3,04%. Adapun NPL kredit UMKM skala mikro turut mengalami penurunan menjadi 2,13%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,38%. Selanjutnya, NPL pada kredit skala kecil menurun menjadi 1,65% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,82%.





Berdasarkan jenis penggunaan, NPL UMKM triwulan IV 2025 untuk Kredit Modal Kerja tercatat sebesar 2,10% (yoy), menurun dari triwulan III 2025 sebesar 2,14% (yoy). Selanjutnya, NPL UMKM untuk Kredit Investasi tercatat sebesar 1,83%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 2,05% (yoy). Sehingga, total NPL dari dua sektor tersebut pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan menjadi 1,98% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,1% (Grafik 4.26). Hal ini menunjukkan secara agregat masih dibawah batas aman NPL sebesar 5%.



Grafik 4.26

NPL Kredit UMKM Jenis Penggunaan





BOKS 4

DORONG DIGITALISASI DAERAH DI PROVINSI BENGKULU MELALUI CAPACITY BUILDING DAN STUDI BANDING TP2DD

Penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Bengkulu terus menjadi fokus bersama dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Sejalan dengan komitmen tersebut, telah diselenggarakan kegiatan *Capacity Building* dan Studi Banding Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu pada tanggal 6–7 November 2025 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Sekda Provinsi Bengkulu Bpk. Herwan Antoni dan seluruh Sekda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat akselerasi digitalisasi keuangan daerah.

Agenda tersebut menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Bapenda Kota Cimahi, Bpk. Faisal, S.Sos., M.M., yang memaparkan praktik terbaik implementasi TP2DD dan optimalisasi berbagai sumber PAD melalui ETPD, dan Asisten Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Yusi Yuliana, yang menyampaikan perkembangan implementasi ETPD di wilayah kerja KPwBI Provinsi Bengkulu.

Selain berupa *capacity building*, turut dilakukan juga studi banding ke Samsat Digital Leuwi Panjang dan Command Center Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dari kunjungan tersebut, terdapat tiga pembelajaran utama, yaitu: (1) perlunya perluasan inovasi kanal pembayaran digital untuk meningkatkan pertumbuhan PAD secara *real-time* sebagaimana diterapkan oleh Bapenda Jawa Barat; (2) pentingnya dukungan penuh pimpinan daerah dan seluruh OPD, termasuk penguatan regulasi



Gambar B4.1 Capacity Building dan Studi Banding TP2DD Tahun 2025

serta peran ASN sebagai *role model* dalam kepatuhan pembayaran pajak; dan (3) penerapan sistem layanan pajak yang efisien di Samsat Digital Leuwi Panjang, di mana masyarakat cukup melakukan pemindaian KTP dan verifikasi sidik jari, mengisi data, serta melakukan pembayaran secara *cashless*.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan *High Level Meeting* TP2DD se-Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Bengkulu. Dalam forum tersebut disepakati tiga komitmen utama, yaitu: (1) seluruh Pemda berkomitmen menindaklanjuti tantangan ETPD melalui pembaruan *roadmap* TP2DD serta optimalisasi realisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); (2) pengisian Championship dan Indeks ETPD dilakukan secara terkoordinasi pada setiap periode dengan tanggung jawab masing-masing Pemda atas capaian penilaiannya; serta (3) penguatan sinergi dan strategi digitalisasi yang tepat guna memaksimalkan potensi teknologi digital dalam meningkatkan PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi

lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara KPwBI Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah, BPD Bengkulu, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin solid dalam mempercepat implementasi ETPD di Provinsi Bengkulu.



Gambar B4.2 Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan APU PPT dan PPPSPM bersama APGAKUM Tahun 2025

Penguatan perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelindungan Konsumen serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Kamis, 30 Oktober 2025 di Aula KPwBI Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi Bank Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi, integritas sistem pembayaran, serta kolaborasi antar lembaga dalam mencegah tindak kejahatan keuangan.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Bapak R.A. Denny, serta perwakilan instansi vertikal, OPD, aparat penegak hukum, akademisi, perbankan dan lembaga jasa keuangan, media, organisasi nonprofit, pelaku

usaha, hingga mahasiswa. Turut hadir perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Daerah Bengkulu (Ditreskrimsus).

Pada kegiatan tersebut disampaikan beberapa materi strategis yang disampaikan antara lain:

1. Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menjelaskan prinsip dan mekanisme pelindungan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), termasuk pentingnya transparansi informasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan;
2. Penanganan Kejahatan Siber pada Sistem Pembayaran, yang mengulas berbagai modus seperti phishing, skimming, malware, dan carding, serta langkah pencegahan dan koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan transaksi digital;
3. Pengawasan Sistem Pembayaran dan Penerapan APU-PPT, yang menekankan penguatan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan KUPVA BB, mitigasi risiko TPPU dan TPPT, serta implementasi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sejalan dengan arah kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Selain itu, turut dilaksanakan juga Sosialisasi Literasi Keuangan dan Digitalisasi bagi Gen Z yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Kota Bengkulu, Duta QRIS-PeKA, serta pemenang QRIS Jelajah Budaya Indonesia Provinsi Bengkulu. Pada sesi ini disampaikan inspirasi mengenai pemanfaatan media dan konten kreatif sebagai sarana edukasi literasi keuangan dan digital, serta strategi storytelling untuk mendorong kesadaran finansial generasi muda.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan tercipta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan keamanan sistem keuangan, penguatan sinergi antar lembaga dalam pencegahan kejahatan keuangan, serta lahirnya generasi muda yang cerdas finansial, melek digital, dan waspada terhadap risiko TPPU dan TPPT di era ekonomi digital.



Gambar B4.3 Sinergi Bank Indonesia pada Jambore Daerah VII Kwarda Bengkulu 2025

Edukasi ekonomi dan keuangan kepada generasi muda terus menjadi bagian penting dalam penguatan literasi dan stabilitas ekonomi daerah di Provinsi Bengkulu. Sejalan dengan upaya memperluas diseminasi kebijakan, meningkatkan pemahaman inflasi dan ketahanan pangan, serta mendorong literasi sistem pembayaran digital dan Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersinergi dalam kegiatan Jambore Daerah VII Kwartir Daerah (Kwarda) Bengkulu Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Kaur pada 16–17 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam menanamkan pemahaman ekonomi dan keuangan sejak dini kepada generasi muda sebagai agen perubahan di daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dan panitia Jambore Daerah VII Kwarda Bengkulu Tahun 2025 dan berlangsung secara interaktif serta penuh antusiasme. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) Praktik diversifikasi pangan berbasis potensi lokal melalui kegiatan memasak gurita khas Kabupaten Kaur yang diolah menjadi rendang gurita dengan penggunaan bahan olahan tahan simpan sebagai contoh penerapan pengelolaan konsumsi pangan secara bijak dan mendukung stabilitas harga; (2) Kunjungan ke booth edukasi CBP Rupiah dan QRIS sebagai sarana pengenalan ciri keaslian Rupiah, pentingnya memperlakukan Rupiah

secara benar, serta pemanfaatan sistem pembayaran digital yang aman dan inklusif; (3) Sesi edukasi Inflasi dan Kebanksentralan yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan dan pemanfaatan komoditas lokal; (4) Pemaparan materi CBP Rupiah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam menjaga martabat mata uang nasional; (5) Edukasi digitalisasi sistem pembayaran melalui pemahaman manfaat QRIS dalam mendukung transaksi non-tunai yang efisien dan inklusif.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas dan peran Bank Indonesia, meningkatnya kesadaran akan pentingnya diversifikasi pangan lokal dalam menjaga stabilitas harga, serta tumbuhnya komitmen untuk menerapkan nilai CBP Rupiah dan penggunaan sistem pembayaran digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ditutup dengan semangat kolaboratif dan respons positif dari seluruh peserta, sebagai wujud penguatan literasi ekonomi dan keuangan di kalangan generasi muda Bengkulu.



BAB 5



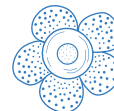
SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Inflow Uang Kartal Rp849M Tw III 2025 	 Rp715M Tw IV 2025	Outflow Uang Kartal Rp1T Tw III 2025 	 Rp1,9T Tw IV 2025	Net Flow Uang Kartal Net Outflow Rp1,1T Tw III 2025 	 Net Outflow Rp 1,1T Tw IV 2025
Transaksi RTGS 10,55% yoy Rp 3,33T Tw III 2025 	 52,29% yoy Rp 4,86T Tw IV 2025	Pengguna QRIS 9% 262.180 Tw III 2025 	 10% 272.144 Tw IV 2025	Transaksi SKNBI -17,58% (yoy) Rp129,19M Tw III 2025 	 -21,63% (yoy) Rp122,62M Tw IV 2025

Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 cenderung mengalami *net outflow*. Transaksi nontunai SKNBI mengalami penurunan secara tahunan, sedangkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perluasan ekosistem digital di Provinsi Bengkulu juga terakselerasi yang ditunjukkan oleh peningkatan pengguna dan volume QRIS maupun perluasan akuisisi *merchant*.

- Terjadi peningkatan aktivitas penarikan uang tunai dari perbankan terlihat dari aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu yang mengalami *net outflow* sebesar Rp1,25 triliun.
- Pada triwulan IV 2025, secara nominal, nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp122,62 miliar atau berkontraksi 21,63% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
- Di sisi APMK, rata-rata jumlah kartu kredit mengalami peningkatan sebesar 6,24% (yoy) diiringi dengan peningkatan pertumbuhan transaksi, sejalan dengan jumlah kartu debit yang meningkat sebesar 6,93% (yoy rata-rata jumlah uang elektronik yang meningkat hingga 233,42% (yoy)).
- Transaksi pembelian pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan IV 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, baik dari sisi pembelian maupun penjualan valas. Lebih lanjut, valas yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Amerika Serikat (USD), Malaysian Ringgit (MYR), dan Singapore Dollar (SGD) dari total mata uang yang diperjualbelikan.

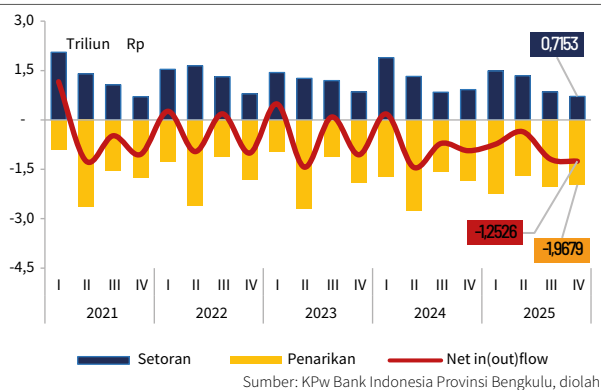




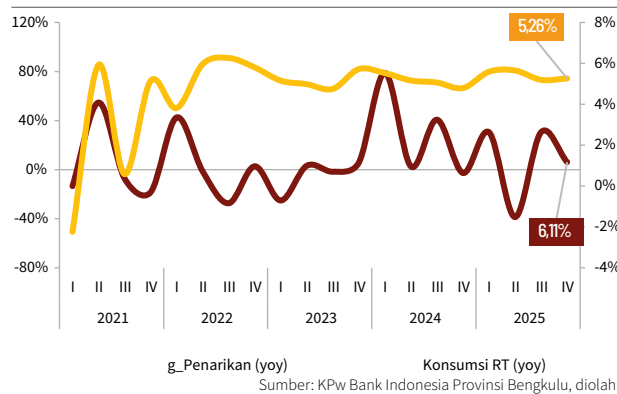
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan IV 2025, aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu mengalami *net outflow*. Jumlah aliran uang kartal yang keluar lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Kas Bank Indonesia Provinsi Bengkulu.

Adapun angka *net outflow* pada triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp1,25 triliun (Grafik 5.1). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2025, penarikan dari perbankan lebih tinggi dibandingkan setoran, sejalan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,18 triliun.



Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Bengkulu Periode Triwulan IV 2025



Grafik 5.2 Perkembangan Outflow dan Konsumsi RT

Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya penarikan bank pada triwulan IV tahun 2025 tercatat menurun sebesar 3,21% (qtd) dibandingkan triwulan III tahun 2025. Total penarikan bank pada periode laporan adalah sebesar Rp1,96 triliun, sedangkan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp2,03 triliun. Di sisi lain, tingkat setoran bank mengalami penurunan sebesar 15,74%,

yakni dari Rp849 triliun pada triwulan III 2025, menjadi Rp715 miliar di triwulan IV 2025.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,26% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi PDRB mencapai 6,11% (yoy).

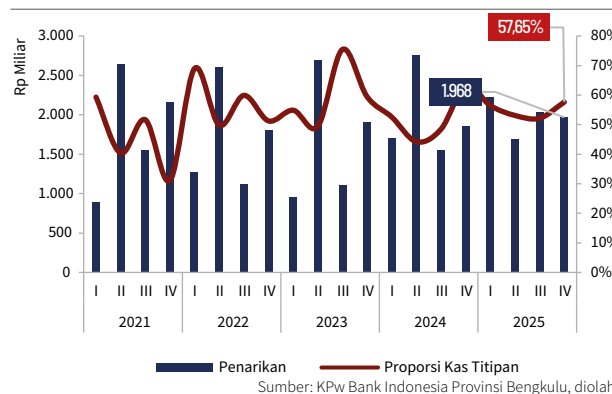
Tabel 5.1 Perkembangan Pembayaran Tunai

TRANSAKSI TUNAI	% (YOY)							
	TW-I 2024	TW-II 2024	TW-III 2024	TW-IV 2024	TW-I 2025	TW-II 2025	TW-III 2025	TW-IV 2025
Penarikan	78,80%	2,58%	40,72%	-2,74%	30,5%	-38,7%	30,6%	6,1%
Setoran	31,00%	5,26%	-29,68%	8,53%	-21,2%	1,0%	0,9%	-22,3%

Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

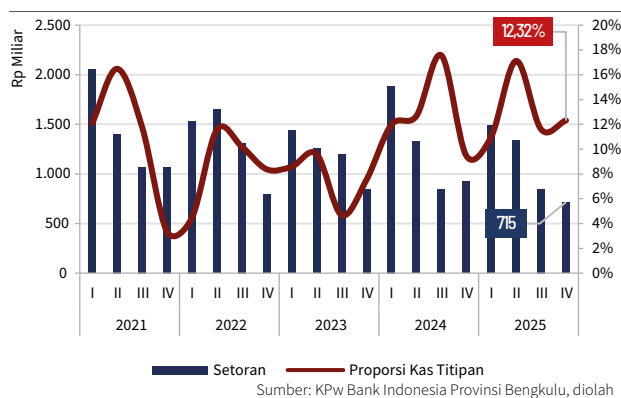
Pada triwulan IV 2025, aktivitas penarikan Kas Titipan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun setoran Kas Titipan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kondisi ini didorong oleh dinamika dan mobilitas aktivitas ekonomi pada periode pelaporan di wilayah Kabupaten/Kota Kas Titipan. Sebagai informasi, saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu melakukan pengelolaan uang melalui Kas Titipan yang berada di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Mukomuko. Secara keseluruhan, jumlah penarikan bank di wilayah Kas Titipan pada periode laporan sebesar Rp1,13 triliun, atau sebesar 57,65% dari seluruh aktivitas penarikan uang di wilayah Provinsi Bengkulu (Grafik 5.3). Dari sisi penyeteroran, setoran bank di wilayah kas titipan pada periode laporan tercatat sebesar Rp88,1 miliar dengan proporsi mencakup 12,3% dari seluruh aktivitas penyeteroran uang di wilayah Provinsi Bengkulu (Grafik 5.4).



Grafik 5.3 3 Aktivitas Penarikan Triwulan IV 2025

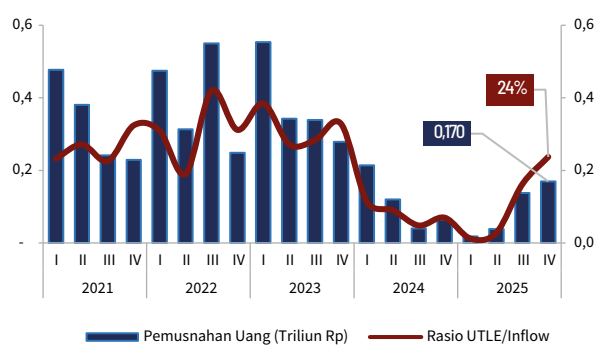




Grafik 5.4 Aktivitas Penyetoran Triwulan IV 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu konsisten dalam mendukung pencapaian kebijakan *clean money policy* dengan memusnahkan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebanyak Rp170 miliar pada triwulan IV 2025, angka ini lebih besar 23,4% dibandingkan triwulan III 2025 dengan rasio terhadap *inflow* adalah 24% (Grafik 5.5).

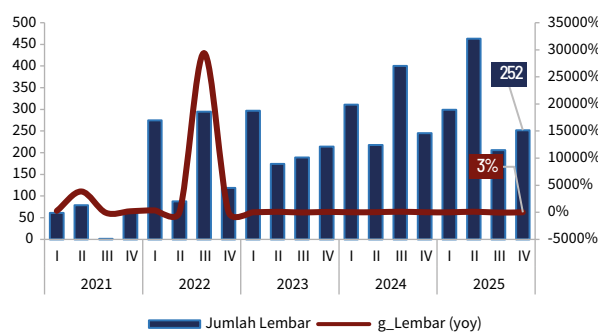
Pemusnahan UTLE menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat terhadap Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang ditunjukkan dengan minat masyarakat untuk menukarkan Rupiah tidak layak edar yang nantinya akan dimusnahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu serta masifnya kegiatan strategis dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan kegiatan kas keliling.



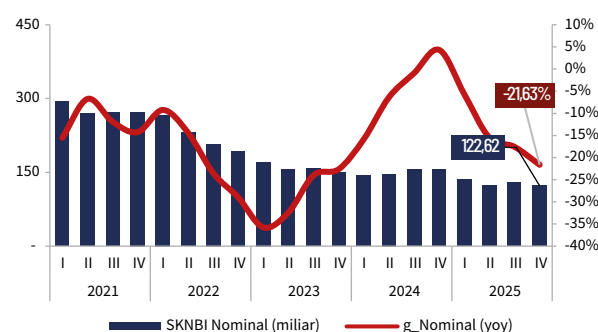
Grafik 5.5 Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di Bengkulu

Kemudian, pada triwulan IV 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menerima dan mengklarifikasi 252 lembar temuan uang yang diragukan keasliannya. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan keamanan transaksi tunai. Dari jumlah tersebut, temuan uang yang diragukan keasliannya didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), di antaranya adalah 74 lembar untuk pecahan Rp100.000,-

, 98 lembar uang pecahan Rp50.000,-, 76 lembar uang pecahan Rp20.000,-, 2 lembar uang pecahan Rp10.000,-, dan masing-masing 1 lembar uang pecahan Rp5.000,- dan Rp2.000,- (Grafik 5.5; Grafik 5.6; dan Tabel 5.2). Temuan uang yang diragukan keasliannya pada periode laporan meningkat 3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan temuan uang yang diragukan keasliannya sebanyak 245 lembar. Dalam upaya meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap persebaran uang yang diragukan keasliannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah pada berbagai kegiatan. Selain itu, pada triwulan IV juga telah dilakukan rangkaian kegiatan penukaran uang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam periode HBKN.



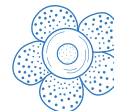
Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Lembar Temuan Uang Palsu



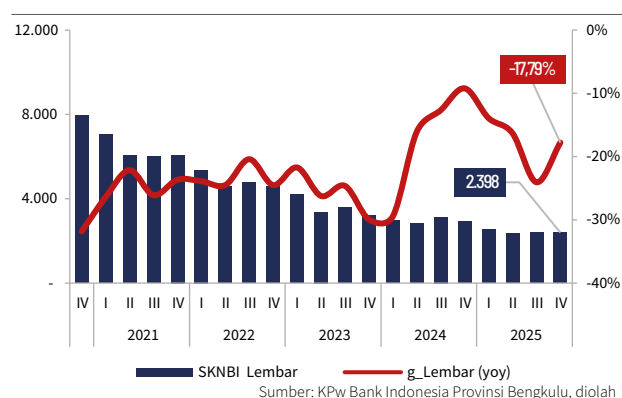
Grafik 5.7 Perkembangan Jumlah Nominal SKNBI Bengkulu

5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

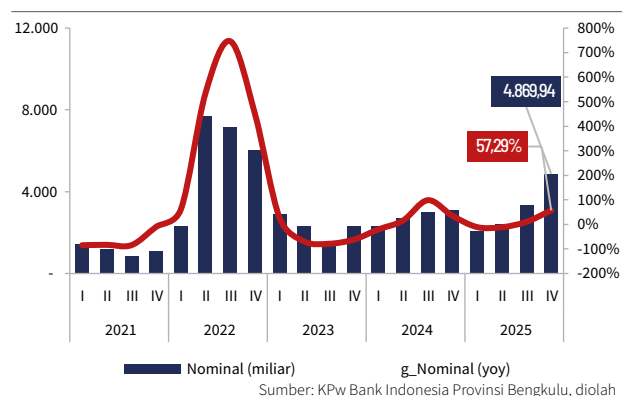
Nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp122,62 miliar atau terkontraksi 23,63% (yoy) dibandingkan



dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 5.7). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami telah berkontraksi sebesar 17,58% (yoy). Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh masyarakat yang mulai beralih menggunakan sistem layanan BI-FAST dalam kegiatan transfer dana antar bank. Sementara itu, dilihat berdasarkan volumenya, volume transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 juga tercatat berkontraksi sebesar 17,79% (yoy) dengan total transaksi sebanyak 2.398 atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 2.387 (Grafik 5.8).



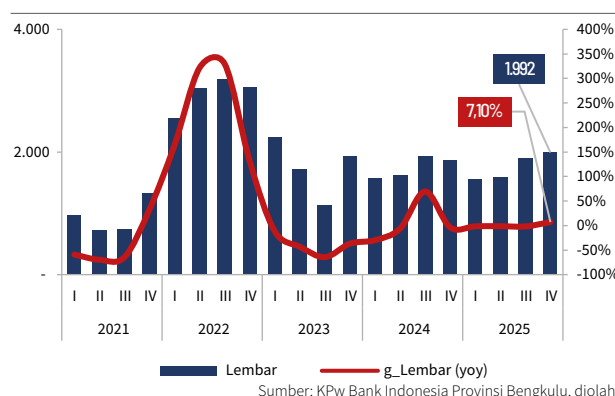
Grafik 5.8 Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Bengkulu



Grafik 5.9 Perkembangan Jumlah Nominal RTGS Bengkulu

Sementara itu, pada triwulan IV 2025 untuk nilai transaksi BI-Real Time Gross Settlement (RTGS) menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp4,86 triliun, atau tumbuh sebesar 57,29% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama (Grafik 5.9). Di sisi lain, volume transaksi juga menunjukkan peningkatan

pada angka 1.992 lembar atau meningkat sebesar 7,10% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama (Grafik 5.10). Sementara itu, nilai transaksi RTGS triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka pada triwulan III 2025 yang tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Secara umum, nilai transaksi dan volume RTGS cenderung mengalami tren peningkatan.



Grafik 5.10 Perkembangan Jumlah Lembar RTGS Bengkulu

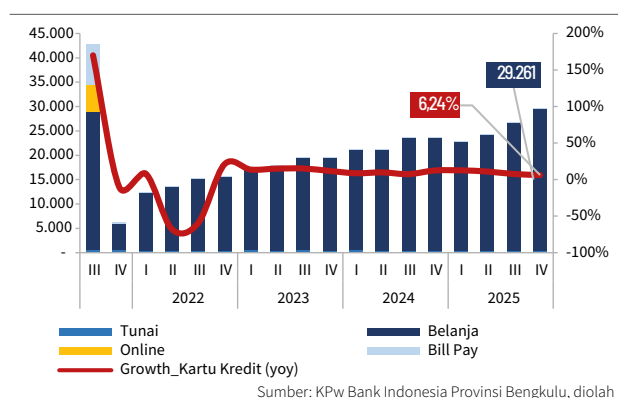
Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan IV 2025 menunjukkan tren peningkatan pada penggunaan kartu kredit dan kartu debit jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah pemilik kartu kredit pada triwulan IV 2025 sebesar 31.562 atau mengalami peningkatan sebesar 6,24% (yoy) dengan total volume terbesar terjadi pada Desember 2025 dengan rerata jumlah kartu 31.631. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah kepemilikan kartu kredit sedikit meningkat sebesar 1,8%. Lebih lanjut, angka *outstanding* kartu kredit tercatat mengalami peningkatan di Provinsi Bengkulu sebesar 15,23% (yoy).

Berdasarkan volume transaksi, masyarakat Provinsi Bengkulu paling banyak menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi belanja. Hal ini dapat dilihat pada triwulan IV 2025 yang jumlah transaksi belanja mencapai 29.261 transaksi/bulan, jika dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 27% (yoy) dengan proporsi terhadap total volume transaksi adalah 98%. Selanjutnya, pada periode laporan, kartu kredit juga digunakan untuk transaksi tunai dan pembayaran tagihan rata-rata masing-masing mencapai 358 transaksi/bulan dan 134 transaksi/bulan.

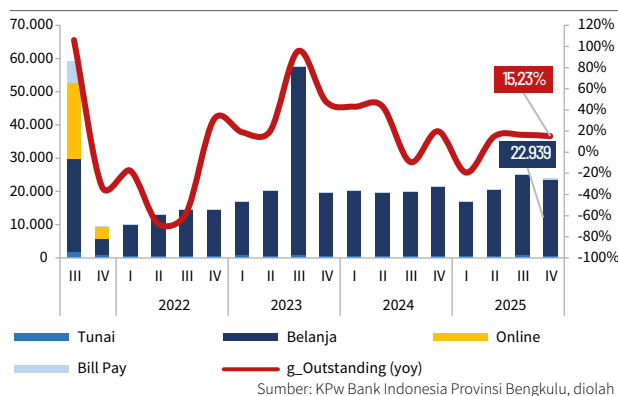




Secara nominal, penggunaan transaksi kartu kredit terbesar adalah untuk keperluan belanja yang mencapai Rp22,9 miliar/bulan pada triwulan IV 2025, meningkat sebesar 9% (yoy). Selanjutnya, transaksi tunai mengalami penurunan pada angka 564 juta atau naik sebesar 20,46% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 5.12). Diprakirakan masyarakat akan terus meningkatkan transaksi secara nontunai. Secara keseluruhan, total nilai transaksi kartu kredit di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp23,8 miliar atau menurun 5,69% (qta).

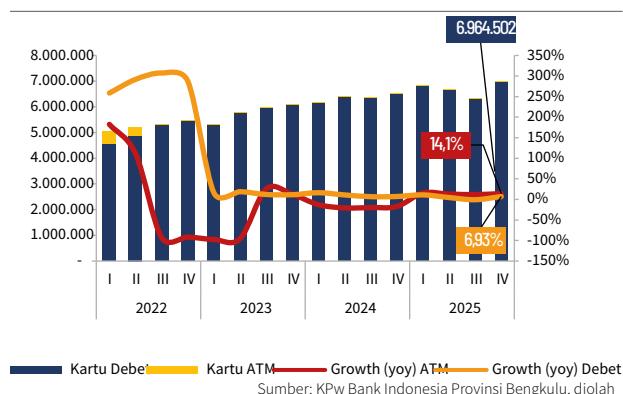


Grafik 5.11 Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu Kredit Bengkulu



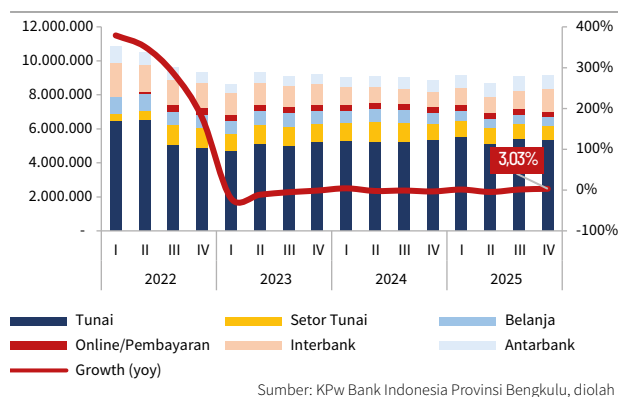
Grafik 5.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit (Rp miliar) Bengkulu

Penggunaan kartu ATM/Debit secara nominal dan volume transaksi di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2025. Jumlah kartu ATM dan debit yang beredar di Provinsi Bengkulu berturut-turut meningkat 14,1% (yoy) dan 6,93% (yoy) dari 6,5 juta kartu pada triwulan IV tahun 2024 menjadi 6,96 juta kartu pada triwulan IV 2025 (Grafik 5.13). Jumlah penggunaan kartu debit di Provinsi Bengkulu mencapai 6.964.502, sementara penggunaan kartu ATM mencapai 13.649 kartu.



Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debit Bengkulu

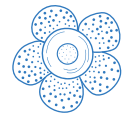
Volume transaksi APMK pada kartu ATM/Debit di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 9.145.584 transaksi selama triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 9.112.545 transaksi per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 0,3% (yoy) (Grafik 5.14). Peningkatan transaksi menggunakan kartu ATM/Debit pada triwulan IV 2025 terutama disebabkan oleh peningkatan volume transaksi tunai yang menurun 0,08%, dan volume transaksi interbank dan antarbank yang berturut-turut meningkat sebesar 44,7% (yoy) dan 17,2% (yoy). Lebih lanjut, Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan minat masyarakat dalam melakukan transaksi secara non tunai melalui perbankan termasuk dengan menggunakan kartu debit.



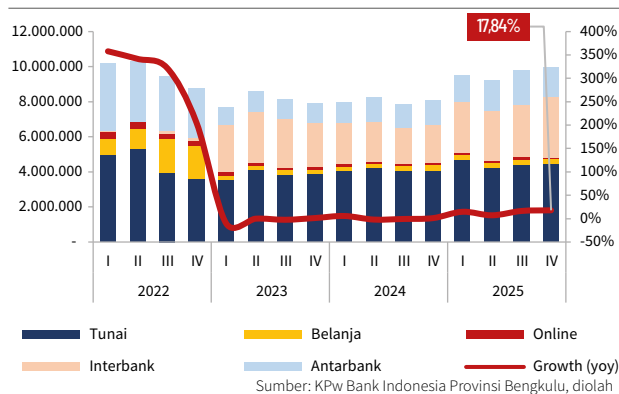
Grafik 5.14 Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu ATM/Debit

Tren yang sama terjadi pada nilai nominal transaksi kartu ATM/Debit, dimana terdapat peningkatan total nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan tren perubahan antar sektor. Secara keseluruhan nilai transaksi kartu ATM/Debit di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 mencapai Rp12 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan pada periode yang sama



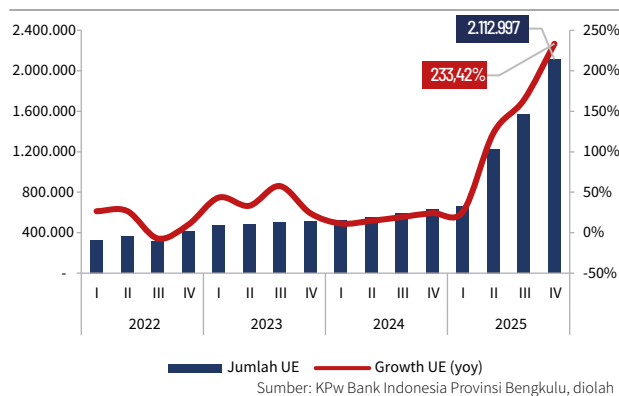


di tahun sebelumnya sebesar 17,8% (yoy) (Grafik 5.15). Secara proporsi, transaksi tersebut terdiri dari transaksi tarik tunai sebesar Rp 4,4 triliun atau tumbuh sebesar 7,9% (yoy), transaksi setor tunai sebesar Rp2 triliun yang mana mengalami penurunan sebesar 4,2% (yoy), transaksi belanja sebesar Rp291 miliar atau meningkat sebesar 3,2% (yoy), transaksi *online* sebesar Rp103,5 miliar, transaksi interbank sebesar Rp3,4 triliun, dan transaksi antarbank sebesar Rp1,7 triliun.



Grafik 5.15 Perkembangan Nominal Transaksi (Juta Rp) Kartu ATM/Debet

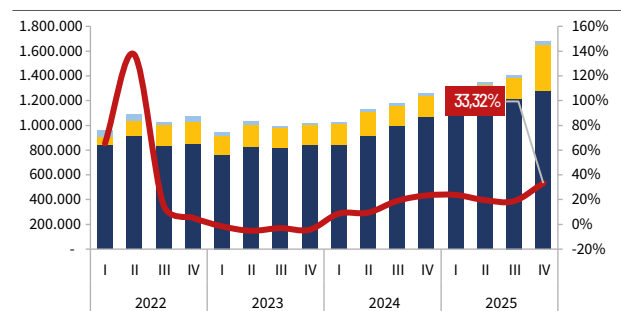
Penggunaan uang elektronik di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2025. Jumlah uang elektronik di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 233% (yoy) (Grafik 5.16). Tren yang sama terjadi pada angka nominal transaksi uang elektronik, sementara volume transaksi mengalami sedikit penurunan.



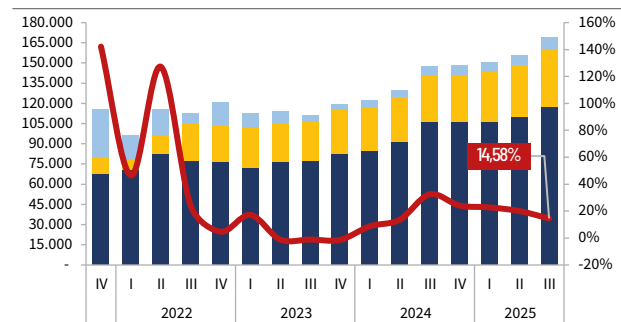
Grafik 5.16 Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Provinsi Bengkulu

Jumlah transaksi dan nominal uang elektronik mengalami peningkatan, dengan jumlah transaksi meningkat sebesar 33,3% (yoy) dan angka nominal juga meningkat sebesar 51,9% (yoy) (Grafik 5.17). Jumlah transaksi uang elektronik di Provinsi Bengkulu mencapai

1.680.139 transaksi dengan total nilai nominal transaksi mencapai Rp225.142 miliar (Grafik 5.18). Di sisi lain, saat ini total dana *float* uang elektronik di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar Rp26,3 miliar atau meningkat sebesar 62,4% (yoy). **Dana float uang elektronik** merupakan dana milik pengguna yang telah disetorkan ke penerbit uang elektronik, misalnya melalui top-up e-wallet atau kartu uang elektronik, tetapi belum digunakan untuk transaksi atau masih “mengendap”. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas top-up UE yang belum diimbangi dengan ekosistem penerimaan UE yang belum sepenuhnya merata di Provinsi Bengkulu.



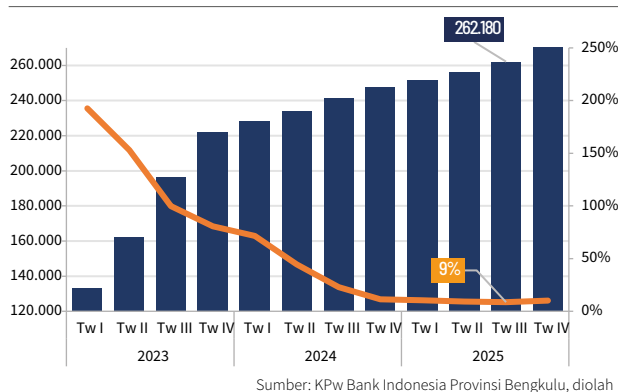
Grafik 5.17 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi



Grafik 5.18 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi

Pada triwulan IV 2025 jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi Bengkulu terus mengalami pertumbuhan. Saat ini jumlah pengguna QRIS pada periode pelaporan telah mencapai 272.144 pengguna, meningkat 10% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.19). Jumlah *merchant* meningkat hingga 235.844 atau tumbuh 27% (yoy) (Grafik 5.20).

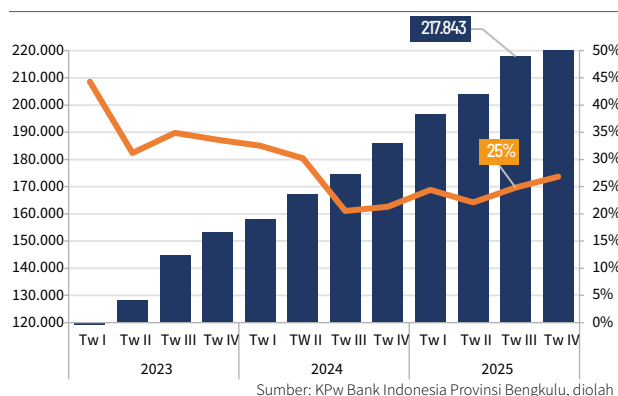




Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 5.19

Pertumbuhan Pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2025



Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

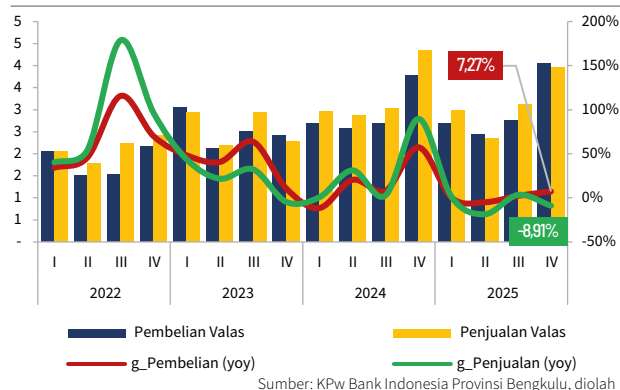
Grafik 5.20

Pertumbuhan Merchant QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2025

Peningkatan jumlah QRIS sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna. Peningkatan tersebut diiringi oleh berbagai upaya seperti pelaksanaan *event* strategis seperti QRIS Banking Race 2025, Gerakan Mahasiswa Scan QRIS (GEMA QRIS), dan berbagai kegiatan sosialisasi serta kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk perluasan implementasi QRIS.

5.3 KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) BERIZIN

Pada triwulan IV 2025, transaksi pembelian dan penjualan pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Transaksi pembelian valas menurun sebesar -15,25% (yoy), sementara penjualan valas menurun sebesar -25% (yoy) (Grafik 5.21). Total nilai transaksi jual beli valuta asing di KUPVA BB pada triwulan IV 2025 sebesar Rp6,47 miliar, dengan komposisi pembelian valas Rp3,21 miliar dan penjualan valas Rp3,26 miliar. Volume ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

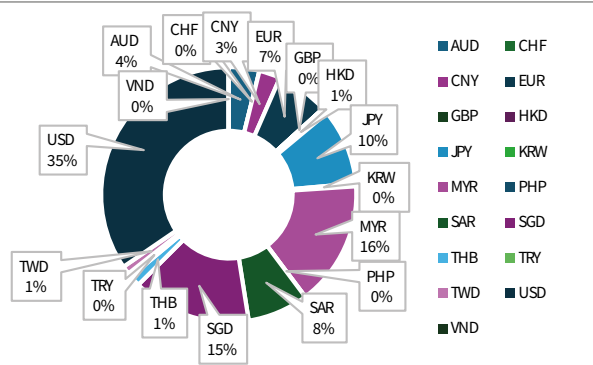


Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 5.21

Perkembangan Transaksi Valas Bengkulu (Miliar Rp)

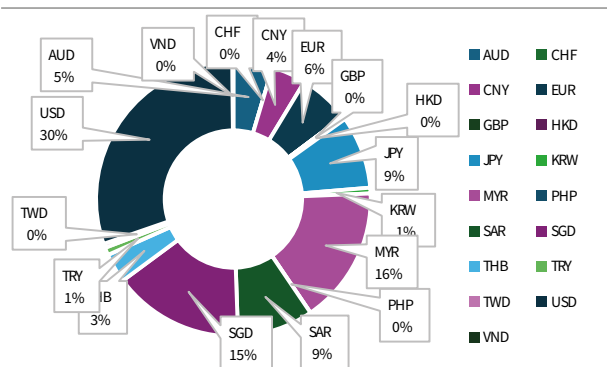
Data transaksi KUPVA BB menunjukkan jenis valuta asing yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Amerika Serikat (USD), Malaysian Ringgit (MYR), dan Singapore Dollar (SGD) dari total mata uang yang diperjualbelikan. KUPVA BB paling banyak melakukan pembelian valuta asing dari masyarakat untuk mata uang Dollar Amerika Serikat/USD (35%), Malaysian Ringgit/MYR (16%), dan Singapore Dollar (15%) (Grafik 5.22). Dari sisi permintaan valuta asing, KUPVA BB paling banyak melakukan penjualan valuta asing untuk mata uang mata uang Dollar Amerika Serikat/USD (30%), Malaysian Ringgit/MYR (16%), dan Singapore Dollar (15%) (Grafik 5.23).



Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 5.22

Jenis Mata Uang Pembelian Valas Triwulan IV 2025



Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 5.23

Jenis Mata Uang Penjualan Valas Triwulan IV 2025

BAB 6



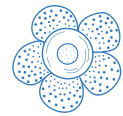
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

	Jumlah Angkatan Kerja November 2025 1.162.760 orang Agustus 2025 1.154.698 orang		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja November 2025 71,78% Agustus 2025 71,71%		Tingkat Pengangguran Terbuka November 2025 3,37% Agustus 2025 3,41%
	Nilai Tukar Petani Tw IV 2025 208,32% Tw III 2025 201,59%		Tingkat Kemiskinan September 2025 11,88% September 2024 12,25%		Gini Ratio September 2025 0,339 September 2024 0,381

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu secara umum masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tetap berada pada level rendah, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, serta penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dinamika struktur ketenagakerjaan dan tekanan biaya pada sektor tertentu tetap perlu dicermati guna menjaga keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat ke depan.

- TPT Provinsi Bengkulu terjaga rendah sebesar 3,37% pada November 2025, menurun dari 3,41% pada Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan mayoritas angkatan kerja masih terserap oleh lapangan pekerjaan. Namun demikian, menurunnya porsi pekerja penuh waktu yang disertai pergeseran komposisi ke tenaga kerja berpendidikan lebih rendah, perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas penyerapan tenaga kerja.
- Nilai Tukar Petani (NTP) juga melanjutkan tren peningkatan dari periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 208,32, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 201,59. Capaian ini menunjukkan bahwa daya beli petani masih relatif terjaga, tercermin dari indeks harga yang diterima petani yang tetap berada di atas indeks harga yang dibayarkan petani, meskipun di tengah dinamika fluktuasi harga komoditas.
- Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode September 2025 berada pada angka 11,88% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 12,25%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah.




Tabel 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

KOMODITAS	SATUAN	PERIODE				
		2024 FEBRUARI	2024 AGUSTUS	2025 FEBRUARI	2025 AGUSTUS	2025 NOVEMBER
PENDUDUK USIA KERJA	ORANG	1.573,688	1.585,001	1.597,188	1.608.738	1.614,573
ANGKATAN KERJA	ORANG	1.116.138	1.136.573	1.142.038	1.154.698	1.162.760
-BEKERJA	ORANG	1.080.744	1.101.234	1.105.046	1.115.334	1.123.612
-PENGANGGURAN	ORANG	35,39	35,34	36,99	39,36	39.148
PERSENTASE TPAK (%)	(%)	70,92	71,71	71,50	71,78	72,02
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	(%)	3,17	3,11	3,24	3,41	3,37

Sumber: BPS, diolah

6.1 KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Peningkatan TPT dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah angkatan kerja seiring masuknya lulusan baru ke pasar kerja. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu masih berada pada level yang relatif rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan dari 3,41% pada Agustus 2025, menjadi 3,37% pada November 2025¹ (BPS Provinsi Bengkulu, 2025). Jumlah pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 39.148 orang, atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 35.364 orang (*Tabel 6.1*). Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor bertambahnya jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu. Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran yang masing-masing meningkat menjadi sebesar 351.392 orang dan 148.612 orang. Di sisi lain, jumlah pekerja penuh berkurang menjadi sebesar 623.608 orang

Sepanjang periode Agustus 2025 hingga November 2025, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.278 orang di Provinsi Bengkulu. Hal ini selaras dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada November 2025 yang mengalami peningkatan sebesar 0,69%. Angkatan kerja di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 1.162.760 orang, atau bertambah sebanyak 8.062 orang jika dibandingkan dengan posisi pada periode Agustus 2025 yakni sebanyak 1.154.698 orang.

Terdapat tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja dengan pangsa terbesar meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 43,93%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,15%; dan Jasa Pendidikan sebesar 6,80% (*Tabel 6.2*).

Tabel 6.2 Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	PORSI (%)			
	AGT- 24	FEB-25	AGT-25	NOV-25
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	44,43	44,27	44,48	43,93
Perdagangan Besar & Eceran	15,67	16,45	16,73	15,15
Industri Pengolahan	5,08	4,85	4,9	6,80
Konstruksi	4,71	3,84	4,36	4,91
Jasa Pendidikan	6,14	6,52	6,42	5,15
Administrasi Pemerintahan	6,45	6,64	6,22	6,47
Lainnya	17,52	17,43	16,89	

Sumber: BPS, diolah

Lebih lanjut, terdapat sebanyak 36,89% penduduk bekerja pada kegiatan formal, atau tercatat naik sebesar 2,06% dibanding Agustus 2025. Kenaikan ini didorong oleh menurunnya pekerja dengan status berusaha sendiri. Berdasarkan jenis pekerjaannya, tenaga buruh/karyawan cukup mendominasi sebesar 31,62% dan memiliki pangsa yang meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kategori pekerjaan lain yang memiliki porsi relatif besar dengan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya ialah kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 18,04% serta pekerja keluarga sebesar 17,77%. Sementara itu, kategori tenaga kerja berusaha sendiri cenderung mengalami penurunan dari 19,43% pada Agustus 2025, menjadi 14,63% pada November 2025. (*Tabel 6.3*).

Tabel 6.3 Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	PORSI (%)			
	AGT- 24	FEB-25	AGT-25	NOV-25
Buruh/Karyawan/Pegawai	30,04	31,64	30,27	31,62
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	18,26	17,74	18,01	18,04
Berusaha Sendiri	20,73	18,88	19,43	14,63
Pekerja bebas di pertanian	5,73	6,94	7,32	7,77
Pekerja bebas non pertanian	3,96	3,62	3,99	5,01
Berusaha dibantu buruh tetap	3,95	5,57	4,56	5,26
Pekerja keluarga/tak dibayar	17,33	15,60	16,41	17,77

Sumber: BPS, diolah

¹ Pada 2025, survei ketenagakerjaan BPS dilakukan termasuk pada bulan November, dimana pada tahun sebelumnya hanya dilaksanakan pada Februari dan Agustus.





Berdasarkan jenjang pendidikan, terjadi peningkatan komposisi jumlah tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikan SMP, SMA dan SMK. Dibandingkan dengan Agustus 2025, porsi tenaga kerja dengan ketiga latar pendidikan tersebut masing-masing ialah sebesar 17,27%, 25,17%, dan 10,07% pada November 2025. Di sisi lain, penurunan komposisi tenaga kerja justru terjadi pada kelompok tenaga kerja tingkat Diploma, dan perguruan tinggi, dengan masing-masing sebesar 1,73% dan 14,89%. Kondisi ini menunjukkan walau angkatan kerja meningkat, penyerapan tenaga kerja pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi tantangan di Provinsi Bengkulu (Tabel 6.4).

Tabel 6.4 Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan

BERDASARKAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	PORSI (%)			
	AGT- 24	FEB-25	AGT-25	NOV-25
SD kebawah	33,11	33,13	32,75	30,87
SMP	17,22	15,87	16,11	17,27
SMA	23,08	22,11	23,78	25,17
SMK	9,37		9,27	10,07
Diploma I/II/III	2,39	2,77	2,12	1,73
Universitas	14,83	15,96	15,97	14,89

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, porsi pekerja penuh Provinsi Bengkulu untuk November 2025 tercatat sebesar 55,55% atau menurun sebesar 7,30% dibanding Agustus 2025. Sementara itu, pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran cenderung memiliki komposisi yang meningkat masing-masing menjadi sebesar 31,27% dan 13,23%, atau dengan kata lain meningkat 2,83% dan 36,25% dibandingkan Agustus 2025. Pergeseran struktur ketenagakerjaan dalam periode yang relatif singkat tersebut mengindikasikan adanya penurunan intensitas

jam kerja serta potensi pelemahan kualitas penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu menjadi perhatian ke depan. (Tabel 6.5).

Tabel 6.5 Ketenagakerjaan Berdasarkan Jam Kerja

BERDASARKAN JUMLAH JAM KERJA PER MINGGU	PORSI (%)			
	AGT- 24	FEB- 25	AGT-25	NOV-25
Setengah Penganggur	10,05	8,71	9,71	13,23
Pekerja Paruh Waktu	28,12	29,35	30,41	31,27
Pekerja Penuh	61,83	61,94	59,87	55,5
Jumlah	100	100	100	100

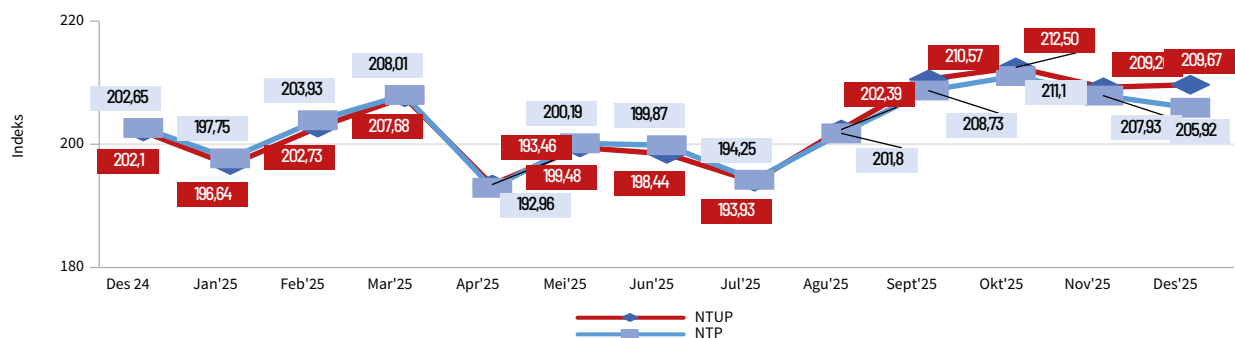
Sumber: BPS, diolah

Adapun secara sektoral, tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak didominasi oleh sektor Industri, Jasa Lainnya, dan Konstruksi. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada industri makanan; maraknya aktivitas hiburan, olahraga dan rekreasi; serta meningkatnya aktivitas konstruksi menjelang akhir tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tetap tumbuh walau melambat, sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang melanjutkan penurunan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV² 2025, NTP Provinsi Bengkulu tercatat berada pada level 208,32, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 201,59.

NTP di Provinsi Bengkulu terutama dibentuk oleh Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), dan NTP Tanaman Pangan (NTPP). Dorongan NTPP dipicu oleh meningkatnya indeks pada kelompok penyusun NTPP yaitu kelompok



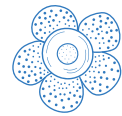
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.1

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian

2 NTP TW IV 2025 adalah rata-rata NTP Oktober-Desember 2025




Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	NILAI TUKAR PETANI											
	TW II 2025				TW III 2025				TW IV2025			
	APR	MEI	JUN	TW II	JUL	AGT	SEP	TW III	OKT	NOV	DES	TW IV
UMUM	192,96	200,19	199,87	197,67	194,25	201,80	208,73	201,59	211,10	207,93	205,92	208,32
TANAMAN PANGAN	110,42	115,82	116,01	114,08	114,14	115,02	116,23	115,13	114,90	115,84	115,39	115,38
HORTIKULTURA	127,78	142,43	134,2	134,8	143,16	135,00	160,35	146,17	135,22	143,63	144,41	141,09
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	218,51	223,53	222,65	221,56	218,46	228,73	236,12	227,77	240,97	236,13	233,55	236,88
PETERNAKAN	97,02	104,25	103,57	101,61	98,87	98,07	98,03	98,32	98,44	98,30	98,50	98,41
PERIKANAN	106,53	110,85	109,47	108,95	105,68	104,14	103,17	104,33	104,10	105,37	106,70	104,00

Sumber: BPS, diolah

padi. Sementara itu, NTP Tanaman Hortikultura (NTPH), Peternakan dan Perikanan cenderung menurun.

Tren pergerakan NTP secara bulanan sejalan dengan tren pergerakan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) (*Grafik 6.1*). Level NTP dan NTUP masyarakat Provinsi Bengkulu tetap konsisten berada di atas 100 menunjukkan rasio indeks harga yang diterima petani di atas indeks harga untuk biaya produksi, kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain, sehingga mencerminkan kesejahteraan petani yang saat ini masih berada dalam kondisi yang baik.

NTP pada bulan Oktober, November dan Desember 2025 secara berturut-urut tercatat sebesar 201,10; 207,93; dan 205,92. Sub sektor dengan nilai NTP terbesar pada bulan Desember 2025 meliputi tanaman perkebunan rakyat sebesar 233,55; hortikultura sebesar 144,41; tanaman pangan sebesar 115,39, serta subsektor perikanan sebesar 106,70. Lebih lanjut, NTP untuk sub sektor peternakan menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya, walau masih berada di bawah angka 100, yakni 98,50 pada Desember 2025. Kondisi ini mengindikasikan harga yang diterima peternak di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan harga yang harus mereka bayar.

6.2 KEMISKINAN

Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh membaiknya aktivitas dan kinerja ekonomi daerah.

Berdasarkan data BPS pada periode September 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 11,88%, atau menurun dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebesar 12,25%. Walau secara persentase membaik, persentase penduduk miskin di Bengkulu masih menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera, dan masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin nasional yang tercatat sebesar 8,25% pada periode ini.

Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi di daerah pedesaan, sementara itu jumlah penduduk miskin di perkotaan cenderung meningkat. Lebih lanjut, total penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 250,19 ribu jiwa atau turun sebanyak 10,96 ribu jiwa dibandingkan dengan periode September 2024 yang tercatat sebanyak 261,15 ribu jiwa (*Tabel 6.7*).

Tabel 6.7 Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2022-2025

KETERANGAN	2022		2023	2024		2025	
	MARET	SEPT	MARET	MARET	SEPT	MARET	SEPT
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	297,23	292,93	288,46	281,36	261,15	252,97	250,19
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,62	14,34	14,04	13,56	12,25	12,08	11,88
- Kota	14,88	14,53	14,21	13,56	12,32	12,34	13,23
- Desa	14,49	14,24	13,96	13,56	12,63	11,95	11,19
Garis Kemiskinan (Rp)	590.754	625.650	637.142	671.095	672.816	683,820	712,003
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,43	2,17	2,14	2,11	1,84	1,83	1,67
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,58	0,47	0,52	0,49	0,37	0,38	0,32

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, diolah



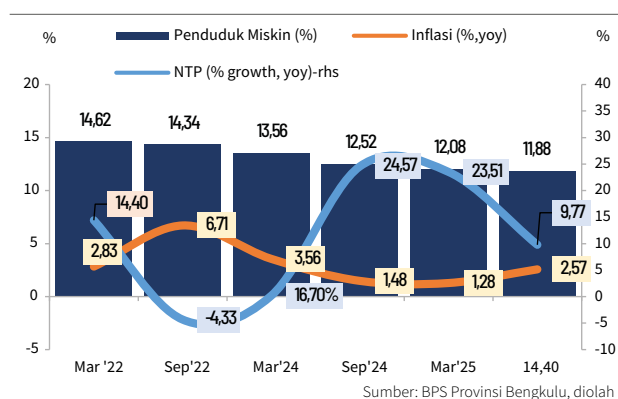


Dalam hal pengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin, saat ini BPS telah menggunakan indikator garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Pada periode September 2025 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 4,12% dibandingkan periode September 2024 yaitu dari Rp672.816,-/kapita/bulan menjadi sebesar Rp712.003,-/kapita/bulan. Berdasarkan komponennya, Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2025, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,73 persen terhadap Garis Kemiskinan sedangkan komoditi bukan makanan menyumbang 26,27 persen. Lebih dalam, beberapa komoditas makanan yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan meliputi beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan tongkol/tuna/cakalang. Sementara komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik di perkotaan maupun di perdesaan masing-masing perumahan, bensin, listrik dan pendidikan. Meski mengalami peningkatan garis kemiskinan, adanya program pasar murah, Bantuan Sosial Non Tunai berupa Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah berhasil menahan kenaikan lebih jauh.

Dari sisi kedalaman dan keparahan, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

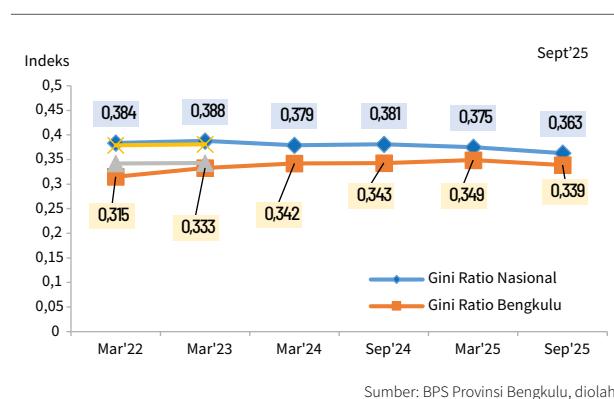
Keparahan Kemiskinan (P2). Pada kedua indeks jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya terdapat sedikit penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 1,84 pada September 2024 menjadi 1,67 pada September 2025. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga relatif menurun dari 0,37 pada September 2024 menjadi 0,32 pada September 2025. Penurunan indeks P1 dapat diartikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berada pada level 1,67. Menurunnya kondisi ini disebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada momen yang sama. Sementara penurunan indeks P2 menandakan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat mendorong peningkatan pendapatan, sehingga pada akhirnya mendorong penurunan angka kemiskinan.

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga tercermin oleh tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui indikator rasio gini. Pada September 2025, tingkat rasio gini di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 0,339, cenderung menurun dibandingkan periode September 2024 yang tercatat sebesar 0,343. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu senantiasa melakukan kolaborasi dan sinergi kebijakan dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka mendorong kinerja ekonomi di daerah.



Grafik 6.2

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu



Grafik 6.3

Perkembangan Gini Ratio Bengkulu & Nasional



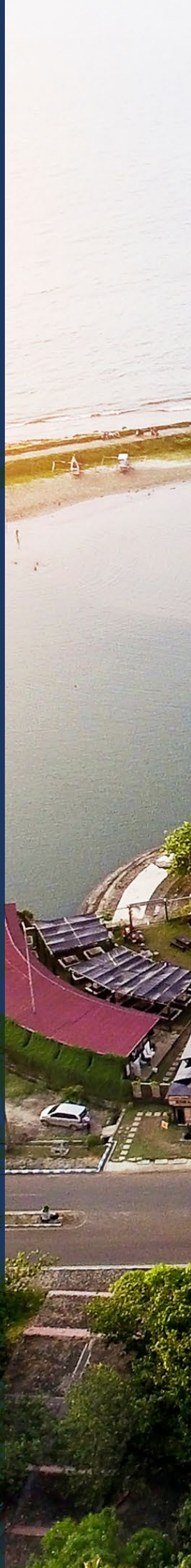
BAB 7



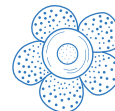
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diperkirakan mampu tumbuh positif pada level yang menyamai tahun 2025, yaitu rentang 4,46 – 5,26% (yoy). Pada triwulan I 2026, ekonomi Provinsi Bengkulu diperkirakan melandai dibandingkan sebelumnya dipicu oleh kebijakan realokasi anggaran seiring pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dan berkurangnya MICE.

- Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan terakselerasi, didorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), THR, dan kenaikan tunjangan pada ASN, dan berlanjutnya bantuan sosial. Adapun konsumsi pemerintah diperkirakan terdeselerasi, dipengaruhi oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pengurangan anggaran fiskal menekan belanja operasi dan barang/ jasa pemerintah. Lebih lanjut, terdapat potensi tekanan pada mobilitas masyarakat dan aktivitas MICE menahan LU akomodasi dan makan/minum.
- Adapun kinerja LU pertanian diperkirakan lebih baik seiring hasil panen yang meningkat dan LU perdagangan yang membaik. Kinerja LU transportasi dan pergudangan diperkirakan turut menguat seiring selesainya alur Pelabuhan Pulau Baai tahap II dan akan terus berlanjut tahap III dengan target kedalaman 12 meter.
- Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan menurun dibandingkan 2025 namun tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pola musiman konsumsi pada paruh kedua tahun dan risiko pasokan hortikultura selama fase tanam. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.







7.1 PROSPEK MAKROEKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026

Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kondisi tersebut diperkirakan disebabkan oleh terbatasnya konsumsi pemerintah, yang dipengaruhi oleh pola musiman realisasi belanja yang masih tertahan pada awal tahun, seiring dengan pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Selain itu, diberlakukannya kebijakan efisiensi jam kerja yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, serta arahan efisiensi dengan skema *Work From Anywhere* (WFA) dan *Work From Office* (WFO) yang hanya berlangsung selama 3 hari (Senin-Rabu), serta WFA pada Kamis-Jumat, telah mulai diterapkan sejak Januari 2026.

Di sisi lain, berdasarkan informasi dari Kantor Wilayah DPJB Provinsi Bengkulu, kinerja ekspor diperkirakan masih tertahan, dipengaruhi oleh belum adanya penetapan bea keluar yang diperlukan, seiring dengan belum diterbitkannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk operasional perusahaan batu bara.

Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Bengkulu ditopang oleh penguatan kinerja konsumsi rumah tangga. Peningkatan ini didorong beberapa faktor, yakni periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri seiring pencairan THR, Gaji ke 13 ASN, serta tunjangan profesi guru. Selain itu, momentum perayaan Imlek dan kenaikan UMP Provinsi turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survei konsumen, terdapat indikasi perlambatan ekspektasi terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya pada sektor yang terdampak kebijakan pengetatan anggaran. Kondisi ini sejalan dengan penyesuaian upah dan tunjangan yang berlaku pada tahun 2026 tercatat mengalami moderasi, sehingga berpotensi membatasi optimisme masyarakat terhadap prospek pendapatan ke depan.

Kinerja investasi pada triwulan I 2026 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini seiring dengan pola historis belanja modal pemerintah yang belum optimal pada awal tahun, mengingat masih berada pada tahap kontrak pembangunan. Namun demikian, prakiraan kinerja investasi pada triwulan I 2026 akan didorong oleh percepatan penyelesaian RTRW Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai, seiring dengan situasi politik yang mulai kondusif mengakhiri masa *wait and see* dari investor. Di samping itu, terdapat potensi investasi proyek swasta dan dukungan terhadap program cetak sawah, yang diharapkan dapat mendorong investasi non keuangan.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan menurun pada triwulan I 2025. Pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, serta diberlakukannya kebijakan efisiensi jam kerja yang mengurangi hari kerja menjadi 3 hari dalam seminggu dengan skema *Work From Anywhere* (WFA) pada hari Kamis dan Jumat serta *Work From Office* (WFO) pada hari Senin hingga Rabu, disertai dengan pengurangan kegiatan seremonial, diperkirakan turut membatasi kinerja konsumsi pemerintah. Lebih lanjut, kebijakan efisiensi ini berpotensi memperlambat laju belanja pemerintah yang berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada pengeluaran pemerintah.

Selain itu, pengurangan kegiatan seremonial yang biasanya mencakup pertemuan formal dan acara lainnya turut berkontribusi pada penurunan aktivitas ekonomi yang berbasis pada pengeluaran pemerintah daerah, yang selanjutnya berisiko mengurangi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan tumbuh positif pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini seiring dengan normalisasi alur distribusi ekspor melalui jalur laut, yang didorong oleh penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang mencapai kedalaman 6,5 meter. Proses ini akan berlanjut dengan target kedalaman 12 meter, yang diharapkan dapat semakin memperlancar aktivitas





logistik dan distribusi barang ekspor. Dari sisi eksternal, PMI negara Mitra Dagang India mengalami perbaikan 57,50 dari yang sebelumnya sebesar 56,80. Sementara itu, untuk PMI China cenderung stabil pada level 50,1 dan PMI Filipina yang juga stabil 51,80.

Namun demikian, berdasarkan informasi Bea Cukai Provinsi Bengkulu, pertumbuhan ekspor tertahan oleh kinerja LU pertambangan, yang disebabkan oleh belum adanya penetapan bea keluar, seiring dengan masih menunggu terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk operasional perusahaan pertambangan. Sementara, Berdasarkan BPS Provinsi Bengkulu, masalah terkait ekspor CPO Bengkulu yang selama ini tidak tercatat disebabkan oleh perhitungan ekspor yang didasarkan pada asal penyandaran kapal. Selain itu, berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, pada periode pelaporan ini, ekspor CPO masih dalam tahap pendaftaran dan menunggu terbitnya sertifikat *General Administration of Customs China (GACC)* untuk bisa tercatat secara resmi.

Perbaikan ini terutama didukung oleh meningkatnya kelancaran aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai, seiring dengan penyelesaian beberapa pekerjaan infrastruktur logistik turut mempercepat arus keluar komoditas unggulan Bengkulu, seperti batubara, CPO, dan karet.

Peningkatan efisiensi logistik tersebut tidak hanya mempercepat proses pengiriman, tetapi juga menurunkan biaya operasional bagi eksportir, sehingga mendorong volume pengapalan. Di sisi lain, permintaan eksternal terhadap komoditas utama Bengkulu juga menunjukkan perbaikan moderat, seiring dengan stabilisasi harga komoditas global. Dengan kombinasi faktor ini, kontribusi sektor ekspor terhadap perekonomian Bengkulu diperkirakan akan menguat, sehingga dapat menopang kinerja ekonomi daerah pada triwulan berjalan 2026.

Sisi Lapangan Usaha

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), diselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 terutama diperkirakan terjadi pada LU Pertanian, LU Pertambangan dan LU Perdagangan.

Peningkatan pertumbuhan juga didorong oleh mulai berproduksinya tanaman hasil program *replanting* kelapa sawit yang didukung oleh pemupukan yang baik pada tahun 2025, berdampak pada peningkatan kualitas tanaman, khususnya awal pada tahun 2026 yang mulai memasuki masa panen. Di sisi lain, pembenihan ikan di beberapa sentra produksi turut mendukung pertumbuhan LU pertanian yang baik.

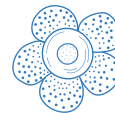
Selain meningkatkan volume produksi, beragam program tersebut juga akan berdampak pada perbaikan daya beli rumah tangga petani, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait, seperti perdagangan dan jasa transportasi.

Berdasarkan informasi BPS, panen padi di Provinsi Bengkulu pada awal 2026 diprediksi akan meningkat, ditopang kenaikan luas panen dan upaya panen serempak yang di rencanakan pemerintah daerah, berpotensi meningkatkan produksi beras. Sementara, pada komoditas jagung juga diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan LU pertanian karena adanya panen raya hasil implementasi program Sadesahe (Satu Desa Satu Hektare). Secara keseluruhan, momentum panen tanaman pangan dan hortikultura, khususnya komoditas jagung yang merupakan hasil implementasi program Sadesahe (satu desa satu hektare) juga akan menjadi motor utama penguatan sektor pertanian pada tahun 2026.

Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh positif didorong oleh penguatan LU pertanian yang mendukung ketersediaan bahan baku, serta prakiraan peningkatan kinerja industri besar dan sedang dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan distribusi pada periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta perayaan Imlek. Selain itu, beroperasinya kembali Pelabuhan Pulau Baai membarikan katalis positif bagi kelancaran distribusi, berperan sebagai hub penyaluran bahan baku komoditas unggulan, termasuk yang berasal dari Pulau Enggano, sehingga memperluas kapasitas dan jangkauan pasar industri pengolahan di Bengkulu.

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan diperkirakan akan tumbuh positif pada triwulan I





2026 seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi RT pada momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta perayaan Imlek. Peningkatan ini juga didorong oleh implementasi kegiatan pasar murah, bazar, bantuan sosial selama bulan Ramadhan serta pelaksanaan Kampung Ramadhan. Selain itu, masuknya periode panen tanaman pangan dan hortikultura turut mendorong peningkatan volume distribusi komoditas dari sentra produksi ke pasar, sehingga memperkuat dinamika perdagangan di berbagai wilayah Bengkulu. Peningkatan suplai hasil panen ini tidak hanya memperbesar aktivitas transaksi di tingkat petani dan pedagang, tetapi juga menggerakkan perdagangan di pasar tradisional maupun ritel modern.

Di sisi lain, momentum musiman HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta perayaan Imlek turut memperkuat permintaan masyarakat terhadap berbagai barang kebutuhan pokok dan konsumsi rumah tangga. Meningkatnya mobilitas serta transaksi masyarakat pada periode ini memberikan dorongan tambahan bagi sektor perdagangan. Dengan kombinasi perbaikan suplai dari sektor pertanian dan lonjakan permintaan musiman, kinerja LU Perdagangan diperkirakan akan berada pada tren yang lebih positif selama periode pelaporan. Selain itu, akselerasi LU ini juga turut didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring penyaluran bantuan sosial.

Di samping itu, tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan kontribusi terbesar berasal dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, yang menyumbang sebesar 43,12% dari total tenaga kerja pada periode pelaporan.

LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan menguat pada periode triwulan I 2026. Hal ini diperkirakan didorong oleh meningkatnya aktivitas bongkar muat seiring dengan beroperasinya kembali Pelabuhan Pulau Baai seiring penyelesaian revitalisasi tahap kedua, yang mencapai kedalaman 6,5 meter. Selain itu, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2026 juga diperkirakan akan mendapatkan tambahan dukungan dari momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri serta Perayaan Imlek. Pada periode ini, mobilitas masyarakat umumnya meningkat untuk keperluan

perjalanan antarwilayah, aktivitas konsumsi, dan distribusi barang kebutuhan pokok

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi diperkirakan akan melambat pada triwulan I 2026 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan sejalan dengan lambatnya belanja produktif pada awal tahun, yang dipengaruhi oleh proses kontrak tahun sebelumnya yang belum selesai, serta sebagian besar proyek strategis yang masih berada pada tahap penandatanganan kontrak. Pada triwulan I, kegiatan belanja modal umumnya lebih banyak berfokus pada persiapan administratif dan perencanaan, yang mengakibatkan penundaan relisasi fisik proyek. Selain itu, penyerapan anggaran pada awal tahun biasanya lebih terbatas, ditambah dengan adanya penurunan belanja seiring dengan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, yang berdampak pada pemerintah daerah.

7.2 PERTUMBUHAN EKONOMI 2026

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan tumbuh di rentang 4,46 - 5,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan terutama didorong oleh akselerasi Konsumsi Rumah Tangga selama periode *peak season*, yang menopang peningkatan permintaan domestik. Selain itu, perbaikan produktivitas LU pertanian serta penguatan industri pengolahan CPO turut menjadi faktor pendukung, seiring dengan penyelesaian permasalahan pencatatan ekspor komoditas CPO dan pengembangan Terminal Curah Cair (TCC) yang terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh lebih terbatas, seiring dengan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi belanja, sehingga berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih lanjut.





Sisi Pengeluaran

Pada tahun 2026, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Perbaikan konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh tren peningkatan pendapatan masyarakat pasca kenaikan harga komoditas kopi dan CPO, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), serta pencairan THR, dan Gaji ke-13 dan tunjangan profesi guru. Selain itu, pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah turut memperkuat daya beli masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan produktivitas sektor pertanian juga menjadi faktor pendukung konsumsi. Hal ini didorong oleh berlanjutnya program *replanting* kelapa sawit, perluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), program cetak sawah, implementasi program Sadesahe serta pemupukan yang optimal pada tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas tersebut menopang pendapatan rumah tangga petani dan berpotensi mendorong konsumsi lebih lanjut.

Namun demikian, tingkat optimisme konsumen menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencatat rata-rata sepanjang tahun 2025 sebesar 117,64 menurun sebesar 5,22% (yoy) dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 124,10. Perkembangan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian konsumen dalam melakukan pengeluaran, meskipun fundamental pendapatan menunjukkan perbaikan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tertahan oleh konsumsi pemerintah yang mengalami deselerasi. Kinerja konsumsi pemerintah tersebut dipengaruhi oleh melambatnya realisasi belanja APBD, seiring dengan penurunan penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang tercatat sebesar sebesar Rp7,98 triliun, atau menurun 20,38% dibandingkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp10,81 triliun. Di sisi lain, arah kebijakan belanja pemerintah pada tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan program yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Fokus kebijakan ini berimplikasi pada penyesuaian komposisi belanja, yang berpotensi membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

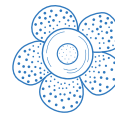
Pada tahun 2026, PMTB diperkirakan mengalami pertumbuhan yang membaik. Hal ini didukung oleh semakin masifnya kegiatan promosi investasi adanya potensi investasi non Pemerintah, seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan serta normalisasi perilaku investor, khususnya di LU komoditas CPO, menunjukkan kecenderungan *wait and see* pasca perkembangan terkait pembangunan Kawasan Industri yang telah mendapatkan kejelasan dari PT Pelindo, dengan luas lahan mencapai 218 hektare.

Perbaikan juga ditopang dengan dimulainya kegiatan konstruksi seperti pembangunan jalan, jembatan, revitalisasi sekolah serta pembangunan KDMP dan dapur MBG. Di sektor pertanian, berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang meningkatkan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), serta perluasan cetak sawah, turut mendukung peningkatan investasi rill. Selain itu, pembangunan Terminal Curah Cair (TCC) dan berlanjutnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tahap III yang ditargetkan mencapai kedalaman 12 meter menjadi faktor pendorong tambahan bagi kinerja PMTB.

Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian mitra dagang dan investor utama relatif terjaga. Pertumbuhan manufaktur dan kebutuhan energi domestik di India masih cukup kuat, sementara Tiongkok dan Jepang menunjukkan stabilitas aktivitas industri di tengah proses transisi energi. Secara keseluruhan, permintaan eksternal terhadap komoditas utama Bengkulu diperkirakan tumbuh moderat. Namun demikian, dinamika kebijakan energi global dan potensi perlambatan sektor industri negara mitra tetap menjadi faktor risiko yang dapat menahan akselerasi kinerja PMTB.

Ekspor di tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh normalisasi infrastruktur logistik seiring penyelesaian revitalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai tahap III yang ditargetkan mencapai kedalaman 12 meter. Perbaikan kapasitas dan kelancaran operasional pelabuhan tersebut meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan antar wilayah maupun ekspor luar negeri. Selain itu, optimalisasi alternatif pelabuhan lain turut mendukung kelancaran rantai pasok komoditas unggulan, khususnya batu bara dan karet. Prospek ini





juga diperkuat oleh peningkatan produktivitas komoditas utama serta stabilisasi permintaan dari mitra dagang utama.

Namun demikian, kinerja ekspor tetap perlu menjadi perhatian di tengah tren penurunan nilai komoditas pertambangan serta tingginya ketergantungan pada komoditas primer. Fluktuasi harga global dan dinamika permintaan eksternal berpotensi menahan akselerasi ekspor. Di sisi lain, kebijakan tarif impor USA serta meningkatnya tensi perdagangan global turut menjadi faktor risiko tambahan yang dapat mempengaruhi permintaan ekspor secara tidak langsung.

Sisi Lapangan Usaha

Pada tahun 2026 kinerja LU Pertanian, LU Perdagangan, LU Pertambangan, LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan 2025.

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan tumbuh akseleratif. Hal ini seiring dengan dukungan pemerintah untuk akselerasi produktivitas pertanian seiring naiknya harga CPO dan komoditas kopi serta indikator seperti NTP yang juga menunjukkan perbaikan. Perbaikan juga didorong oleh prospek perbaikan harga komoditas turunan kelapa sawit, mulai berproduksinya tanaman hasil program *replanting* kelapa sawit dan dampak peningkatan kualitas yang ditopang oleh pemupukan yang baik pada tahun sebelumnya, serta produksi beberapa komoditas pertanian. Selain itu, bantuan pemerintah berupa pemberian pupuk subsidi dan herbisida untuk mencegah gulma juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja LU pertanian.

Peningkatan harga komoditas kopi akibat tingginya permintaan juga mendorong realisasi pertumbuhan LU pertanian. Kenaikan harga kopi di tingkat global turut mempengaruhi harga kopi lokal yang menyebabkan dorongan pertumbuhan terutama di daerah sentra kopi seperti Kab. Kepahiang. Lebih lanjut, masuknya musim trek berdampak di subsektor perkebunan. Disisi lain, sepanjang tahun 2026, tinggi gelombang laut di perairan

Bengkulu juga masih berada pada level yang sedang, berada di kisaran 1,5 – 2 meter. Kondisi ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap kondisi tangkapan nelayan.

Namun demikian, pertumbuhan LU pertanian masih berpotensi tertahan akibat risiko cuaca dan curah hujan yang tinggi pada triwulan III dan IV mendatang, berpotensi membatasi hasil panen yang optimal.

LU Perdagangan diperkirakan turut mengalami akselerasi pertumbuhan. Menguatnya pertumbuhan pada LU perdagangan sejalan dengan semakin masifnya proyek strategis MBG. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu sebesar 5,8% serta adanya insentif lain, seperti tunjangan profesi guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, turut mendorong peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu, perbaikan alur logistik Pelabuhan Pulau Baai dapat mendorong aktivitas perdagangan antar wilayah. Akselerasi pada kinerja lapangan usaha LU pertanian dan industri pengolahan diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan.

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tetap tumbuh solid dengan adanya dorongan perbaikan fasilitas transportasi baik jalur jalan, jembatan, termasuk revitalisasi Pulau Baai.

Sejalan hal tersebut, kinerja LU penyediaan akomodasi dan makan/minum diperkirakan tetap tumbuh akseleratif. Namun demikian, adanya efisiensi anggaran menahan pertumbuhan kinerja sektor pariwisata yang tercermin dari pengurangan frekuensi penyelenggaraan MICE dan penyediaan akomodasi penginapan serta perjalanan dinas.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh positif di tahun 2026. Akselerasi tersebut diperkirakan didorong oleh perbaikan pada LU Pertanian dan peningkatan produksi yang membaik pada awal tahun. Selain itu, akselerasi ini turut didukung oleh meningkatnya pasokan TBS kelapa sawit dari petani, seiring dengan mulai beroperasinya 2 (dua) pabrik CPO baru di Kabupaten Seluma.





Namun, LU industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh terbatas, akibat normalisasi pasca *peak season*, menyebabkan volume produksi cenderung kembali ke level normal. Selain itu, volatilitas harga komoditas global membuat pelaku industri lebih berhati-hati dalam meningkatkan produksi.

LU Konstruksi diperkirakan melambat pada tahun 2026. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya proyek yang masuk kedalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang menyebabkan terbatasnya proyek pembangunan. Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh menurunnya realisasi investasi, terbatasnya penyerapan belanja modal pemerintah, seiring prakiraan penurunan pembelian kendaraan berat, seperti truk dan *pick up*, yang mencerminkan berkurangnya aktivitas LU konstruksi.

Adapun perlambatan diperkirakan tertahan oleh rencana pembangunan beberapa investasi fisik swasta, seperti pembangunan kawasan industri Pelabuhan Pulau Baai serta pembangunan Terminal Curah Cair (TCC), yang telah memasuki tahap *groundbreaking* dan persetujuan perizinan pengoperasian alat berat di Pelabuhan Pulau Baai. Lebih lanjut, berlanjutnya perbaikan jalan dan jembatan, serta perbaikan irigasi oleh pemerintah, diharapkan dapat menahan laju perlambatan pada periode pelaporan.

Di samping itu, LU administrasi pemerintah diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2025. Kondisi ini dipicu kebijakan realokasi anggaran operasional, seiring tertahannya pendapatan daerah, serta pengurangan hari kerja menjadi tiga hari dalam seminggu, dan efisiensi acara seremonial, yang berdampak pada terbatasnya mobilitas serta kegiatan MICE.

7.3 PROSPEK INFLASI

Tekanan Inflasi 2026

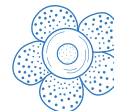
Provinsi Bengkulu diperkirakan mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan inflasi IHK berada pada kisaran 2,28%–4,28% (yoy).

Tekanan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, inflasi komponen AP yang tinggi akibat base year effect, periode yang sama tahun 2025 terdapat kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya <1.300 VA. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbandingan harga yang lebih tinggi pada tahun 2026, yang mendorong inflasi AP.

Sementara, inflasi pada komponen VF diperkirakan akan melandai, seiring dengan masuknya musim panen beberapa komoditas utama seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras, yang diharapkan dapat menstabilkan harga pangan.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan melandai dibandingkan tahun 2025, tetap dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Penurunan pada inflasi pangan diperkirakan sejalan dengan program ekstensifikasi lahan pangan terutama jagung pada program Sadesahe 2026 yang berlanjut, Keberlanjutan SPHP Beras sepanjang tahun 2026, ekstensifikasi lahan melalui cetak sawah, dan intensifikasi produksi hortikultura. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sesuai kerangka 4K pengendalian inflasi diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.





Daftar Istilah

Administered Price (AP)	Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik Pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI. Dalam buku ini bank Pemerintah Daerah (Bank Bengkulu) juga dikelompokkan dalam bank pemerintah.
Bobot Inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dan penukaran uang masyarakat dalam periode tertentu.
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dan penukaran uang masyarakat dalam periode tertentu.
Clean Money Policy	Merupakan kebijakan untuk menyediakan uang layak edar.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Ekspor	Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflasi Inti	Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen Volatile Foods dan Administered Price.
Impor	Keseluruhan barang yang masuk dari suatu wilayah /daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah.
Kredit	Adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : 1. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA) 2. Pengembalian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.





Daftar Istilah

Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Liaison Bank Indonesia	Salah satu kegiatan rutin untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi aktual sektor riil/usaha beserta prospeknya melalui wawancara langsung antara Bank Indonesia dengan pelaku usaha/sumber data.
MTM/mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash Inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Non Performing Loans (NPL)	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi Kurang lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
Porsi Ekonomi	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)	Merupakan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga di periode tersebut sebagai dasar perhitungan.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Merupakan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai dasar perhitungan.
Produk Domestik Regional Bruto Satu Tahun	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dalam satu tahun.
Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dalam satu triwulan tertentu.
QTQ/qtq	Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs. Terminologi NPL untuk bank konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit.
Sektor Ekonomi Dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang.
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah dan sistem moneter.
Uang Gartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
Volatile Foods (VF)	Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat fluktuatif.
YOY/yoy	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.







**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU**

Jl. A. Yani No.1, Kebun Keling, Kec. Tlk. Segara,
Kota Bengkulu, Bengkulu 38116

www.bi.go.id

